



**BENTUK EKSPLOITASI DAN PERLAWANAN SIMBOLIK BURUH  
LEPAS PADA PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN (PDP) SUMBER  
WADUNG KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Oleh

**APRILLIA MAHARANI**

**NIM 100910302021**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2015**



**BENTUK EKSPLOITASI DAN PERLAWANAN SIMBOLIK BURUH  
LEPAS PADA PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN (PDP) SUMBER  
WADUNG KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sosiologi (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

oleh

**APRILLIA MAHARANI**

**NIM 100910302021**

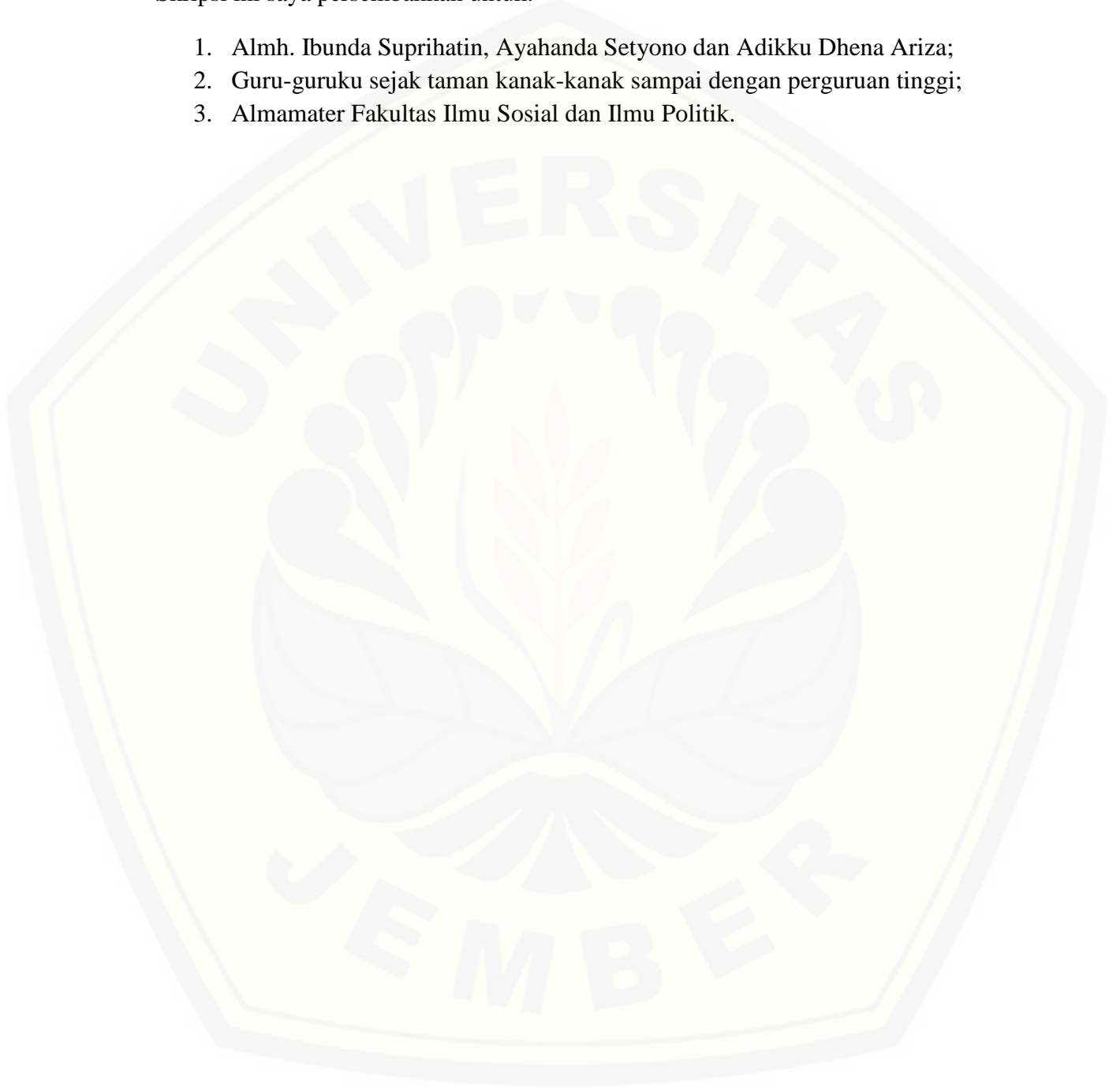
**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2015**

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Almh. Ibunda Suprihatin, Ayahanda Setyono dan Adikku Dhena Ariza;
2. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.



**MOTTO**

“Kami telah mewariskan kekuasaan kepada Bani Israil, kaum yang dahulunya tertindas dari negeri Syiria dan Irak, Yordania dan Palestina. Negeri-negeri itu adalah negeri yang Kami berkahi. Wahai Muhammad, pertolongan yang sempurna dari Tuhanmu kepada Bani Israil itu datang karena kesabaran mereka. Kami binasakan semua tipu daya Fir’aun dan kaumnya serta semua yang telah mereka usahakan.” (Terjemahan Q.S. Al- A’raf, 7: 137)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. 1971. Al Qu’ran dan Terjemahannya. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al Qur’an.

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

nama : Aprillia Maharani

nim : 100910302021

menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul “Bentuk Eksploitasi Dan Perlawanan Simbolik Buruh Lepas Pada Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Sumber Wadung Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Februari 2015

Yang menyatakan,

Aprillia Maharani

NIM 100910302021

**SKRIPSI**

**BENTUK EKSPLOITASI DAN PERLAWANAN SIMBOLIK BURUH  
LEPAS PADA PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN (PDP) SUMBER  
WADUNG KABUPATEN JEMBER**

diajukan guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sosiologi (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

**APRILLIA MAHARANI**

**100910302021**

**Pembimbing: Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA.**

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Bentuk Eksploitasi Dan Perlawanan Simbolik Buruh Lepas Pada Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Sumber Wadung Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada:

Hari/tanggal : Kamis, 26 Februari 2015

Jam : 09.00 WIB s.d selesai

Tim Penguji

Ketua

Hery Prasetyo, S.Sos. M.Sosio.

NIP: 198304042008121003

Sekretaris

Anggota

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A

NIP: 195207271981031003

Drs. Joko Mulyono, M.Si

NIP: 196406201990031001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A

NIP: 195207271981031003



## RINGKASAN

**Bentuk Eksploitasi Dan Perlawanan Simbolik Buruh Lepas Pada Perusahaan Daerah Perkebunan Di PDP Sumber Wadung Kabupaten Jember.** Aprillia Maharani, 100910302021. Program Studi Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Jember.

Buruh perkebunan di Jember masih hidup dalam kemiskinan. Nasib mereka sering tidak diperhatikan oleh perusahaan perkebunan, mendapat ketidakadilan dan eksploitasi. Sehingga masih belum memiliki kesejahteraan. Oleh karena itu, mereka sering melakukan perlawanan kepada perusahaan. Penelitian ini mengangkat masalah bagaimana bentuk eksploitasi dan perlawanan simbolik buruh lepas perkebunan di PDP Sumber Wadung Kabupaten Jember. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan, menelaah dan menganalisis bentuk eksploitasi dan perlawanan simbolik buruh lepas perkebunan di PDP Sumber Wadung Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang dipakai antara lain observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa buruh lepas di PDP Sumber Wadung mengalami eksploitasi oleh perusahaan perkebunan. Eksploitasi tersebut antara lain penyimpangan prosedur kerja, merampas hak-hak buruh, mengurangi standar pengupahan, mengeksploitasi tenaga mereka, serta melakukan manipulasi. Eksploitasi telah membuat taraf hidup buruh rendah karena upah yang tidak sesuai standar dan hak-hak mereka yang tidak terpenuhi. Namun tidak ada pilihan lain selain bekerja sebagai buruh karena kondisi lapangan pekerjaan dan ketrampilan yang minim. Pada akhirnya mereka tetap bertahan menjadi buruh perkebunan agar tetap dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Meskipun



hubungan antara buruh dengan kaum elit bersifat eksploitatif dan tidak ada pertukaran yang sepadan. Situasi ironis ini menyebabkan mereka melakukan perlawanan baik secara terbuka dan simbolis. Perlawanan simbolis mereka antara lain mencampur getah karet dengan air, mengulur waktu kerja, memudarnya rasa patuh dan hormat kepada atasan, serta menurunnya semangat kerja. Perlawanan ini dilakukan sehari-hari oleh buruh lepas sebagai alat politis mereka sendiri agar mengurangi tekanan dari eksploitasi.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Bentuk Eksploitasi Dan Perlawanan Simbolik Buruh Lepas Pada Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Sumber Wadung Kabupaten Jember*. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA selaku Dosen pembimbing skripsi sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah meluangkan waktu dan arahan dalam penyusunan skripsi ini;
2. Dra. Elly Suhartini, Msi. Selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan masukan kepada penulis selama menempuh pendidikan;
3. Drs. Ahmad Ganefo selaku ketua Program Studi Sosiologi;
4. Hery Prasetyo, S.Sos, M.Sosio dan Drs. Joko Mulyono, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan saran kepada penulis;
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Sosiologi dan seluruh karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan selama ini;
6. Keluarga besar Mas Yon, Ibu Titik, Ibu Yanti dan para informan yang telah membantu penulis dalam proses penelitian;
7. Anggi, Yovi, Reza, Mesem, Lana, dan Arin karena sudah membantu selama penelitian dan dukungan yang diberikan.

DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	7
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>2.1 Eksploitasi</b> .....	8
<b>2.2 Sejarah Buruh Lepas di Perkebunan</b> .....	10
2.2.1 Kondisi Buruh Lepas di Perkebunan .....	11
<b>2.3 Perkebunan Di Jember</b> .....	11
<b>2.4 <i>Hidden Transcript</i>: Perlawanan Sehari-Hari Kaum Tertindas</b> .....	13
<b>2.5 Penelitian Terdahulu</b> .....	15
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN</b>	
<b>3.1 Metode Penelitian</b> .....	18
<b>3.2 Lokasi Penelitian</b> .....	19

<b>3.3 Penentuan Informan .....</b>	<b>19</b>
<b>3.4 Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>20</b>
3.4.1 Observasi Partisipan.....	20
3.4.2 Wawancara Mendalam.....	21
3.4.3 Dokumentasi .....	22
<b>3.5 Analisis Data .....</b>	<b>22</b>
<b>3.6 Keabsahan Data .....</b>	<b>23</b>
<b>BAB 4 BENTUK EKSPLOITASI DAN PERLAWANAN SIMBOLIK</b>	
<b>BURUH LEPAS</b>	
<b>4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....</b>	<b>27</b>
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Jember .....	27
4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Silo.....	30
4.1.3 Gambaran Umum Desa Harjomulyo.....	31
4.1.3 PDP Sumber Wadung .....	34
<b>4.2 Deskripsi Buruh di Perkebunan .....</b>	<b>38</b>
4.2.1 Sistem Upah Di Perkebunan .....	40
4.2.2 Spesialisasi Pekerjaan Di perkebunan.....	45
4.2.3 Proses Rekrutmen Pekerja .....	46
4.2.4 Serikat Buruh .....	48
<b>4.3 Life History Buruh Perkebunan di PDP Sumber Wadung .....</b>	<b>52</b>
<b>4.4 Eksploitasi Terhadap Buruh Lepas.....</b>	<b>58</b>
4.4.1 Kondisi Buruh Lepas Sebagai Ukuran Eksploitasi .....	58
4.4.2 Hak-Hak Normatif Buruh Lepas Tidak Terpenuhi .....	69
<b>4.5 Perlawanan Simbolik Buruh Lepas: <i>Hidden Transcript</i>.....</b>	<b>76</b>
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>81</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>82</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian ini.....</b>	<b>16</b>
<b>Tabel 2. Jumlah Penduduk Kecamatan Silo Per Desa.....</b>	<b>30</b>
<b>Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Harjomulyo.....</b>	<b>32</b>
<b>Tabel 4. Kualitas Angkatan Kerja penduduk Desa Harjomulyo...</b>	<b>33</b>
<b>Tabel 5. Sistem Pengupahan PDP .....</b>	<b>40</b>

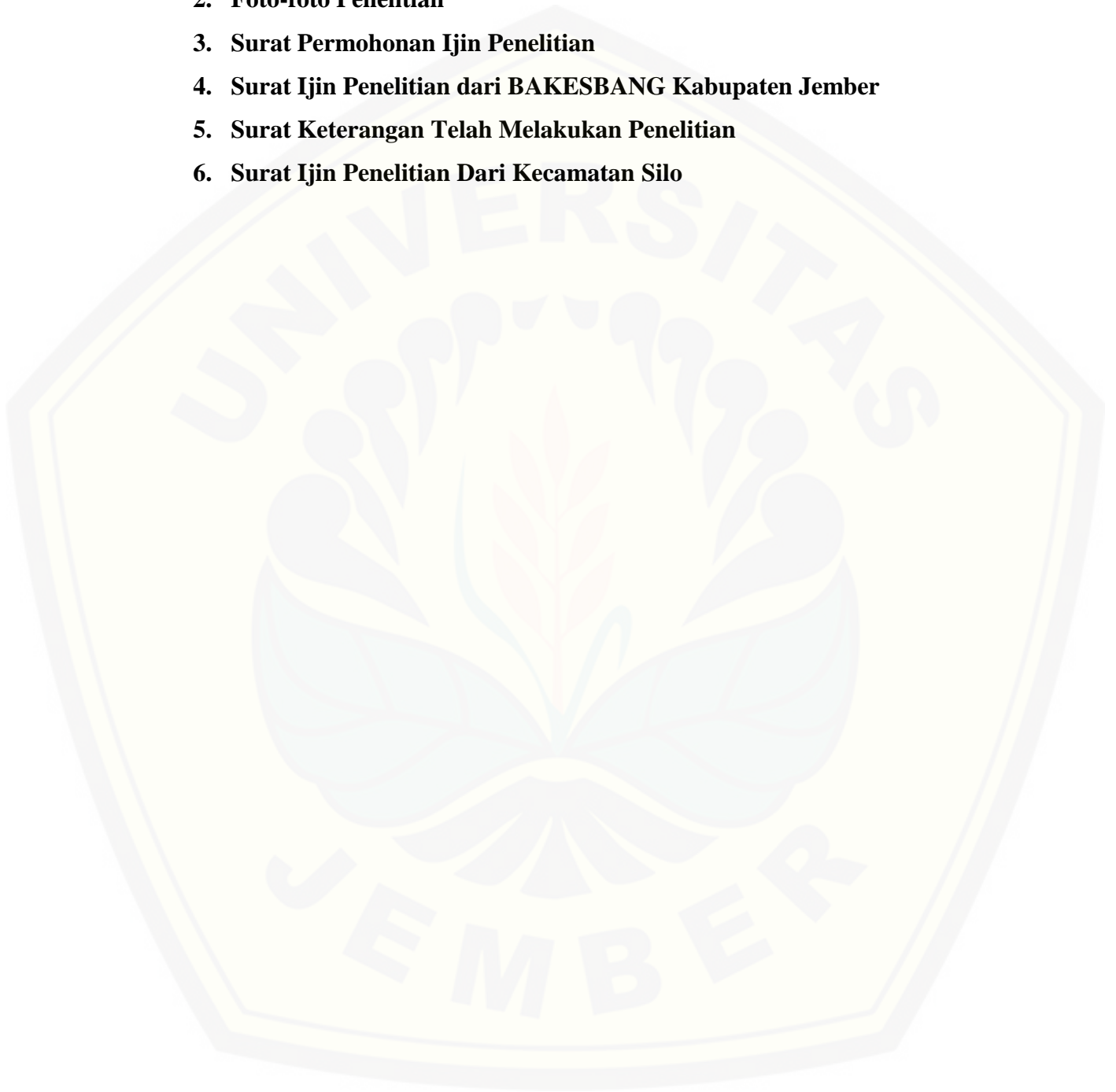
**DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
<b>Gambar 1 Peta Kabupaten Jember.....</b>	<b>28</b>
<b>Gambar 2. Peta Desa Harjomulyo.....</b>	<b>32</b>
<b>Bagan 1. Struktur Organisasi PDP Sumber Wadung Kabupaten Jember.....</b>	<b>37</b>
<b>Bagan 2. Hasil Penelitian.....</b>	<b>81</b>



**DAFTAR LAMPIRAN**

- 1. Pedoman Wawancara Informan**
- 2. Foto-foto Penelitian**
- 3. Surat Permohonan Ijin Penelitian**
- 4. Surat Ijin Penelitian dari BAKESBANG Kabupaten Jember**
- 5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian**
- 6. Surat Ijin Penelitian Dari Kecamatan Silo**



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Sektor perkebunan memberikan kontribusi yang cukup penting terhadap pembangunan nasional. Mayoritas masyarakat Indonesia masih menggantungkan hidup mereka di sektor pertanian dan perkebunan. Sebagai Negara agraris, sektor ini menjadi tumpuan baik dalam segi tenaga kerja maupun produktifitas beraneka tanaman. Produktifitas perkebunan di Indonesia juga sangat melimpah. Sehingga sektor ini mampu meningkatkan pendapatan nasional.

Sejarah perkebunan di Indonesia, sangat berhubungan erat dengan sejarah kolonialisme, terutama bangsa Belanda. Mubyarto, dkk, 1992 (dalam Wiradi, 2001:223) melalui kolonialisme, sistem perkebunan di Indonesia mengalami perubahan dari usaha tambahan untuk usahatani pangan menjadi satu sistem usahatani yang memiliki skala ekonomi besar dan kompleks dengan ciri-ciri menggunakan areal pertanahan yang luas, padat modal, menggunakan tenaga kerja yang rinci dan struktur hubungan kerja yang rapi, berteknologi modern, dan berorientasi pada pasar.

Perkebunan memang menjadi sistem usahatani yang memiliki tujuan mencari profit untuk pemilik modal. Oleh karena itu, faktor tenaga kerja menjadi hal yang penting untuk output perkebunan itu sendiri. Sektor ini mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja, mengingat areal yang sangat luas dan komoditas yang dihasilkan juga melimpah. Pada umumnya, tenaga kerja yang terserap berasal dari penduduk sekitar perkebunan. Tenaga kerja tersebut berasal dari laki-laki dan perempuan usia produktif.

Sebagai bentuk perlindungan dan pengawasan sektor perkebunan, pada pemerintahan era Megawati Soekarnoputri telah membentuk undang-undang nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan. Apabila ditinjau dari substansi undang-undang tersebut, memang tujuan dari diselenggarakannya perkebunan adalah

untuk tujuan komersial dan meningkatkan profit. Seperti pada pasal 1, tercantum pengertian dari perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/ atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. [www.bpkp.go.id/uu/.../2/39/224.bpkp](http://www.bpkp.go.id/uu/.../2/39/224.bpkp). [14 November 2014]

Di Indonesia areal perkebunan sangat luas dan dengan produktifitas yang tinggi setiap tahun. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2013, luas areal tanaman perkebunan besar di Indonesia seperti tanaman kopi, karet, dan tembakau masing-masing adalah 47.800 ha, 539.600 ha, dan 2.900 ha. Sementara untuk luas areal perkebunan rakyat masing-masing sebesar 1.193.100 ha, 3.016.100 ha, dan 267.400 ha. Jumlah perusahaan perkebunan besar untuk komoditas tersebut masing-masing adalah 89 perusahaan perkebunan kopi, 315 perusahaan perkebunan karet, dan 6 perusahaan perkebunan tembakau. Hasil produksi ketiga tanaman tersebut di perkebunan rakyat juga tergolong melimpah, pada tahun 2013 untuk tanaman kopi menghasilkan 669.100 ton, karet menghasilkan 2.885.300 ton, serta tembakau dengan hasil panen sebesar 257.400 ton (Badan Pusat Statistik, 2013).

Secara nasional, areal perkebunan sangat luas dan mampu menyerap banyak tenaga kerja. Secara regional, provinsi Jawa Timur juga memiliki areal perkebunan yang cukup luas. Meskipun, rata-rata areal perkebunan paling luas didominasi di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Di Jawa Timur sendiri luas areal perkebunan untuk tanaman kopi, karet dan tembakau masing-masing seluas 101.100 ha, 26.500 ha, dan, 153.500 ha. Sementara untuk jumlah perusahaan perkebunan di provinsi Jawa Timur sebanyak 141 perusahaan perkebunan. Jumlah perusahaan perkebunan ini menempati urutan ke tujuh secara nasional setelah provinsi Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah. Dari segi produktifitas tanaman, di provinsi Jawa Timur untuk tanaman kopi, karet, dan tembakau menghasilkan masing-masing adalah 54.190 ton, 26.820 ton, 135.750 ton. Dari segi tenaga kerja, jumlah tenaga kerja di

perusahaan perkebunan di provinsi Jawa Timur sebanyak 20.612 orang (Badan Pusat Statistik, 2013).

Namun, areal perkebunan yang luas dan produktifitas komoditas yang melimpah tidak diimbangi dengan kesejahteraan para tenaga kerjanya. Masih banyak buruh perkebunan yang hidup dalam kemiskinan. Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin, menurut data Badan Pusat Statistik (2014) provinsi Jawa timur menempati urutan kedua setelah provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4.786.790 penduduk. Hal ini membuktikan bahwa di provinsi Jawa timur, angka penduduk miskin masih tinggi. Masalah yang sering dihadapi oleh buruh perkebunan adalah kesejahteraan hidup. Antara lain upah murah, subordinasi oleh perkebunan, dan eksploitasi. Masalah tersebut terutama sering dihadapi oleh buruh harian lepas. Hal itu disebabkan status mereka di perkebunan yang tidak jelas. Pada umumnya buruh harian lepas tidak memiliki kontrak kerja yang jelas dan hak-hak yang kurang terjamin. Pada akhirnya, tidak sedikit buruh yang melakukan tuntutan kepada pihak perkebunan.

Masalah tersebut juga terjadi di wilayah Kabupaten Jember. Seperti yang dilansir artikel online majalah Tempo oleh Djunaidy (2013), bahwa buruh perkebunan di Jember melakukan unjuk rasa menolak kehadiran investor. Lebih dari 1000 buruh Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Jember berdemonstrasi di depan kantor Pemerintah Kabupaten pada 17 April 2013 lalu. Mereka menolak Kerjasama Operasional (KSO) antara direksi PDP Jember dan CV Nanggala Citra Lestari. Buruh tersebut berasal dari enam PDP yang berbeda, antara lain Kebun Kali Mrawan, Sumber Wadung, Sumbertenggulun, Gunung Pasang, Ketajek, dan Sumber Pandan. Menurut mereka, kerjasama itu hanya untuk kepentingan direksi dan Bupati, bukan untuk rakyat, apalagi buruh. Hal tersebut menunjukkan bahwa nasib perusahaan hanya mementingkan kepentingan sendiri tanpa memikirkan nasib buruh.

Unjuk rasa menuntut pemenuhan hak-hak normatif buruh juga terjadi kembali pada tanggal 6 Agustus 2014. Berdasarkan artikel online oleh Kusmandani (2014) bahwa ratusan buruh yang bekerja dibawah Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kabupaten Jember melakukan demo di kantor pusat



direksi PDP. Tuntutan mereka antara lain pemenuhan pemberian upah minimum, status buruh, jaminan kesejahteraan, hak istirahat dan cuti, keselamatan kerja, dan pemenuhan THR. Para buruh merasa pekerjaannya selama puluhan tahun tidak diperhatikan oleh perusahaan perkebunan. Para buruh tersebut memang sering melakukan aksi demo karena penyelewengan yang sering dilakukan oleh perusahaan.

Dalam penetapan besarnya upah, pada dasarnya sudah ditentukan oleh UMK yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur. Seperti yang dilansir dalam berita online oleh Purba (2013) bahwa UMK tahun 2013 untuk Kabupaten Jember sebesar Rp. 1.091.000,00. UMK ini lebih besar dibanding dengan tahun sebelumnya yaitu Rp. 920.000,00. Namun tidak semua buruh perkebunan dapat menikmati UMK tersebut. Direktur PDP Kahyangan Kabupaten Jember menyatakan, perbedaan upah diantara buruh ditentukan oleh kategori buruh. Ada dua kategori buruh yang bekerja di perusahaan perkebunan yaitu buruh borongan yang bekerja pada saat musim petik kopi dan sadap, serta kategori kedua adalah buruh tetap. Perbedaan kategori tersebut menyebabkan perbedaan hasil upah yang diterima. Upah buruh borongan disesuaikan dengan tingkat produktifitas buruh itu sendiri, apabila mereka memiliki produktifitas tinggi maka upah yang diterima akan lebih besar dibanding dengan temannya yang berproduktifitas lebih rendah. Buruh yang bekerja diatas 8 jam juga mampu memiliki upah yang lebih banyak dibandingkan buruh yang menerima UMK.

Hasil observasi lapangan (2013) menunjukkan bahwa, kondisi mayoritas buruh perkebunan di desa Harjomulyo masih memprihatinkan. Mereka memperoleh ketidakadilan dan penindasan. Salah satu buruh menyatakan bahwa buruh perkebunan di desa Harjomulyo kurang mendapatkan perhatian dan perlindungan. Hal itu ditunjukkan dengan banyak buruh lepas yang tidak mendapatkan hak-hak normatif, jaminan kerja, sistem kerja yang tidak sesuai, dan durasi kerja yang tidak terbatas. Dengan upah yang tidak sesuai dengan UMK, mereka telah bekerja keras dalam waktu yang lama. Seharusnya mereka diperlakukan adil dan tanpa tekanan. Namun yang terjadi adalah mereka mengalami ketidakadilan dan penindasan.

Buruh perkebunan dan kehutanan paling mudah dieksploitasi, bukan saja karena tempatnya yang sulit dijangkau juga perlindungan hukum yang memadai untuk ini masih terbatas, tak jarang kekerasan menjadi bagian dari pekerjaannya. Tingkat upah yang rendah, jaminan sosial terutama tempat tinggal yang sehat, kesehatan, keselamatan kerja, dan lainnya hampir diabaikan. Disamping lemahnya serikat buruh, juga perhatian pada sektor ini memang terbatas baik dari masyarakat apalagi pemerintah. Tidaklah mengherankan bila feodalisme masih kental dalam manajemen perkebunan, bahkan gaya kolonial masih ada (Septian: 2013).

Berbagai upaya telah dilakukan para buruh untuk memperbaiki nasib mereka. Aksi yang dilakukan secara terbuka untuk menuntut hak-hak mereka adalah dengan demonstrasi. Demonstrasi tersebut sudah dilakukan beberapa kali agar terjadi suatu perubahan dalam tatanan kehidupan ekonomi mereka. Namun upaya tersebut gagal akibat pihak perusahaan yang sering mengabaikan tuntutan para buruh. Pada akhirnya perjuangan buruh tidak lagi secara terbuka, namun lebih pada perlawanan simbolis. Praktik-praktik dominasi dan eksploitasi menyebabkan perlawanan secara tersembunyi para buruh. Ketika upaya secara terbuka tersebut tidak membuahkan hasil, maka para buruh lebih memilih untuk melakukan perlawanan secara tersembunyi.

Berdasarkan kondisi buruh di perkebunan yang telah mengalami penindasan, ketidakadilan, dan juga eksploitasi dari perusahaan perkebunan, muncul adanya perlawanan tersembunyi dari para buruh. Posisi yang termarginalkan dan tertindas mendorong mereka untuk memperbaiki nasib melalui perjuangan kelas. Masalah perlawanan tersembunyi buruh di perkebunan tersebut menarik peneliti untuk mengkaji lebih mendalam. Seperti apa eksploitasi yang mereka alami dan bagaimana perlawanan tersembunyi yang mereka lakukan sebagai bentuk pemberontakan terhadap kaum elit. Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul dalam penelitian ini adalah Bentuk Eksploitasi dan Perlawanan Simbolik Buruh Lepas Pada Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Sumber Wadung Kabupaten Jember.



## 1.2 Rumusan Masalah

Untuk mengawali suatu penelitian, maka sebagai langkah awal peneliti menemukan rumusan masalah terlebih dahulu. Menurut Sandjaja dan Heriyanto (2006:60) masalah penelitian adalah sebagai berikut,

“masalah penelitian adalah sesederhana mengatakan bahwa masalah penelitian merupakan pertanyaan yang mengungkapkan hubungan variabel-variabel dalam penelitian. Pertanyaan ini muncul karena adanya kesenjangan antara apa yang diketahui tentang hubungan antar variable tadi dengan apa yang seharusnya diketahui.”

Perumusan masalah merupakan dasar dalam desain penelitian serta menjelaskan judul penelitian.

Masalah penelitian sendiri dapat diperoleh dari mana saja. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan di lapangan dan melihat fenomena yang terjadi di lapangan. Fenomena tersebut yaitu banyak buruh lepas yang termarginalkan, terdominasi, dan tereksplotasi. Setelah melakukan pengamatan di lapangan, maka selanjutnya peneliti merumuskan masalah berdasarkan fenomena yang dilihat. Berdasarkan pengamatan di lapangan, masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Bentuk Eksploitasi dan Perlawanan Simbolik Buruh Lepas Pada Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Sumber Wadung Kabupaten Jember.

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1.3.1 Tujuan

Sesuai dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis Bentuk Eksploitasi dan Perlawanan Simbolik Buruh Lepas Pada Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Sumber Wadung Kabupaten Jember.

#### 1.3.2 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan kajian atau penelitian tentang bentuk eksploitasi dan perlawanan simbolik buruh lepas perkebunan;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi ilmu pengetahuan sosial, khususnya ilmu pengetahuan sosiologi, dan terutama untuk konsentrasi sosiologi pertanian;
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak PDP Sumber Wadung dan Pemerintah Kabupaten Jember dalam pengambilan kebijakan terhadap kesejahteraan buruh perkebunan khususnya terhadap buruh lepas.

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Eksploitasi

Eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan (tenaga orang) atas diri orang lain. (Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989:222). Sanderson, (2003: 620) menyatakan bahwa eksploitasi merupakan proses yang berhubungan dengan ekonomi yang terjadi ketika suatu kelompok memaksa kelompok lain memberikan sesuatu yang lebih besar nilainya dari yang mereka terima. Eksploitasi dilihat dari perusahaan tidak memperhatikan hak-hak normatif buruh, memeras tenaga mereka dan dominasi yang menyebabkan buruh tidak memiliki kekuatan secara ekonomi dan politik.

Menurut Lorwin (dalam Scott, 1976: 239) eksploitasi memiliki makna terdapat individu, kelompok, maupun kelas yang mengambil keuntungan dari kerja secara tidak adil atas orang lain. Dari makna tersebut terdapat dua ciri yang melekat dalam eksploitasi yaitu, pertama eksploitasi dilihat sebagai suatu tata hubungan diantara perorangan, kelompok, maupun lembaga yang dieksploitasi mengimplikasikan adanya pihak yang mengeksploitasi. Kedua, eksploitasi merupakan distribusi yang tidak wajar dari usaha dan hasilnya. Definisi mengenai eksploitasi sendiri memang lebih mengarah pada aspek materialisme. Seperti para penganut Marxis yang membicarakan masalah eksploitasi berdasarkan nilai tenaga kerja, dimana ukuran dari eksploitasi adalah nilai lebih dari sarana produksi seperti sewa, laba, dan bunga. Namun untuk menilai tingkat eksploitatif suatu tata hubungan tidak hanya didasarkan pada nilai tenaga kerja, melainkan dilihat secara objektif. Hal ini dilihat dari prinsip-prinsip moral seperti misalnya penipuan atau paksaan secara terang-terangan kepada tenaga kerja. Pada taraf ini, diperlukan kriteria keadilan agar dapat menemukan definisi eksploitasi terhadap prinsip-prinsip moral. (Scott, 1976: 240-241).

Ada istilah baku Melayu, yaitu *tindas* atau *menindas*, yang dalam bahasa ilmiah berarti “mengeksplorasi, meremukkan, memerintah secara tidak adil,” namun dalam bahasa sehari-hari orang kampung digunakan untuk menggambarkan orang membunuh kutu rambut antara kuku kedua ibu jari tangan. Istilah-istilah lain yang menimbulkan kesan tentang penindasan, malah lebih lanjut mengimplikasikan bahwa golongan penindas sungguh-sungguh ingin menghisap (Scott, 2000: 250-251).

Kriteria apakah suatu kelas menjadi tereksplorasi ataupun tidak, oleh Scott (1976: 244-247) dijelaskan terdapat empat ukuran keadilan yang potensial sebagaimana yang dapat diterapkan pada petani-penyewa dengan tuan tanah. Empat ukuran tersebut antara lain taraf hidup si penyewa, alternatif terbaik berikutnya, resiprositas atau pertukaran yang sepadan, serta harga yang adil dan legitimasi. Namun ukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga ukuran yaitu taraf hidup si penyewa, alternatif terbaik berikutnya, resiprositas atau pertukaran yang sepadan. Tiga dari empat ukuran inilah yang akan digunakan sebagai landasan apakah para buruh benar-benar mengalami eksploitasi.

Ukuran taraf hidup seorang klien dilihat dari apakah ia masih dapat mencukupi kebutuhan dasar keluarganya atau tidak. Mereka menjalankan suatu sistem yang dibuat oleh kaum elit atau tuan tanah. Sehingga sistem yang dijalankan tuan tanah yang memungkinkan klien hidup relatif berkecukupan pada umumnya dianggap baik, sedangkan sistem yang hampir tidak dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan minimalnya akan dianggap eksploitatif. Suatu teori tentang eksploitasi harus memperhitungkan bukan saja taraf hidup penyewa akan tetapi juga sifat dari hubungan pertukaran yang mempertautkan dia dengan tuan tanahnya. (Scott, 1976: 244-245)

Pada aspek alternatif terbaik berikutnya yang dimaksud disini adalah apakah si klien akan mengalami kerugian yang lebih buruk apabila ia sudah tidak memiliki ikatan dengan tuan tanah. Jika kondisinya lebih buruk saat ia menjadi penyewa, maka ia akan tetap memilih menjadi penyewa daripada menjadi buruh. Penyewa merupakan seorang yang realistis. Ia membandingkan keuntungan-keuntungan dari keadaannya sebagai penyewa dengan keuntungan-keuntungan apabila ia menjadi buruh tani. Ia akan menyadari bahwa ia relative menyukai perannya sekarang daripada alternatif berikutnya. Mereka memiliki hubungan

ketergantungan dengan tuan tanah yang setidaknya dapat menjamin kelangsungan hidupnya (Scott, 1976: 246) .

Kemudian ukuran yang terakhir yang digunakan dalam menganalisa indikasi eksploitasi kaum buruh adalah dengan melihat resiprositas atau ukuran yang sepadan. Dalam aspek ini, ide moral yang ada didalamnya bahwa harus ada suatu “balasan” antara tuan tanah dengan klien. Apabila pertukaran antara tuan tanah dengan klien dianggap tidak seimbang, maka menimbulkan kemarahan moral dan ketidakadilan (Scott, 1976: 247). Ketiga ukuran tersebut dapat dijadikan tolok ukur apakah kehidupan buruh tereksplorasi dan melihat dimana posisi secara sosial dan ekonomi mereka.

## **2.2 Sejarah Buruh Lepas di Perkebunan**

Sejarah kerja lepas dan ketenagakerjaan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh masa kolonialisme. Buruh lepas atau kontrak awalnya berasal dari warga lokal, namun tidak sedikit yang datang dari luar daerah. Lahan yang sangat luas memerlukan tenaga kerja yang sangat banyak. Mereka umumnya tidak mempunyai lahan untuk digarap sendiri. Kuli kontrak ini dipekerjakan dengan upah yang murah, sesuai target kerja yang ditentukan sepihak oleh perkebunan. Kekuasaan besar yang dimiliki perkebunan mengakibatkan kehidupan kuli kontrak berada dalam situasi miskin dan menderita (Nainggolan: 2012).

Kondisi buruh perkebunan pasca kemerdekaan mulai mendapat perbaikan keajahteraan. Namun, perbaikan kondisi ini bukan berasal dari pemerintah melainkan muncul dari kesadaran buruh itu sendiri. Mereka mendirikan organisasi sebagai media perjuangan. Mereka mulai berorganisasi dengan melakukan perlawanan dan juga aksi pemogokan. Hasil yang didapat pada waktu itu adalah pemerintah memberlakukan hubungan kerja adalah hubungan yang berbasis kesejahteraan kolektif. Kesejahteraan tersebut mencakup hidup yang layak dan jaminan atas pekerjaan, dan fasilitas yang memadai. (Nainggolan:2012).



### 2.2.1 Kondisi Buruh Lepas di Perkebunan

Realitas buruh lepas di perkebunan saat ini tidak jauh berbeda dengan masa kolonial. Nainggolan (2012) menyatakan pola-pola penindasan dan kontrol yang berlangsung pada masa kolonial masih berlangsung sampai saat ini. Pada masa kolonial, rekrutmen tenaga kerja dilakukan berdasarkan migrasi-politik etis, pemborongan pekerjaan (*anemer*), dan kontrak tertutup. Saat ini, istilah tersebut dikenal dengan istilah *outsourcing*. Dalam perekrutan tenaga kerja, umumnya buruh kontrak didapat melalui asisten, mandor kebun, kepala desa, maupun tokoh masyarakat. Selain itu, pihak perkebunan juga akan memberikan pengumuman ketika mereka membutuhkan tenaga kerja baru.

Selanjutnya Nainggolan (2012) menambahkan, *outsourcing* yang dilakukan perkebunan ditunjukkan dengan mengubah status buruh tetap menjadi buruh harian lepas (BHL), menambah beban kerja perusahaan ke perorangan, dan menerapkan sistem kerja acak mandiri. Perubahan status buruh tetap menjadi buruh harian lepas merupakan suatu sanksi yang diberikan karena buruh telah melakukan hal yang dianggap salah oleh pihak perkebunan. Apabila mereka tidak menerima sanksi tersebut, resiko dipecat harus mereka terima. Faktor minimnya lapangan pekerjaan dan standar kebutuhan hidup membuat mereka tidak punya pilihan lain. Buruh harian lepas mengerjakan pekerjaan yang telah ditentukan oleh pihak perkebunan. Mereka juga rawan terhadap penindasan dan eksploitasi karena tidak mendapat perlindungan, tidak mendapat THR, upah yang murah, tidak terdaftar jamsostek, dan tidak mendapat hak-hak lainnya.

### 2.3 Perkebunan di Jember

Perkebunan adalah semua kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Antara pertanian dengan perkebunan memiliki perbedaan pada komoditas yang ditanam. Tanaman yang ditanam di perkebunan bukan tanaman pokok, melainkan tanaman yang berukuran besar dan



waktu penanaman yang relatif lama. Perkebunan memiliki struktur organisasi yang tetap mulai dari pimpinan kebun, manajer, sinder, mandor besar, mandor, karyawan tetap, dan karyawan harian lepas. Struktur hubungan kerja mereka tergolong rapi, karena masing-masing memiliki jenis pekerjaan. [id.Wikipedia.org/wiki/perkebunan](https://id.wikipedia.org/wiki/perkebunan).

Jember merupakan daerah yang memiliki perkembangan yang pesat dalam sektor perkebunan. Pengambilalihan dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda tahun 1958-1959 mendorong perkembangan perekonomian Kabupaten Jember. Pada saat itu, komoditas tembakau *krosok* mengalami peningkatan. Peningkatan produksi tersebut disebabkan pihak perkebunan tembakau Belanda membuka kebebasan kepada petani untuk mengembangkan tembakau *krosok*. Hal tersebut memberikan kesempatan pada petani-petani tembakau kecil menjadi petani kaya. Sejak masa penjajahan Belanda, Jember dikenal sebagai daerah perkebunan. Jember merupakan satu-satunya daerah di Jawa yang memiliki produktifitas tanaman perkebunan yang kaya, terutama tembakau (Yuswadi, 2005: 38-45).

Kemudian, menurut Broersma (dalam Yuswadi, 2005: 48) menyatakan bahwa pada tahun 1904 dua orang pioneer bernama du Bois dan J.J van Gorsel membuka perkebunan karet di daerah Tanggul Jember dengan nama Zeelandia. Ada beberapa alasan mendirikan perkebunan karet tersebut, yaitu usaha perkebunan kopi di daerah Tanggul mengalami kegagalan karena serangan larva, harga kopi di pasar Eropa saat itu tidak menguntungkan, akibat kondisi geografis Jember yang lebih cocok untuk tanaman karet, serta penduduk daerah tersebut telah terbiasa dengan tanaman karet. Peningkatan perkebunan karet juga dipengaruhi oleh peningkatan permintaan karet dunia. Perusahaan perkebunan tersebut mengalami perkembangan pesat dan memiliki peningkatan produksi.

Daerah di Jember telah mengalami perkembangan ekonomi tidak terlepas dari sejarah kolonialisme. Perkembangan tersebut akibat peninggalan perkebunan oleh pemodal dari Belanda. Perusahaan perkebunan tersebut cenderung bersifat kapitalistik. Meskipun secara tidak langsung, perkembangan tanaman perkebunan tersebut telah memperkenalkan jenis-jenis produksi tanaman kepada petani di

daerah tersebut. Terdapat asumsi bahwa perkembangan perkebunan yang bersifat kapitalistik menimbulkan dampak negatif terhadap pertanian subsistensi. Karena perkebunan kapitalis cenderung melaksanakan penggunaan tanah dan tenaga kerja untuk kepentingan komersial ekonomi saja (Yuswadi, 2005: 50).

#### **2.4 *Hidden Transcript*: Perlawanan Sehari-hari Kaum Tertindas**

Dalam penelitian ini, mengambil konsep dari penelitian yang telah dilakukan Scott di Asia Tenggara tepatnya di Sedaka Malaysia. Scott meneliti bagaimana para petani yang lemah disana melakukan perlawanan terhadap kaum elit penguasa dengan cara halus, secara sembunyi, dan bukan dengan kekerasan. Hal ini kemudian disebut dengan istilah *hidden transcript*. Konsep ini akan digunakan untuk menganalisis kondisi sosial buruh lepas perkebunan di Jember. Ketika para buruh dihadapkan pada kondisi tertindas. Mereka melakukan perlawanan kepada kaum elit dengan perilaku-perilaku simbolis bukan dengan kekerasan dan secara terbuka.

Sebelum mendalami penelitian dan pemikiran Scott tentang perlawanan kaum tani di Sedaka, ada baiknya memahami makna perlawanan. Menurut Scott (2000: 382) perlawanan kelas memuat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kaum yang kalah yang ditujukan untuk menolak klaim yang dibuat oleh kelas atas. Perlawanan berfokus pada basis materi hubungan antar kelas, berlaku baik perlawanan individu maupun kolektif, juga bentuk perlawanan ideologi yang menantang situasi yang dominan dan menuntut berbagai standar keadilan dan kewajaran.

Perlawanan petani miskin di Sedaka tidak terjadi huru hara, demonstrasi, pembakaran, kejahatan sosial terorganisir, serta kekerasan terbuka lainnya. Perlawanan mereka berhubungan dengan gerakan politik yang lebih besar dari luar yang banyak dilakukan oleh petani. Petani hanya memerlukan sedikit koordinasi. Dengan kata lain, cara-cara yang ditempuh merupakan cara orang pedesaan biasa lakukan. Dalam aspek ini berarti bentuk perlawanan tersebut merupakan strategi sehari-hari yang terus menerus dan permanen dari kelas bawah yang selalu kalah. (Scott, 2000: 361).

Argumentasi Scott mengenai perlawanan kaum tani lebih ditekankan pada perlawanan yang jarang terlihat secara jelas atau tindakan diam-diam. Tindakan tersebut antara lain pelarian, sabotase, maupun pencurian yang berdampak kerugian besar. Perlawanan mereka lebih memiliki arti simbolis dibandingkan dengan perlawanan frontal. Tindakan tersebut dilakukan tidak lain karena posisi mereka yang tertindas dan ironi. Perlawanan dengan cara terbuka kaum tani akan lebih mirip dengan buruh pabrik yang melakukan pemogokan-pemogokan besar dan kekacauan. Kaum tani memiliki senjata sendiri dalam melakukan perlawanan, yaitu dengan perlawanan sehari-hari. Perlawanan sehari-hari menjadi pilihan ketika pemberontakan secara terbuka tidak membuahkan hasil. Para kaum tani tersebut melawan dengan gaya Brechtian seperti menghambat, berpura-pura, mencopet, memfitnah, pembakaran, sabotase dan sebagainya (Scott, 1993: 270-271).

*Hidden transcript* merupakan suatu kajian tentang makna tersembunyi atau perlawanan yang dilakukan secara sembunyi. Terbentuknya *Hidden transcript* bermula pada saat terjadi praktik-praktik dominasi dan eksploitasi. Ketika perlawanan secara terbuka tidak lagi dapat membangun kekuatan, inilah senjata yang digunakan kaum lemah, kalah, maupun tertindas untuk melawan kelas yang mendominasi. *Hidden transcript* menunjuk pada “berbicara dibelakang”, mengekspresikan perlawanan melalui objek lain, bukan pada penguasa. Hal ini dapat dilakukan dengan ucapan, tingkah laku, dan perbuatan kelompok-kelompok subordinat yang tidak ditunjukkan secara terbuka.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan referensi dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian pertama oleh Widodo Dwi Putro (2010) berjudul **Keadilan Bagi Buruh Perkebunan: Membangun Kesadaran dan Memperjuangkan Penegakan Hukum yang Adil**. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Buruh di perkebunan sering mengalami ketidakadilan dalam hak-hak normatif mereka seperti upah dan kondisi kerja yang tidak memadai. Ketidakadilan sosial juga terkait dengan kemiskinan, khususnya kurangnya pendidikan, kontak, dan pengetahuan hukum. Selain itu membatasi kapasitas para buruh untuk menerapkan aturan-aturan hukum yang berlaku. Selain itu diuraikan perjuangan kelas melalui organisasi buruh yang dibentuk dimana mereka mulai menyadari untuk menuntut hak-hak mereka.

Penelitian kedua oleh Hary Yuswadi (1999) berjudul **Komersialisasi Tanaman Jeruk-Bentuk Baru Resistensi Masyarakat Tani Terhadap Kebijakan Pembangunan Pertanian (Studi Kasus Di Desa Gunungsari Kabupaten Jember)**. Hasil penelitian menunjukkan petani jeruk di wilayah desa Gunungsari melakukan resistensi terhadap kebijakan pemerintah yang mengharuskan mereka menanam tanaman komersial seperti tebu. Kebijakan ini dirasakan kurang berpihak terhadap nasib petani. Oleh karena itu mereka melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Namun perlawanan tersebut dilakukan dengan membakar tanaman tebu secara diam-diam, mencuri tanaman, dan lain sebagainya.

**Tabel 1.**  
**Hasil Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian Ini**

Tahun	Peneliti	Judul	Temuan Penelitian
2010	Widodo Dwi Putro	Keadilan Bagi Buruh Perkebunan: Membangun Kesadaran dan Memperjuangkan Penegakan Hukum yang Adil.	Buruh di perkebunan sering mengalami ketidakadilan dalam hak-hak normatif mereka. Seperti upah dan kondisi kerja yang tidak memadai. Perjuangan secara hukum menjadi masalah utama. Selain itu diuraikan perjuangan kelas melalui organisasi buruh yang dibentuk.
1999	Hary Yuswadi	Komersialisasi Tanaman Jeruk-Bentuk Baru Resistensi Masyarakat Tani Terhadap Kebijakan Pembangunan Pertanian (Studi Kasus Di Desa Gunungsari Kabupaten Jember)	Resistensi kaum tani disebabkan oleh tekanan struktural yang dirasa kurang berpihak pada nasib petani. Akhirnya mereka melakukan perlawanan secara simbolik seperti membakar dan mencuri tanaman.



2014	Aprillia Maharani	Bentuk Eksploitasi dan Perlawanan Simbolik Buruh Lepas Pada Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP ) Sumber Wadung Kabupaten Jember	Resistensi yang dilakukan oleh buruh disebabkan oleh eksploitasi terhadap hak dan tenaga buruh. Mereka melakukan perlawanan secara simbolis dan tertutup dalam kehidupan sehari-hari.
------	-------------------	--	---

Dari tabel tersebut akan terlihat bagaimana posisi penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Terlihat suatu perbedaan dari hasil penelitian terdahulu dengan hasil yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah menguraikan bentuk eksploitasi dan perlawanan simbolik yang dilakukan buruh lepas sebagai “senjata” untuk melawan kaum elit. Paling tidak mereka memiliki cara untuk membela diri dari hubungan yang eksploitatif. Cara-cara yang digunakan tidak dengan kekerasan dan secara terbuka , namun dengan cara halus tanpa diketahui pihak lawan. Dalam hal ini, buruh membentuk panggung politik sendiri untuk melawan kaum elit.



## BAB 3 METODE PENELITIAN

### 3.1 Metode Penelitian

Menurut Soekanto (2009: 48) metode penelitian merupakan suatu cara untuk menganalisa, menguji kebenaran, dan menguji keabsahan data yang diperoleh dari lapangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana menggunakan bahan yang sukar diukur dengan angka-angka atau dengan ukuran-ukuran lain yang bersifat eksak, walaupun hal tersebut terdapat didalam masyarakat. Moleong (2007:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian kualitatif tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau kuantifikasi. Jadi penelitian kualitatif tidak menggunakan angka-angka.

Bogdan dan Taylor (dalam Sihite, 2007:95) menjelaskan bahwa metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami individu secara personal. Melalui metode ini, peneliti dapat memahami lebih mendalam apa yang dialami oleh individu dalam kehidupannya sehari-hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan mendapat penjelasan yang valid mengenai analisis bentuk eksploitasi dan perlawanan simbolik buruh lepas. Menurut Sa'ud (dalam Ghony dan Almanshur, 2012: 13-14) penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, ikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran manusia secara individu maupun kelompok. Penelitian kualitatif bersifat induktif, artinya peneliti membiarkan permasalahan-permasalahn muncul dari data untuk interpretasi.

### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Berdasarkan observasi awal di lapangan (23 November 2013), mayoritas penduduk desa Harjomulyo menggantungkan hidup dengan bekerja di PDP. Menurut seorang mandor diperoleh informasi bahwa PDP Sumber Wadung memiliki tiga *afdeling*, yaitu Sumber Wadung, Sumber Lanas, dan Pakem. Perkebunan ini memiliki areal seluas 997.020 ha dengan komoditas karet 645.700 ha, kopi 250.490 ha, dan kakao 100.830 ha dan salah satu perkebunan yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember. Dimana didaerah tersebut mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh perkebunan. Tidak sedikit tenaga kerja di perusahaan perkebunan tersebut merupakan buruh lepas. Peneliti mengamati fenomena banyak buruh tidak mendapatkan hak-hak normatif, jaminan kerja dan mengalami eksploitasi terhadap tenaga mereka. Kemudian mereka memiliki cara sendiri dalam melawan kaum elit. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian mengenai eksploitasi dan perlawanan simbolik buruh lepas di PDP Sumber Wadung.

Pemilihan tempat penelitian dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, antara lain tempat yang tidak terlalu jauh dan mudah diakses, yaitu di Kabupaten Jember. Selain itu terdapat alasan objektif yaitu, menurut Yuswadi (2005: 37-39) Jember merupakan Kota di Jawa timur yang dikenal sebagai daerah perkebunan yang potensial dalam menyumbangkan devisa. Kesuburan tanah di daerah ini menjadikan Jember sebagai daerah yang kaya dibidang pertanian seperti tanaman perkebunan dan tanaman pangan. Collin Brown dan Mackie (dalam Yuswadi, 2005: 39) menyatakan, penduduk Jember sangat individualis dan berorientasi komersial. Di Jember banyak berdiri perusahaan-perusahaan milik perorangan. Hal tersebut mengarah pada orientasi masyarakatnya adalah kapitalis dan komersial.

### 3.3 Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik penarikan sample dengan sengaja dipilih dari bagian populasi.

Menurut Moleong (2007: 224-225) teknik *purposive sampling* bertujuan untuk menyaring informasi sebanyak mungkin dari berbagai macam sumber dan bangunannya. Ciri-ciri dari *purposive sampling* adalah rancangan sampel tidak dapat ditentukan terlebih dahulu, pemilihan sampel secara berurutan dengan tujuan memperoleh variasi yang sebanyak-banyaknya dapat dicapai, apabila pemilihan sampel sebelumnya sudah dijaring dan dianalisa sehingga sampel berikutnya dipilih untuk memperluas informasi, serta apabila informasi yang didapat semakin berkembang maka sampel dapat disesuaikan dengan fokus penelitian. Dalam teknik ini juga diperhatikan kriteria informan yang benar-benar mengerti, mengetahui, serta terlibat langsung sebagai pekerja di perkebunan. Informan dalam penelitian ini adalah buruh lepas yang bekerja di PDP Sumber Wadung warga Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan salah satu komponen yang penting untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan relevan. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui data yang bersifat primer maupun sekunder. Data primer adalah data utama yang diperoleh dari hasil wawancara maupun observasi terhadap sejumlah individu yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data tambahan yang dapat mendukung suatu hasil penelitian. Data sekunder tersebut dapat diperoleh dari dokumen-dokumen yang tidak didapatkan dari wawancara.

Dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dipakai adalah sebagai berikut:

#### **3.4.1 Observasi Partisipan**

Dalam metode observasi partisipan, peneliti terlibat langsung dalam kebudayaan dan kegiatan objek penelitian. Peneliti ingin mengetahui dan membuktikan apakah benar fenomena yang diteliti tidak mengalami perubahan. Peneliti berperan serta dalam setiap kegiatan subjek yang diteliti dan merasakan bersama apa yang dirasakan subjeknya. Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung dimana peneliti melakukan

pengamatan dan berinteraksi langsung dengan informan. Observasi ini dilakukan beberapa kali dengan waktu yang tidak ditentukan (Moleong, 2007:164).

Tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut. Salah satu hal yang penting namun sering dilupakan dalam observasi adalah mengamati hal yang tidak terjadi. Observasi ini sering digunakan dalam penelitian eksploratif. Yang dimaksud observasi partisipan adalah orang yang melakukan observasi turut ambil bagian atau berada dalam keadaan objek yang di observasi. Apabila peneliti tidak ikut secara langsung, maka disebut observasi non partisipan (Narbuko dan Achmadi, 2010:72).

Selama proses penelitian tentang eksploitasi buruh lepas, peneliti ikut dalam setiap kegiatan di sebuah keluarga buruh sadapan. Kegiatan tersebut antara lain ikut ke kebun pada saat buruh sadap bekerja mengambil getah serta bercengkerama dengan keluarga di rumah. Sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana kondisi kehidupan dan lingkungan keluarga buruh baik secara ekonomi maupun sosial.

#### 3.4.2 Wawancara mendalam (in depth interview)

Teknik ini merupakan proses interaksi dan komunikasi dimana terdapat faktor-faktor yang harus dicermati agar wawancara berhasil dengan baik. Faktor-faktor tersebut antara lain pewawancara, yang diwawancarai, petunjuk interview, dan membangun hubungan baik antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, dimana memakai panduan wawancara. Di dalam wawancara, juga digunakan catatan lapangan sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data. Selain menggunakan dokumentasi, pengumpulan data dapat dilakukan dengan catatan lapangan. Dalam penelitian kualitatif sendiri, catatan sangat diperlukan agar tidak ada data yang hilang saat wawancara. Catatan lapangan menurut Moleong (2007: 216) adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dan dialami dalam rangka pengumpulan data dan terhadap refleksi data dalam penelitian kualitatif. Penulisan



catatan tersebut dapat dilakukan saat wawancara berlangsung atau setelah wawancara. Apabila dilakukan setelah wawancara, maka catatan lapangan hanya berupa kata kunci atau garis besar data. Selanjutnya, setelah selesai melakukan wawancara penjabaran hasil data secara garis besar tersebut.

Peneliti menanyakan secara detail masalah yang dibahas kepada informan. Peneliti juga mengulang pertanyaan yang sama agar mendapatkan data yang valid. Hal ini juga dimaksudkan agar data tersebut benar-benar data jenuh. Dimana sudah tidak ada lagi pertanyaan yang muncul dari jawaban informan.

#### 3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu sumber pengumpulan data yang dianggap penting dalam penelitian. Menurut Moleong (2007:216) dokumentasi merupakan pencarian bahan dan pengumpulan data melalui dokumen baik bahan tertulis maupun film. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi dapat berupa catatan, makalah, buku, jurnal, data statistik pertanian, foto-foto, dan data petunjuk lainnya yang mendukung objek penelitian. Peneliti mengumpulkan dokumentasi berupa gambar, rekaman suara, data desa, serta konsep Perjanjian Kerja Bersama dari serikat buruh. Dokumentasi tersebut dapat membantu dalam menganalisis hasil penelitian.

### 3.5 Analisa Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan di lokasi penelitian, dokumen, gambar, dan sebagainya. Langkah berikutnya, peneliti kualitatif mengadakan reduksi data dengan melakukan abstraksi. Abstraksi adalah membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Kemudian peneliti melakukan keabsahan data. (Ghony dan Almanshur, 2012: 245-246).

Menurut Moleong (dalam Ghony dan Almanshur, 2012: 246) analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis data kualitatif secara logis dan sistematis. Analisis data itu sendiri dilakukan saat



peneliti terjun ke lokasi sampai pengumpulan data. Analisis data mencakup menguji, menyeleksi, menyortir, mengkategorikan, mengevaluasi, membandingkan, menyintesis, dan merenungkan data yang telah direkam, juga meninjau kembali data.

### 3.6 Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan suatu teknik agar data yang diperoleh mencapai validitas dan reliabilitas. Data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara hasil yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Sementara data dinyatakan reliabel apabila data yang diperoleh bersifat dinamis atau selalu berubah. Hal ini dimaksudkan bahwa perilaku manusia yang terlibat dalam situasi sosial selalu berubah, demikian pula dengan data. Tidak ada data yang tetap, konsisten, maupun stabil (Sugiyono, 2013: 119-120).

Menurut Sugiyono, (2013: 121) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui beberapa uji sebagai berikut:

#### a. Kredibilitas

Uji kredibilitas studi kualitatif terletak pada keberhasilannya mencapai kepercayaan terhadap hasil data penelitian. Adapun upaya yang dilakukan peneliti untuk mencapai kredibilitas, antara lain sebagai berikut:

##### 1. Ketekunan atau Keajegan Pengamat

Keajegan pengamat berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara yang berkaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Teknik ini menuntut peneliti kualitatif mampu menguraikan secara rinci bagaimana proses penemuan secara tentatif dan penelaahan secara rinci tersebut dilakukan. Pada saat penelitian, ketekunan dan keajegan dilakukan dengan melakukan pendekatan-pendekatan dengan informan secara berangsur-angsur hingga didapatkan data sebagaimana penelitian ini. Peneliti melakukan keajegan dalam mengunjungi informan.

## 2. Member checking

Peneliti perlu mengecek kembali temuannya dengan partisipan demi keakuratan temuan data. Member checking adalah proses peneliti mengajukan pertanyaan pada satu atau lebih partisipan untuk tujuan seperti yang telah dijelaskan di atas. Aktivitas ini juga dilakukan untuk mengambil temuan kembali pada partisipan dan menanyakan pada mereka baik lisan maupun tertulis tentang keakuratan laporan penelitian. Pertanyaan dapat meliputi berbagai aspek dalam penelitian tersebut, misalnya apakah deskripsi data telah lengkap, apakah interpretasi bersifat representatif dan dilakukan tanpa kecenderungan (Lincoln dan Guba (dalam Ghony dan Almanshur, 2012: 326-328)). Peneliti selalu mengecek ulang terhadap data yang sudah didapat terhadap para informan, apakah pernyataan informan sudah sesuai. Hal ini dilakukan selama penelitian berlangsung. Hal ini juga dilakukan untuk mengkonfirmasi pernyataan dari informan yang satu dengan lainnya.

## 3. Triangulasi

Teknik ini, bertujuan untuk mendapatkan data yang valid. Menurut Patton (dalam Ghony dan Almanshur, 2012: 322), sebagai teknik pemeriksaan untuk mendapatkan keabsahan data, terdapat tiga macam triangulasi data yaitu:

### 1. Triangulasi sumber

Dalam penelitian kualitatif perlu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat, serta membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Penelitian dilakukan di rumah informan ketika sedang bersantai dengan keluarga. Penelitian ini juga dilakukan tanpa mengganggu kesibukan informan.

## 2. Triangulasi metode

Dalam hal ini dilakukan pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian, beberapa teknik pengumpulan data, dan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Untuk mengecek hasil penelitian yang terpercaya dilakukan dengan membandingkan sumber informasi yang didapat selama melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain mengumpulkan data dengan wawancara mendalam, pengamatan, dan merekam informasi dari informan.

### b. Dependabilitas

Pengujian data melalui dependabilitas dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Data yang diperoleh harus berasal dari penelitian. Apabila peneliti mendapatkan data namun bukan dari penelitian, maka perlu dipertanyakan dependabilitasnya. Audit pada data tersebut dilakukan oleh pembimbing, dimana mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Aktivitas tersebut mulai dari menentukan masalah penelitian, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, hingga membuat kesimpulan (Faisal, 1990 (dalam Sugiyono, 2013: 131). Peneliti mendapatkan seluruh data atau informasi berdasarkan penelitian yang benar-benar dilaksanakan. Data yang diperoleh bukan data fiktif melainkan didapatkan dari wawancara secara mendalam dan bertahap dengan informan.

### c. Transferabilitas

Transferabilitas merupakan suatu pertanyaan empirik yang tidak dijawab oleh peneliti itu sendiri, namun dijawab dan dinilai oleh pembaca laporan penelitian. Hasil penelitian kualitatif mempunyai standar transferabilitas yang tinggi apabila para pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas tentang konteks dan fokus penelitian. Dalam hal ini, kritik dan saran pembaca menjadi penting agar lebih sempurnanya laporan penelitian. Oleh karena itu, agar pembaca dapat memahami hasil penelitian maka laporan penelitian harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat

dipercaya (Sugiyono, 2013: 130). Dalam penelitian ini dihubungkan dengan rincian yang jelas dan sistematis sebagai uraian deskriptif tentang pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan buruh dan juga eksploitasi yang dialami. Penelitian ini dilaksanakan di sebuah perkebunan swasta sebagaimana yang didapatkan dalam kesimpulan. Aspek transferabilitas adalah apabila situasi dan kondisi daerah penelitian yang akan dibandingkan memiliki standar yang sama. Agar memiliki standar yang sama, situasi dan kondisi di desa Harjomulyo dapat berlaku secara umum di daerah lain. Dalam aspek ini, penelitian mengenai eksploitasi buruh lepas tersebut dapat diterapkan di tempat lain.

d. Konfirmabilitas

Dalam standar konfirmabilitas, difokuskan pada audit kualitas dan kepastian hasil penelitian. Data yang diperoleh harus benar-benar berasal dari lapangan. Audit konfirmabilitas pada umumnya dilakukan bersamaan dengan audit dependabilitas (Bungin, 2012: 62). Peneliti melakukan audit kualitas dan kepastian hasil penelitian melalui dokumentasi yang didapatkan pada saat melakukan penelitian. Dokumentasi tersebut berupa gambar, rekaman wawancara, maupun data sekunder. Adanya dokumen-dokumen tersebut dapat digunakan untuk menguji kebenaran dalam penelitian, bahwa hasil penelitian tentang eksploitasi buruh tersebut benar-benar didapatkan dari lapangan.



## **BAB 4. BENTUK EKSPLOITASI DAN PERLAWANAN SIMBOLIK BURUH LEPAS**

### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Jember**

Lokasi penelitian ini terletak di Kabupaten Jember Jawa timur, tepatnya di Kecamatan Silo Desa Harjomulyo. Kabupaten Jember merupakan bagian wilayah di Provinsi Jawa Timur tepatnya di Lereng pegunungan Iyang dan Gunung Argopuro setinggi 3088 m membentang kearah selatan sampai dengan Samudera Indonesia. Secara astronomis, Kabupaten Jember berada pada 113°30'00" – 113°45'00" Bujur Timur dan 7°59'60" – 8°33'56" Lintang Selatan. Wilayah ini mempunyai luas 3.293,34 Km<sup>2</sup> yang merupakan wilayah terluas ketiga di Provinsi Jawa Timur setelah Banyuwangi dan Malang dengan ketinggian 0-3330 meter diatas permukaan laut. Iklim Kabupaten Jember adalah tropis dengan suhu 23<sup>0</sup>C-32<sup>0</sup>C.

Bagian wilayah selatan merupakan dataran rendah dengan bagian terluarnya adalah Pulau Barong. Di kawasan ini terdapat Taman Nasional Meru Betiri yang berbatasan dengan wilayah administratif Kabupaten Banyuwangi. Bagian timur Kabupaten Jember adalah dataran tinggi Ijen. Selain pegunungan, kanampakan alam lainnya adalah Sungai Bedadung yang bersumber dari pegunungan Iyang di bagian tengah, Sungai Mayang yang bersumber dari pegunungan Raung di bagian timur, dan Sungai Bondoyudo yang bersumber dari pegunungan Semeru di bagian barat. Secara geografis, Kabupaten Jember berada pada wilayah yang strategis sebagai Pusat Kegiatan Wilayah. Batas wilayah administratif Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo
Sebelah Barat	: Kabupaten Lumajang
Sebelah Timur	: Kabupaten Banyuwangi
Sebelah Selatan	: Samudera Indonesia



Kabupaten Jember memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan menyimpan banyak peristiwa sejarah. Namun sejarah bagaimana kota ini terbentuk belum ada kepastian. Sementara ini untuk menentukan hari jadi Kabupaten Jember, berpedoman pada sejarah pemerintah kolonial Belanda yaitu tanggal 9 Agustus 1928. Perkembangan perekonomian di Kabupaten ini menjadi pesat sehingga timbul pusat-pusat perdagangan, terutama hasil-hasil pertanian seperti padi, palawija, dan lain-lain. Secara administratif, Kabupaten Jember dibagi dalam 31 Kecamatan dan 248 desa/kelurahan dengan rincian Kencong 65,92 Km<sup>2</sup>, Gumukmas 82,98 Km<sup>2</sup>, Puger 148,99 Km<sup>2</sup>, Wuluhan 137,18 Km<sup>2</sup>, Ambulu 104,56 Km<sup>2</sup>, Tempurejo 524,46 Km<sup>2</sup>, Silo 309,98 Km<sup>2</sup>, Mayang 63,78 Km<sup>2</sup>, Mumbulsari 95,13 Km<sup>2</sup>, Jenggawah 51,02 Km<sup>2</sup>, Ajung 56,61 Km<sup>2</sup>, Rambipuji 52,80 Km<sup>2</sup>, Balung 47,12 Km<sup>2</sup>, Umbulsari 70,52 Km<sup>2</sup>, Semboro 44,43 Km<sup>2</sup>, Jombang 54,30 Km<sup>2</sup>, Sumberbaru 166,37 Km<sup>2</sup>, Tanggul 199,99 Km<sup>2</sup>, Bangsalsari 175,28 Km<sup>2</sup>, Panti 160,71 Km<sup>2</sup>, Sukorambi 60,63 Km<sup>2</sup>, Arjasa 43,73 Km<sup>2</sup>, Pakusari 29,11 Km<sup>2</sup>, Kalisat 53,48 Km<sup>2</sup>, Ledokombo 146,92 Km<sup>2</sup>, Sumberjambe 138,24 Km<sup>2</sup>, Sukowono 44,04 Km<sup>2</sup>, Jelbuk 65,06 Km<sup>2</sup>, Kaliwates 29,94 Km<sup>2</sup>, Sumpalsari 37,05 Km<sup>2</sup>, dan Patrang 36,99 Km<sup>2</sup> (BPS Kabupaten Jember tahun 2010).



**Gambar 1. Peta Kabupaten Jember**

Jumlah penduduk Kabupaten Jember adalah 2.529.967 jiwa dengan kepadatan rata-rata 787,47 jiwa/km<sup>2</sup> dimana menjadikan Jember sebagai kota dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Surabaya. Kecamatan dengan kepadatan paling jarang adalah Kecamatan Tempurejo dengan tingkat kepadatan 135 jiwa/km<sup>2</sup> dan kecamatan terpadat penduduknya adalah Kecamatan Kaliwates dengan tingkat kepadatan mencapai 4480 jiwa/km<sup>2</sup>. Mayoritas penduduk padat bertempat tinggal di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Kaliwates, Sumbersari, dan Patrang. Hal ini disebabkan daerah tersebut banyak pengembangan areal perumahan dan dekat dengan kampus Universitas Jember sehingga banyak pendatang. Sementara kecamatan yang masih jarang penduduknya yaitu Kecamatan Tempurejo dan Silo disebabkan karena kedua wilayah tersebut sebagian besar adalah hutan dan areal perkebunan. Mayoritas penduduk di Kabupaten Jember adalah suku Jawa dan suku Madura dan sebagian besar beragama Islam, selain itu juga terdapat warga Tionghoa dan suku Osing. Rata-rata penduduk Jember adalah pendatang, dimana suku Madura mendominasi dengan bermukim di daerah utara. Sementara suku Jawa bermukim di daerah selatan dan pesisir. Akibat adanya dua suku tersebut, masyarakat Jember sudah terbiasa dengan bahasa Jawa dan Madura. Pencampuran kedua budaya tersebut disebut dengan Pendalungan yang menghasilkan seni Can Macanan Kaduk.

Dalam bidang ekonomi, sektor pertanian masih mendominasi pekerjaan masyarakat di Kabupaten Jember. Di Kabupaten Jember sendiri terdapat banyak area perkebunan yang mayoritas peninggalan Belanda. Perkebunan tersebut dikelola oleh perusahaan nasional PTP Nusantara, Tarutama Nusantara (TTN), dan perusahaan daerah (PDP). Perusahaan perkebunan tersebut tersebar di beberapa wilayah seperti di Kecamatan Arjasa, Tanggul, dan Silo. Komoditas tanaman yang terkenal adalah tembakau yang sudah terkenal sampai di Jerman, dan Belanda (Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2013).

#### 4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Silo

Kecamatan Silo merupakan salah satu dari 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Jember. Wilayah ini memiliki luas 309,98 Km<sup>2</sup> dengan ketinggian rata-rata 469 m diatas permukaan laut. Kecamatan Silo terbagi dalam 9 desa, yaitu Desa Garahan, Karangharjo, Harjomulyo, Mulyorejo, Pace, Sempolan, Sidomulyo, Silo, dan Sumberjati dengan 41 dusun. Batas wilayah Kecamatan Silo adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kecamatan Mayang dan Kecamatan Ledokombo  
 Sebelah Selatan : Kecamatan Tempurejo  
 Sebelah Barat : Kecamatan Mayang dan Kecamatan Tempurejo  
 Sebelah Timur : Kabupaten Banyuwangi

Menurut sensus penduduk pada tahun 2010, jumlah penduduk kecamatan Silo sebanyak 104.159 jiwa terdiri dari 51.349 jiwa laki-laki dan 52.810 jiwa perempuan.

**Tabel 2. Jumlah Penduduk Kecamatan Silo Per Desa**

No	Desa	L	P	Jumlah Penduduk
1.	Garahan	5.997	6.075	12.072
2.	Karangharjo	5.470	5.747	11.217
3.	Harjomulyo	4.908	5.067	9.975
4.	Mulyorejo	6.772	6.774	13.546
5.	Pace	8.254	8.701	16.955
6.	Sempolan	4.351	4.538	8.889
7.	Sidomulyo	5.069	5.063	10.132
8.	Silo	5.070	5.158	10.228
9.	Sumberjati	5.458	5.687	11.145
<b>10.</b>	<b>Jumlah</b>	<b>51.349</b>	<b>52.810</b>	<b>104.159</b>

Sumber: BPS Kabupaten Jember 2010 (Kecamatan Silo dalam angka 2010)

Jumlah penduduk terbanyak adalah desa Pace dengan total 16.955 jiwa, sementara penduduk yang paling sedikit adalah desa Sempolan dengan total 8.889 jiwa. Penduduk kecamatan Silo rata-rata bekerja di sektor pertanian. Mayoritas wilayahnya adalah lahan pertanian ladang dan sawah. Selain itu, terdapat perkebunan rakyat, milik daerah, dan Negara. Topografi kecamatan Silo yang terdiri dari perbukitan dan lereng menjadikan di Kecamatan ini banyak terdapat perkebunan. Komoditas perkebunan di Kecamatan Silo sebagian besar adalah kopi. Seperti di Desa Sidomulyo dan desa Garahan. Di desa ini banyak ditemui usaha perkebunan kopi rakyat. Selain itu terdapat perkebunan milik Negara yaitu PTPN XII yang berlokasi di Gunung Gunitir. Sementara untuk perkebunan milik pemerintah daerah berlokasi di desa Harjomulyo. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian penduduk kecamatan Silo sangat terbantu dengan adanya perkebunan-perkebunan tersebut.

#### **4.1.3 Gambaran Umum Desa Harjomulyo**

Desa Harjomulyo merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Pada awalnya, desa ini merupakan gabungan dari desa Karangharjo. Berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 81 Tahun 1990 desa Karangharjo yang meliputi Dusun Krajan, Gluguh, Darungan, Jalinan, Sumberlanas Timur, Sumberlanas Barat, Sumber Wadung, Sumber Pinang dan Perabbalan dipecah menjadi dua Desa yaitu desa Karangharjo sebagai desa induk meliputi Dusun Krajan, Sumber Pinang, Gluguh, Darungan, Perabbalan dan desa Harjomulyo sebagai desa persiapan meliputi dusun Jalinan, Sumberlanas Timur, Sumberlanas Barat, dan Sumber Wadung.

Total luas desa ini adalah 1.461,873 Ha dengan 650 Ha dataran dan 15 Ha perbukitan atau pegunungan. Desa Harjomulyo memiliki jarak ke ibukota Kecamatan terdekat 15 Km dengan waktu tempuh 0,1 jam. Secara geografis, desa Harjomulyo memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:



Sebelah Utara : Desa Karangharjo Kecamatan Silo  
 Sebelah Selatan : Desa Mulyorejo Kecamatan Silo  
 Sebelah Barat : Desa Seputih Kecamatan Mayang  
 Sebelah Timur : Desa Pace Kecamatan Silo



**Gambar 2. Peta Desa Harjomulyo**

Penduduk di desa ini sejumlah 9975, terdiri dari 4908 laki-laki, 5067 perempuan, dan 3317 kepala keluarga dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Harjomulyo**

Dusun	Jiwa		Jumlah Jiwa	Jumlah KK
	L	P		
Sumber Wadung	674	663	1.337	472
Sumber Lanas Barat	1.654	1.679	3.333	1.120
Sumber Lanas Timur	1.486	1.537	3.059	1.023
Jalinan	1.094	1.152	2.246	702
<b>Jumlah</b>	<b>4.908</b>	<b>5.067</b>	<b>9.975</b>	<b>3.317</b>

Sumber: Profil Desa Harjomulyo tahun 2010



Seperti mayoritas wilayah lain di Kabupaten Jember, Desa Harjomulyo memiliki potensi pengembangan dalam bidang pertanian dengan status kepemilikan tanah sebagai pemilik tanah sawah sebanyak 368 orang, pemilik tegalan atau ladang 895 orang, dan sebagai buruh tani sebanyak 551 orang. Selain itu di wilayah ini terdapat perkebunan yang didominasi oleh perkebunan swasta seluas 10.305 ha dan perkebunan rakyat seluas 27 ha dengan pemilik sebanyak 29 orang. Komoditas yang dihasilkan dari pertanian sawah dan ladang antara lain kacang tanah, jagung, padi, alpukat, rambutan, pepaya, dan pisang. Sementara untuk perkebunan rakyat hasil komoditasnya antara lain kelapa, kopi, dan tembakau (Profil desa tahun 2010).

Dalam aspek pendidikan penduduk desa Harjomulyo, masih didominasi oleh penduduk yang hanya lulusan Sekolah Dasar (SD). Sementara lulusan terbanyak kedua adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selain itu juga masih banyak pelajar yang putus sekolah. Pendidikan yang masih sangat rendah tersebut menyebabkan rendahnya kualitas angkatan kerja, mayoritas penduduk bekerja kasar sebagai buruh tani dan buruh perkebunan. Selain itu, penduduk di desa ini bekerja di sektor informal seperti berdagang dan usaha jasa. Kualitas sumber daya manusia di desa Harjomulyo dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4. Kualitas Angkatan Kerja penduduk Desa Harjomulyo**

No	Keterangan	Jumlah
1.	Angkatan Kerja Tidak Tamat SD/Sederajat	1.359
2.	Angkatan Kerja Tamat SD/Sederajat	1.705
3.	Angkatan Kerja tamat SMP/Sederajat	125
4.	Angkatan Kerja Tamat SMA/Sederajat	20
5.	Angkatan Kerja Tamat Diploma	8
6.	<b>Jumlah</b>	<b>3.217</b>

Sumber: Profil Desa Harjomulyo 2010

Berdasarkan tabel diatas, tingkat pendidikan angkatan kerja di desa Harjomulyo masih sangat rendah. Masih banyak angkatan kerja yang hanya tamatan SD bahkan tidak tamat SD. Rendahnya pendidikan yang ditempuh berpengaruh pada jenis pekerjaan apa yang mereka dapatkan. Mayoritas lapangan pekerjaan yang tersedia di desa Harjomulyo adalah dalam sektor pertanian. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai buruh tani yang tidak bertanah. Selain itu, mereka juga bekerja sebagai buruh di perusahaan perkebunan setempat. Selain pekerjaan tersebut, mereka bekerja di sektor informal seperti berdagang dan jasa. Pekerjaan-pekerjaan tersebut memberikan konsekuensi pendapatan yang tidak menentu dan pemenuhan kebutuhan yang belum tercukupi.

Di desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember, mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh di PDP Sumber Wadung. Rata-rata mereka menjadi buruh baik di perkebunan atau di pabrik. Pekerjaan sebagai buruh perkebunan sudah dijalani secara turun temurun. Karena mayoritas penduduk tidak berusaha mencari pekerjaan lain dan hanya menggantungkan pendapatan mereka melalui bekerja di PDP Sumber Wadung. Penduduk yang tinggal mayoritas adalah suku Madura, bahkan tidak pernah dijumpai adanya suku Jawa. Pada awalnya mereka adalah pendatang yang kemudian menetap di wilayah tersebut (observasi, 2013).

#### **4.1.4 Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Sumber Wadung**

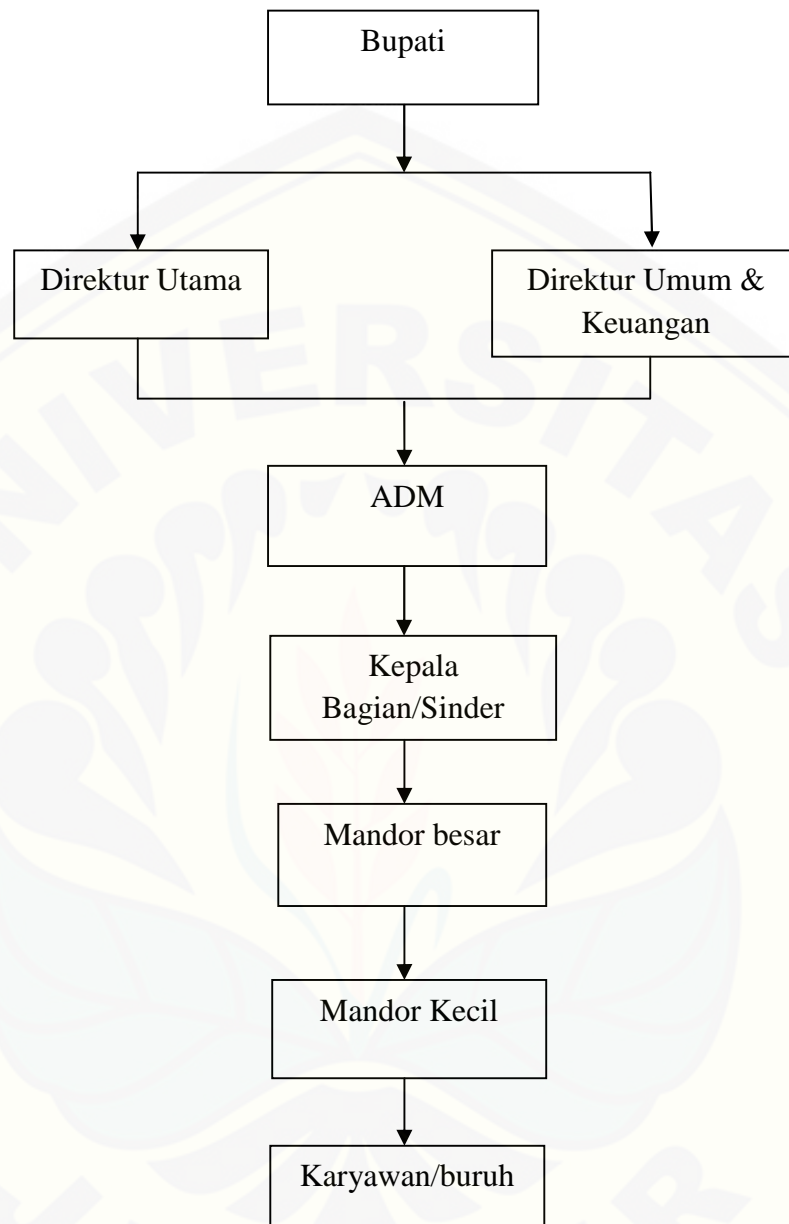
Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) merupakan salah satu perusahaan yang dikelola oleh pemerintah daerah atau Kabupaten dengan saham terbesar dimiliki oleh Bupati. Pemerintah daerah sendiri memiliki dua aset perusahaan, yaitu PDP dan PDAM. Perusahaan perkebunan tersebut dimiliki pemerintah Kabupaten Jember sejak tahun 1969 dan merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Perusahaan ini merupakan kebijakan nasionalisasi sendiri telah diberlakukan di Indonesia mulai November 1958 melalui UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda di Indonesia. Namun ketentuan itu tidak langsung berlaku secara serempak di beberapa daerah, dan masih memerlukan beberapa instrumen hukum turunan seperti Penetapan Presiden No. 6

tahun 1964 tentang pengambilalihan perusahaan asing oleh Negara (Linblad, 2002 (dalam Dwi Putro 2008:7).

Menurut Wibowo (dalam Dwi Putro 2008:7) Perkebunan Sumberwadung sendiri, yang merupakan salah satu dari enam perkebunan yang dikelola di bawah Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kabupaten Jember benar-benar dinasionalisasi pada 13 Agustus 1968 melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Agraria No. 44/HGU/1968. Berdasarkan data yang diambil dari situs [pdpjember.blogspot.com/p/pengumuman.html?m=1](http://pdpjember.blogspot.com/p/pengumuman.html?m=1) Kabupaten Jember memiliki enam PDP yang tersebar di beberapa wilayah, antara lain Kali mrawan, Sumber Wadung, Gunung Pasang/Kali Kelepuh, Sumber Pandan, Sumber Trenggulun, dan Ketajek dengan rincian luas areal sebagai berikut: Sumber Wadung di Kecamatan Silo 1.026,7075 Ha, Kalimrawan di Kecamatan Silo 385,2630 Ha, Kali Kelepuh/Gunung Pasang di Kecamatan Panti 1.069,5714 Ha, Ketajek di Kecamatan Panti 477,8700 Ha, Sumberpandan di Kecamatan Sumberbaru 709,7400 Ha, dan Sumbertrenggulun di Kecamatan Tanggul 138,9500 Ha, total areal perkebunan adalah 4.278,2239 Ha. Komoditas utama di perkebunan ini adalah kopi dan karet. Selain kedua komoditas tersebut terdapat tanaman kakao namun saat ini diganti dengan sengon.

Struktur organisasi perusahaan perkebunan sendiri tidak jauh berbeda ketika perusahaan ini masih dipegang oleh Pemerintah kolonial Belanda. Pada puncak pimpinan terdapat jajaran direksi yang dipimpin seorang direktur utama, berkedudukan di kota atau luar areal perkebunan. Di tiap lokasi perkebunan ada pengelola setingkat administrator yang mengepalai satu lokasi perkebunan. Lokasi perkebunan secara fungsional dibagi menjadi beberapa bagian yang dikepalai seorang sinder (“pengawas”) yang bertanggung jawab kepada administrator. *Sinder* (dari kata Belanda, *opzinder*, yang berarti penilik atau pengawas) dan administrator awalnya dipahami sebagai pengawas, namun dalam perkembangannya menjadi raja kecil di perkebunan. Mandor dapat dikatakan sebagai orang kepercayaan perusahaan terhadap operasionalisasi kerja. Mandor bukan hanya mengurus persoalan teknis produksi tanaman, melainkan juga menjadi aparat langsung yang menghubungkan kepentingan pihak perusahaan

dengan buruh terutama dalam pengawasan dan pengendalian para buruh. Mandorlah yang mengontrol para buruh dengan mengabsen buruh setiap pagi dan mengawasi pekerjaan buruh (Dwi Putro, 2008:7-8). Pada Perusahaan Perkebunan Daerah Sumber Wadung di Kabupaten Jember, struktur organisasi paling atas ditempati oleh Bupati. Hal ini dikarenakan perusahaan perkebunan dikelola oleh pemerintah daerah, sehingga Bupati memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola seluruh urusan yang menyangkut perusahaan perkebunan. Di bawah posisi Bupati ditempati oleh direktur utama dan direktur umum/keuangan. Keduanya berada pada posisi yang sejajar namun memiliki tugas yang berbeda. Direktur utama memiliki tugas mengatur masalah kebijakan yang menyangkut karyawan, sementara direktur umum/keuangan mengatur masalah produksi perusahaan. Dibawah posisi direktur merupakan petugas pelaksana perusahaan perkebunan mulai dari Adm, kepala bagian/sinder, mandor besar, mandor kecil dan karyawan/buruh.

**Bagan 1. Struktur Organisasi PDP Sumber Wadung Kabupaten Jember**

Sumber: Data Primer 2014



Dwi Putro, (2008:5) menambahkan mekanisme pengelolaan keuangan di perusahaan ini dibagi menjadi dua mengingat PDP tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam Perda No 1 tahun 1969 pasal 20, bagi hasil antara PDP dengan Pemerintah Kabupaten adalah 55% untuk pemerintah Kabupaten sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 45% untuk PDP. Bagi hasil yang diperoleh PDP sendiri masih terdapat rincian sebagai berikut:

1. 20% untuk simpanan jaminan umum di bank, simpanan jaminan umum sendiri hanya bisa dipakai jika ada rekomendasi dari Bupati;
2. 10% untuk jasa produksi karyawan;
3. 10% untuk dana keamanan, pendidikan, dan sosial;
4. dan 5% untuk dana pensiun bagi pegawai.

#### **4.2 Deskripsi Buruh di Perkebunan**

Dibalik pohon karet yang tinggi menjulang, lebatnya pohon kopi, dan melimpahnya hasil produksi, masih banyak ditemukan buruh-buruh yang hidup dalam kemiskinan. Keberadaan perusahaan perkebunan seharusnya menjadi suatu jalan untuk kemakmuran dan kesejahteraan penduduk. Namun yang terjadi justru terlihat pemandangan proletarisasi dan marginalisasi kaum buruh. Hal inilah yang terjadi di salah satu perusahaan perkebunan di Kabupaten Jember, tepatnya di desa Harjomulyo Kecamatan Silo.

Di Kabupaten Jember, terdapat banyak area pertanian dan perkebunan. Di daerah ini memiliki hasil kekayaan alam yang melimpah baik tanaman palawija dan komersial. Jember merupakan satu-satunya daerah di Jawa timur yang memiliki produktifitas tanaman perkebunan yang kaya, terutama tembakau. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya area pertanian dan berdiri banyaknya perusahaan perkebunan, baik perkebunan milik Negara maupun daerah. Mayoritas hasil perkebunan tersebut memiliki skala besar karena untuk kepentingan komersial. Tidak heran apabila perkebunan khususnya yang ada di Kabupaten Jember cenderung bersifat kapitalistik.

Yuswadi, (2005: 50) menyatakan bahwa daerah di Jember telah mengalami perkembangan ekonomi tidak terlepas dari sejarah kolonialisme.

Perkembangan tersebut akibat peninggalan perkebunan oleh pemodal dari Belanda. Perusahaan perkebunan tersebut cenderung bersifat kapitalistik. Meskipun secara tidak langsung, perkembangan tanaman perkebunan tersebut telah memperkenalkan jenis-jenis produksi tanaman kepada petani di daerah tersebut. Terdapat asumsi bahwa perkembangan perkebunan yang bersifat kapitalistik menimbulkan dampak negatif terhadap pertanian subsistensi. Karena perkebunan kapitalis cenderung melaksanakan penggunaan tanah dan tenaga kerja untuk kepentingan komersial ekonomi saja.

Masyarakat perkebunan memiliki perbedaan yang spesifik dibandingkan dengan masyarakat pertanian pada umumnya. Pekerjaan mereka sudah diatur dalam suatu sistem yang dijalankan oleh perusahaan. Para pekerja dapat tinggal di rumah-rumah dinas yang disediakan oleh perkebunan. Meskipun beberapa buruh ada yang menempati rumah sendiri di perkampungan penduduk. Mereka yang menempati rumah dinas tersebut adalah buruh tetap maupun lepas. Bahkan ada juga buruh yang dipinjami lahan untuk membangun rumah sendiri tanpa membayar sewa. Tidak ada batasan sampai kapan mereka diperbolehkan tinggal diatas tanah perusahaan perkebunan, namun pengambilalihan lahan dapat sewaktu-waktu terjadi.

Tenaga kerja di perkebunan pada umumnya adalah penduduk sekitar yang memiliki keterbatasan dalam pemilikan alat-alat produksi. Keterbatasan tersebut pada akhirnya membuat mereka menggantungkan pendapatan mereka dengan bekerja di perkebunan. Pendidikan terakhir yang pernah ditempuh oleh buruh di perusahaan perkebunan rata-rata merupakan Sekolah Dasar, sedangkan untuk lulusan SMP dan SMA masih sangat minoritas. Seluruh alat-alat produksi dikuasai oleh perusahaan, para pekerja tersebut hanya mengolah hasil alam dari kebun yang kemudian mendapat upah.

#### 4.2.1 Sistem Upah Di Perkebunan

Upah merupakan persoalan pokok yang dimiliki oleh buruh. Karena pemberian upah dapat menentukan kemakmuran dan kesejahteraan mereka. Di PDP Sumber wadung, menjalankan beberapa sistem upah dalam kategori-kategori tertentu. Sistem upah yang diterapkan oleh PDP Sumber wadung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5. Sistem Pengupahan PDP**

Lokasi Kerja dan Jenis Pekerjaan	Status Pekerja	Sistem Upah	Besarnya Upah	Jam Kerja
Pengolahan Getah Karet Di Pabrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buruh Tetap</li> <li>Buruh Lepas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Harian</li> <li>Harian</li> </ul>	Rp. 42.600,00 (standart UMK)	Pukul 07.00-13.30
Pengolahan Getah Karet Di Pabrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buruh Tetap</li> <li>Buruh Lepas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lembur</li> <li>Lembur</li> </ul>	Jam Pertama: Rp.3000,00, jam berikutnya Rp. 500,00	Pukul 13.30-17.30
Buruh Sadap Karet di Kebun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buruh Tetap</li> <li>Buruh Lepas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Borongan</li> <li>Borongan</li> </ul>	Rp.6.800 00/kilo kering	Pukul 02.00-08.00
Buruh musiman Kopi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buruh Lepas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Harian Musiman</li> </ul>	Rp.25.000 ,00	Pukul 06.00-12.00

Sumber data: Data Primer 2014

Berdasarkan tabel, dapat dilihat sistem yang diterapkan terdapat empat jenis, yaitu upah harian, lembur apabila buruh melakukan tambahan pekerjaan di luar waktu kerja normal, borongan dan harian untuk pekerja musiman. Dalam upah harian, besarnya upah sudah ditentukan berdasarkan UMK Kabupaten. Untuk Kabupaten Jember sendiri, besarnya UMK adalah Rp.42.600, 00 per hari. Namun pemberian upah diberikan kepada buruh setiap 15 hari sekali. Hal ini

kemudian diakumulasi dari pekerjaan yang telah dikerjakan selama 15 hari tersebut. Jadi setiap satu bulan buruh menerima dua kali upah. Seperti kutipan wawancara dengan Mas Wahyu berikut ini:

“pemberian upah itu ada masa 1 selama 15 hari, masa 2 juga 15 hari (satu bulan dua kali). Semuanya itu kan sudah diatur oleh perusahaan Mbak, karyawan tinggal ikut aja.” (wawancara tanggal 2 Juni 2014).

Seluruh buruh di perusahaan perkebunan Sumber Wadung mendapatkan upah setiap lima belas hari sekali sesuai dengan pekerjaan dan sistem upah. Misalnya untuk buruh sadapan, diupah dengan sistem borongan atau buruh di pabrik yang sistem harian.

Sistem upah untuk jenis harian, dihitung per harinya sesuai dengan ketentuan besarnya upah misalnya sesuai UMK. Besarnya upah harian ini selalu tetap, dan memiliki jam kerja yang tetap. Mayoritas sistem ini diterapkan pada buruh yang ada di pabrik. Dalam sehari upah yang diterima sebesar Rp. 42.600,00 dengan 7 jam kerja. Seperti kutipan wawancara dengan Ibu Yanti berikut ini:

“.....Tapi kalo di pabrik meskipun lepas bayarannya itu sama kayak orang tetap. Karna 7 jam kerja, orang tetap 7 jam kerja, orang lepas 7 jam kerja.... Kalo hari Minggu cuma, ndak digaji kalo orang lepas, tapi kalo bayarannya itu sama lemburnya sama. Cuma hari Minggu itu hari libur. Bayarannya 42.600.” (wawancara tanggal 14 Juni 2014 pukul 10.42 WIB).

Sistem upah harian memang cenderung diterapkan di bagian pabrik karena waktu kerja yang selalu tetap yaitu tujuh jam kerja. Waktu kerja dimulai dari pukul 06.30 pagi sampai 13.30 siang. Baik buruh tetap maupun lepas memiliki jam kerja dan upah yang sama, karena pola dan waktu kerja yang sama. Jadi untuk buruh yang bekerja di pabrik, pemberian upah ditetapkan sesuai dengan UMK. Setiap bulannya upah tetap yang diterima buruh di pabrik sesuai UMK sebesar Rp. 1.270.000,00. Kemudian upah tersebut dapat ditambah jika para pekerja menerima lembur. Upah lembur dihitung berdasarkan lama waktu untuk mengolah hasil dari kebun. Jika waktu normal bekerja adalah sampai pukul 13.30, maka selebihnya termasuk dalam lembur. Untuk tambahan jam pertama diupah sebesar Rp.3000,00 untuk jam selanjutnya ada kenaikan sebesar Rp.500,00. Sebagai buruh yang



pernah bekerja di pabrik, Bapak Sugeng mengetahui sistem upah disana. Seperti pernyataan berikut ini:

“jam pertama biasanya 3000, jam kedua 3500, yang ketiga paling 4000 gitu. Tinggal ngalikan itu nanti, kan 5 jam ya setengah dua, setengah tiga, setengah empat, setengah lima, setengah enam, 4 jam. Jam 6 sudah selesai, 4 jam setengah. 4 jam itu ditambahkan harian kan sama UMK itu yang pagi yang 42.600”. (wawancara tanggal 21 Juni 2014 pukul 10.30 WIB).

Kemudian sistem upah yang ketiga adalah borongan. Dalam sistem ini mayoritas diterapkan di lapangan seperti di sadapan karet. Upah borongan merupakan sistem upah yang disesuaikan dengan besarnya hasil produksi yang dihasilkan oleh buruh. Jadi, apabila getah karet yang didapatkan banyak, maka upah yang diterima juga akan banyak. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yanti berikut ini:

“ngitungnya borongan itu misalnya di sadapan ya, misalnya saya orang tetap ya, ya ambil hasilnya itu misalnya hasilnya 30 liter dikalikan kilo kering 6.800 kalo suami saya. Misalnya 30 tiap hari, ya itu bayarannya. (30 kg dijadikan kering menjadi 8 kg) 8 kg kali 6.800 ya itu sudah, selama 15 hari. Coba kalikan berapa. Tapi kan kerjanya cepat. Jam setengah 6 sudah disini. kalo suami saya, satu bulan ya hampir satu juta, lebih kadang seribu enam ratusan ini kalo suami saya.” (wawancara tanggal 14 Juni 2014 pukul 10.42 WIB).

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Ibu Wartini bahwa upah buruh sadapan disesuaikan dengan banyaknya getah karet. Rata-rata pendapatan suami Ibu Wartini per hari hanya RP. 20.000,00. Saat musim kemarau, getah karet yang didapat memang sedikit. Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Wartini :

“kalo sadapan itu kan tergantung getahnya, kalo getahnya banyak ya gajian lumayan. Kalo sudah musim kemarau kayak gini kan getahnya sedikit kadang ndak nyampe harian. 20 ribu (per hari). Kalo musim sekarang ya Alhamdulillah. (wawancara tanggal 14 Juni 2010 pukul 12.00 WIB).

Setiap buruh sadapan mendapat bagian 350 pohon karet yang harus disadap setiap hari. Pohon karet sejumlah itu disayat satu per satu kemudian dibawahnya dipasang mangkok. Beberapa buruh mengerjakan sendiri dalam menyadap pohon karet, ada juga yang dibantu anggota keluarganya agar cepat selesai. Menyadap pohon karet bukanlah pekerjaan yang mudah, karena pekerja harus berangkat dini hari dan sebelum mendapatkan getah para pekerja menunggu hingga getah



menetes sampai selesai. Beberapa buruh yang jauh dari rumahnya memilih menunggu dan beristirahat di kebun. Selain waktu bekerja pada dini hari, hasil getah yang didapatkan tergantung pada kondisi pohon karet. Buruh yang mendapat karet yang masih remaja tentu memiliki produktifitas yang tinggi, sementara buruh yang mendapatkan pohon karet yang sudah tua, tentu mendapatkan getah yang lebih sedikit. Seperti pernyataan Ibu Yanti berikut ini:

“kalo yang sebenarnya 350 pohon per orang. Tapi itu cepat, cepat selesai itu. Kalo yang lain kadang-kadang ndak pulang, nunggu di kebun. Kalo saya 2 jam. Kalo sendiri itu ndak pulang tetap di kebun, nunggu nyampe setengah 8 itu. Kadang jam 1 pagi baru selesai jam 6. Kan karetinya itu ndak sama, macam-macam. Ada karet remaja, karet tua, kalo saya karet remaja. Lebih cepat terkumpul banyak. Kalo karet tua pohonnya rusak semua, dapatnya lebih sedikit” (wawancara tanggal 14 Juni 2014 pukul 10.42 WIB).

Sistem upah borongan merupakan penetapan dari perusahaan. Menurut beberapa informan, menyatakan bahwa sistem upah borongan memang sengaja diterapkan karena untuk memenuhi target produksi perusahaan. Seperti kutipan wawancara berikut ini:

“kalau tidak borongan anu, apa ya, tidak nuntut mungkin, tapi menurut perusahaan, kalo menurut undang-undang kan harus dibayar menurut UMK kan. iya, targetnya perusahaan. Takutnya pemimpin-pemimpinnya itu takut ndak dapat bagian mungkin. Kalo menurut undang-undang kan tidak ada borongan kan, harus sesuai UMK. Menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia ini. Borongan ini Cuma peraturan perusahaan sendiri, bukan pemerintah. Kalo pemerintah harus dibayar UMK kan, ini Cuma buat sendiri peraturan” (wawancara dengan Bapak Sugeng tanggal 16 November 2014 pukul 08.30 WIB).

Bapak Sugeng menambahkan, sistem borongan tersebut semakin menekan pendapatan buruh sadapan. Hal ini disebabkan upah yang diterima disesuaikan dengan banyaknya getah yang diperoleh bukan dari standart UMK. Upah buruh sadapan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan sistem upah lainnya. Selain itu, adanya target yang harus dicapai juga menekan buruh. Penghasilan yang diperoleh PDP akan masuk dalam Penghasilan Asli Daerah (PAD), besarnya pun telah ditarget oleh pemerintah. Sementara produktifitas tanaman sudah menurun.

Pada akhirnya buruh sadapan yang semakin tertekan. Seperti kutipan wawancara dengan Mas Wahyu berikut ini:

“.....kita itu ditarget sebenarnya bukan berapa persennya gitu, jadi untuk tahun 2014 PDP harus setor ke PAD sebesar 9 M, dalam satu tahun. Yang jelas kita disitu kelabakan, masalahnya dilihat dari komunitas tanaman, itu semuanya sudah hampir bongkor. Sudah hampir mati semua. Jadi produksi sudah pasti menurun. Kalo target ditekan seperti itu habis kita. Sekarang aja ini sudah diprediksi tahun 2015 PDP *collapse*. Tenaga sadap disini itu mayoritas, pekerja paling dominan, tulang punggung perusahaan ya itu sudah. Tenaga sadap itu kan produksi permanen, produksi rutin yang tiap hari berproduksi tapi kalo seperti kopi itu kan tahunan” (wawancara tanggal 21 Juni 2014 pukul 10.30 WIB).

Sistem upah yang terakhir adalah upah harian untuk buruh musiman. Biasanya upah ini untuk buruh yang bekerja di kebun kopi. Pekerjaan di kebun kopi antara lain panen kopi, *njombret* (membersihkan lahan dari gulma), mencangkul lahan, memupuk dan *mepel* (memotong dahan kopi). Mereka yang bekerja di kebun kopi tersebut termasuk ke dalam buruh musiman. Buruh musiman adalah mereka yang memiliki status buruh lepas dan mendapat pekerjaan musiman sesuai dengan kebutuhan kebun. Seperti dalam kutipan wawancara berikut:

“kalo harian di kebun tergantung musim Mbak, jadi kalo musim penghujan itu banyak yang *ndongkel*, *njombret*, tergantung kebutuhan, untuk kopi untuk karet itu semua bisa dilakukan. Kalo karet itu biasanya kalo disini itu trill, itu semacam obat untuk meningkatkan daya produksi. Jadi dioleskan pada bekas luka bekas goresan sadap nanti getahnya itu tambah banyak. Setelah itu di TB, jadi yang luka itu langsung diolesi kayak aspal item, itu nanti tumbuh kulit baru. Kalo kopi itu biasanya *njombret*, membersihkan bawahnya kopi, itu biasanya.” (wawancara tanggal 21 Juni pukul 12.30 WIB).

Buruh musiman tersebut diupah sebesar Rp. 25.000,00 per hari dengan bekerja mulai pukul 06.00 pagi sampai 12.00 siang. Buruh musiman ini juga hanya bekerja pada musim kopi saja. Hal ini berarti mereka bekerja ketika musim kopi tiba. Seperti kutipan wawancara dengan Ibu Yanti berikut ini:

“panen kopi, *njombret* (bersih-bersih di kebun), sekarang kan musim kopi, bersihin lahan. Kalo di kebun, di lapangan itu setiap harinya ndak sama kerjanya, ada yang bersihin, ada yang nyangkul, ada yang *mepel*. Kalo pangkasan misalnya jam sekian pulang sudah. Kalo *njombret* jam 12

pulang. Kalo *njombretan* itu borongan. Bayarannya sama 25 ribu per hari tapi mulai jam setengah 6 sampai jam 12 pulang. Kalo ada musim kerja itu ambil, kalo tidak ada libur sudah, namanya musiman”. (wawancara tanggal 14 Juni 2014 pukul 10.42 WIB).

Buruh musiman direkrut sesuai dengan kebutuhan perusahaan. tidak setiap hari buruh musiman dapat bekerja di perkebunan. karena pekerjaan buruh musiman tidak tersedia setiap hari. Mayoritas buruh musiman dibutuhkan pada saat musim kopi tiba. Perusahaan akan membuka lowongan untuk pekerja musiman.

Dari tabel dan penjelasan diatas juga dapat dilihat dimana letak diskriminasi pemberian upah. Pada umumnya, buruh lepas sadapan lah yang memiliki perbedaan upah yang tajam. Upah yang mereka terima tidak sesuai karena sistem yang diterapkan adalah borongan. Padahal buruh sadapan lah yang setiap hari memproduksi dan bekerja keras. Namun masih terjadi ketimpangan terhadap pemberian upah kepada buruh sadapan.

#### 4.2.2 Spesialisasi Pekerjaan Di Perkebunan

Selain terdapat sistem upah, di perkebunan juga terdapat pembagian kerja pada buruh. Pembagian kerja mengarah pada jenis pekerjaan tertentu yang harus dikerjakan oleh buruh sesuai dengan tempat mereka masing-masing. Pembagian kerja di perkebunan juga sudah jelas karena diatur oleh perusahaan. Pada Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Sumber Wadung, secara garis besar membagi tempat bekerja menjadi dua. Tempat bekerja tersebut yaitu di pabrik dan di lapangan. Jenis pekerjaan pada kedua tempat tersebut memiliki perbedaan. Pekerjaan di pabrik lebih banyak pada mengolah hasil dari kebun sehingga menjadi komoditas yang siap dijual ke pasar. Sementara di lapangan pada umumnya mengambil hasil dari tanaman yang masih mentah.

Pekerjaan di pabrik antara lain pengolahan kopi, pengolahan karet, dan sortir. Bagian pengolahan kopi pada umumnya dikerjakan oleh perempuan, karena perempuan dianggap lebih telaten memilah kopi dibandingkan laki-laki. Sementara pada pengolahan karet mayoritas dikerjakan oleh laki-laki, meskipun terdapat pekerja perempuan. Pekerjaan di lapangan antara lain menyadap karet, membersihkan lahan, memanen kopi, mencangkul lahan dan memupuk.

Perbedaan pekerjaan di lapangan dan di pabrik terjadi pada sistem kerja yang akhirnya menentukan berapa upah yang harus mereka terima. Pekerjaan yang setiap hari berproduksi adalah menyadap karet dan pengolahan karet di pabrik. Karet merupakan aset utama perusahaan karena setiap hari dapat dipanen. Sementara untuk komoditas kopi, merupakan komoditas yang sifatnya tahunan. Selain itu, karet juga menjadi pendapatan utama perusahaan dan menyumbang input terbesar perusahaan.

Pada masing-masing tempat, baik di pabrik maupun di lapangan terdapat buruh tetap maupun buruh lepas. Tidak ada perbedaan khusus dalam penempatan buruh. Status buruh tidak memiliki pengaruh yang kuat untuk menentukan pekerjaan apa yang dikerjakan. Misalnya antara buruh tetap dengan lepas, pekerjaan mereka sama. Di pabrik tetap terdapat buruh tetap dan buruh lepas. Begitu juga pekerja yang bekerja di lapangan, terdapat status sebagai buruh tetap dan buruh lepas.

#### 4.2.3 Proses Rekrutmen Pekerja

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa para pekerja di perkebunan umumnya adalah penduduk sekitar. Mereka bekerja di perkebunan atas inisiatif sendiri karena hanya menjadi buruh lah lapangan pekerjaan yang mudah dan dekat dengan rumah mereka. Saat perkebunan masih dikuasai oleh Belanda, perusahaan perkebunan lah yang mencari sendiri tenaga kerja, namun sekarang pekerja lah yang meminta pekerjaan kepada perusahaan perkebunan. Dalam proses rekrutmen pekerja sendiri, terdapat tiga jalur, yakni secara individu, kolektif, dan atas rekomendasi mandor.

Pada jalur individual, pekerja mengajukan lamaran sendiri ke kantor atau direksi. Pekerja membawa persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan seperti identitas dan SKKB (Surat Keterangan Kelakuan Baik). Kemudian mereka tinggal menunggu panggilan dari perusahaan. Seperti kutipan wawancara dengan Bapak Sugeng berikut ini:

“kalo dulu di cari, kebun yang nyari. Masih jaman Belanda dulu. Kalo sekarang yang kerja kan yang mau cari. Karna sudah padat. ya saya langsung nglamar disini langsung ke perusahaan, tahun 1992. Nanti



langsung ngomong. Kalo mau jadi mandor atau sinder juga bisa, bawa surat-surat, KTP, SKKB. Langsung Direksi. Ya nanti kalo ada rejeki ada panggilan langsung” (wawancara tanggal 22 November 2014 pukul 10.00 WIB).

Selain secara individu, calon pekerja dapat mengajukan lamaran pekerjaan secara kolektif. Setelah mereka memenuhi semua persyaratan, mereka secara bersama-sama mendaftar ke perusahaan maupun langsung ke direksi. Meskipun mereka mendaftar secara kolektif, tidak memiliki pengaruh terhadap panggilan pekerjaan. Karena tetap menunggu keputusan perusahaan. Selain itu, terdapat kemungkinan semua dapat diterima. Seperti kutipan wawancara berikut ini:

“iya ada, 5 orang, 6 orang, ada. Buat lamaran dulu. Kalo ya bersamaan lamarannya dipanggil bersamaan itu. Tapi nanti kerjanya di kebun yang beda, kebun mana, kebun mana gitu. Yang menentukan direksi, langsung ada di surat itu sudah. Kalo bersamaan itu kan enak punya teman yang banyak. Kalo sendirian, masuk sendiri ke direksi. Sama mandor saya kalo masuk direksi. Kalo daftar barengan ya 5 orang itu ke direksi bareng. Ya diproses tapi panggilannya itu belum tentu. iya, mungkin tiga orang, atau bisa kebagian semua”. (wawancara tanggal 22 November 2014 pukul 10.00 WIB).

Selain kedua jalur rekrutmen pekerja tersebut, rekrutmen pekerja dapat dilakukan melalui rekomendasi dari mandor. Misalnya seorang mandor memiliki saudara atau teman yang ingin mencari pekerjaan di kebun, maka mandor tersebut mengajukan permintaan ke sinder dan Adm. Setelah mendapat persetujuan, maka calon pekerja tersebut dapat bekerja di perusahaan. Seperti kutipan wawancara berikut ini:

“Kalo cari kerja bisa juga lewat mandor. Minta ke mandornya nanti langsung ke sinder. Sinder langsung ke Adm, kalo ada ya langsung dipanggil”. (wawancara tanggal 22 November 2014 pukul 10.00 WIB).

Namun, dalam rekrutmen pekerja terjadi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Bagi mereka yang memiliki uang dan saudara yang menjadi pegawai perusahaan seperti mandor maupun sinder, maka mereka akan cepat diangkat bekerja di kebun. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan financial dan akses maka akan sulit untuk dapat bekerja di kebun. Seperti pengalaman Bapak Sutipyo berikut ini:



“tahun 85 saya. Saya itu suruh ngelamar ya, lulusan SMP, saya buat surat lamaran dibawa ke kantor sini. Saya tunggu sampai 3 bulan ndak ada apa-apa. Ternyata orang yang baru masuk 3 bulan diangkat. Ada apa itu, selidiki. Ternyata kalo punya uang bisa, o sistem sogok. yang nawarin ngelamar ya, Adm nya sendiri. Tapi sekarang sudah pensiun. Kalo lulusan SMP katanya suruh ngelamar gitu, ngelamar saya. Sampai Adm nya pensiun ndak ada apa-apanya sekarang”. (wawancara tanggal 22 November 2014 pukul 10.00 WIB).

Proses rekrutmen pekerja semacam ini memberikan konsekuensi rendahnya kesempatan bagi mereka yang memiliki keterbatasan financial dan jaringan. Pada akhirnya calon pekerja sangat sulit untuk dapat bekerja di kebun. Sistem rekrutmen buruh seperti ini dilakukan oleh pekerja pelaksana seperti mandor dan sinder. Mereka menjadi oknum praktik ini dalam proses rekrutmen buruh. Hal ini kemudian menyebabkan rentannya praktik suap dalam perusahaan.

#### 4.2.4 Serikat Buruh

Sebagai suatu wadah yang bergerak dalam memperjuangkan nasib buruh, terbentuk suatu serikat pekerja. Serikat buruh tersebut berdiri berkat dukungan dari sebuah LSM bernama Sketsa. LSM ini membuka keadaran para buruh untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang tidak diperhatikan oleh perusahaan. Serikat buruh yang didirikan antara lain Serbuk (Serikat Buruh Untuk Kemakmuran), FKPAK (Forum Komunikasi Pekerja Antar Kebun), dan Serbumusi (Serikat Buruh Miskin). Namun pada saat ini serikat yang masih aktif hanya FKPAK dengan Ketua umumnya adalah Bapak Mulyono. Sementara serikat buruh yang lain sudah tidak aktif, seperti pernyataan Mas Wahyu berikut ini:

“Pak Mulyono, ketua serikat di FKPAK. Jadi terkait serikat yang kemaren itu, ini kan ada beberapa serikat yang masih belum diverivikasi. Jadi serikat yang sudah sah itu serikat saya. Kalo serikat-serikat yang lama itu sudah dianggap anu apa namanya, *log out* sudah. Seperti itu, cuman karna ini sudah mendekati pembahasan PKB jadi kemaren saya sarankan kepada temen-temen yang serikatnya berbeda dengan saya untuk segera diverivikasi ke disnaker nanti masalahnya kita akan menentukan nasib buruh seluruh kebun PDP.” (wawancara dengan Mas Wahyu tanggal 21 Juni 2014 pukul 10.30 WIB).

Sumber wadung, gunung pasang, sumber pandan merupakan kebun induk. Di dalam satu serikat buruh atau kebun induk, terdapat beberapa basis. Tiap-tiap basis terdapat sektor. Sektor itu nantinya dibagi menjadi beberapa afdelling. Misalnya di kebun Sumber Wadung terdapat afdelling Pakem, afdelling pabrik, afdelling Lanas, afdeling itulah yang merupakan sektor-sektornya. Pak Mulyono sendiri ketua basisnya. Sementara Mas Wahyu berada dibagian humas. Mas Wahyu sendiri sempat tergabung dalam anggota Serbuk, namun merasa serikat tersebut sudah tidak mampu memperjuangkan nasib buruh. Baik Serbuk maupun serikat yang lain, memiliki kesamaan posisi dan fungsi hanya memiliki perbedaan PUK. PUK merupakan Pengurus Unit Kerja ADART.

Serikat buruh di Sumber Wadung terbentuk karena masuknya sebuah LSM yang bernama Sketsa yang diketuai oleh Gogot cahyo ke lingkungan buruh. Serbuk merupakan serikat pertama yang didirikan oleh Sketsa. Serbuk sendiri diwarnai banyak kepentingan-kepentingan dari oknum. Oknum-oknum tersebut berasal dari dalam perusahaan. Sementara, kepentingan-kepentingan mereka menyebabkan bubarnya serikat buruh. Serbuk misalnya, serikat ini bubar karena dipenuhi dengan kepentingan perusahaan agar perusahaan tetap memiliki posisi aman. Seperti kutipan wawancara berikut ini:

“Sebenarnya kalo serikatnya bagus Mbak, cuma oknumnya, ada beberapa oknum dari Serbuk itu yang nggak bertanggung jawab. Jadi istilahnya dia masuk dalam organisasi, dia ada kepentingan. Bukan semata-mata dia itu berjuang untuk buruh. Bukan untuk kemakmuran, kan Serbuk itu kepanjangan Serikat Buruh untuk Kemakmuran, dan yang mempelopori itu Sketsa.” (wawancara dengan Mas Wahyu tanggal 21 Juni 2014 pukul 10.30 WIB).

Kepentingan-kepentingan dari individu maupun kelompok menjadi penghalang besar perjuangan buruh untuk menuntut haknya. Praktik-praktik seperti suap masih mewarnai upaya buruh untuk memperjuangkan nasibnya. Seperti kutipan wawancara berikut:

“itu gini biasanya jika ada persoalan kita selesaikan di internal itu nggak ada titik temu, kita berangkat ke direksi. Nyampe kantor direksi, kita sudah negosiasi. Nah disana kita juga tidak menemukan titik temu, akhirnya ketuanya dipanggil, wis sampean nggak usah gini gini dikasih uang, selesai sudah. Jadi ketuanya sudah ada kesepakatan seperti ini

seperti ini jadi yang disampaikan itu enak tapi ternyata dibalik itu ada konspirasi, akhirnya buyar. Terus di internal sendiri ketuanya itu banyak kepentingan, jadi bukan semata-mata untuk perjuangan buruh. Kalo saya pribadi Mbak, sampai kapanpun untuk buruh, bahkan segala iming-iming sudah saya rasakan, tapi saya tolak. Karena apa, itu akan merugikan temen-temen buruh sendiri.” (wawancara dengan Mas Wahyu tanggal 21 Juni 2014 pukul 10.30 WIB).

Bapak Anto juga memberikan pernyataan yang sama, bahwa bubarnya serikat buruh disebabkan oleh praktik kotor yang dimainkan perusahaan. Pihak-pihak yang ingin memperjuangkan hak-hak buruh justru disuap dengan sejumlah uang agar berhenti memperjuangkan buruh. Seperti kutipan wawancara berikut ini:

“Makanya saya kalo ada temen-temen yang kayak dari Jember, Surabaya itu saya tanya visi dan misinya apa, takutnya terjadi ya karena buruh sudah berapa kali *diplekotho* dengan orang-orang ya maaf lho ya kayak macem-macamnya sampean. Dulu kan ada dari Wadas, wadah solidaritas apa gitu dari Malang. Tapi saya dengar kok setelah mendatangi direksi ya jujur saya ngomong menyampaikan ya nggak *tedheng aling-aling* diamplopi terus ndak ada apa-apa sudah. Kan mengorek keterangan dari buruh, data kan. Seolah-olah dia itu menjual data ke direksi, ini lho Pak pengajuan karyawan. Direksi kan merasa takut, salah kan wong direksi kuasa uang Mbak. Ditutup mulutnya pake uang ini lho yang saya takuti.” (wawancara tanggal 14 Juni 2014 pukul 12.30 WIB).

Bapak Anto menyatakan keinginannya membentuk sendiri serikat tanpa ada campur tangan dari pihak luar. Karena apabila ada campur tangan dari pihak luar hanya akan menghambat perjuangan buruh. Perjuangan buruh terhambat karena kepentingan-kepentingan beberapa pihak, salah satunya adalah pihak internal buruh sendiri. Hal ini disebabkan ada beberapa dari pihak buruh yang ingin mencari kepentingan sendiri tanpa memikirkan buruh yang lain. Pada akhirnya ia menjadi kaki tangan di direksi perusahaan. Selain melawan para kelas atas, buruh juga dihadapkan dengan masalah internal di dalam serikat. Inilah tantangan buruh dalam memperjuangkan nasibnya.

Para buruh yang merasa dalam satu perahu yang sama kemudian membentuk sendiri suatu serikat baru tanpa kehadiran orang luar. Karena mereka tidak ingin kejadian organisasi Serbuk terulang dan justru menimbulkan kasus baru. Seperti kutipan wawancara berikut ini:

“Jadi intinya kemaren itu setelah kita ngobrol-ngobrol dengan beberapa buruh yang ada di seluruh PDP itu kalo bisa membentuk suatu organisasi yang dipromotori orang buruh sendiri. Jadi jangan dikendalikan oleh orang luar. Masalahnya kenapa, ya itu nanti kejadiannya seperti tahun kemaren. Kita menuntut hak normatif kita nggak ada titik temu ketuanya dipanggil, begitu dipanggil dikasih uang. Kita yang betul-betul murni berjuang dibawah akhirnya jadi korban. Seakan-akan kita dijadikan jembatan. Akhirnya saya keluar dari Serbuk, karna sudah nggak sesuai”. (wawancara dengan Mas Wahyu tanggal 21 Juni 2014 pukul 10.30 WIB).

Keberadaan serikat buruh sendiri menjadi kekuatan buruh secara politis untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Sebelum adanya serikat buruh tersebut, para buruh sering dibohongi karena tidak ada transparansi dan sikap represif dari perusahaan perkebunan. Berkat adanya serikat buruh, praktik-praktik penindasan buruh dapat diminimalisir. Apabila tidak ada serikat yang dapat memperjuangkan nasib buruh, maka perusahaan akan cenderung bertindak sewenang-wenang terhadap buruh. Berikut pernyataan dari Mas Wahyu:

“kalo dulu-dulunya ya kita cuma *sendiko dhawuh* Mbak. Suruh ke selatan ya ke selatan, suruh ke barat ya ke barat. Jadi mulai adanya organisasi, disitu kita mulai belajar untuk berpikir dewasa bagi buruh sendiri, jadi disana kita tanamkan kita harus bisa mengadvokasi diri sendiri. Jadi kalo ada istilahnya itu diskriminasi, intimidasi, kita harus bisa membela diri kita sendiri. Kalo nggak ada organisasi, buruh tertindas. Ndak tau.” (wawancara dengan Mas Wahyu tanggal 21 Juni 2014 pukul 10.30 WIB).

Serikat buruh dapat membantu dalam memperjuangkan nasib buruh. Karena apabila tidak ada serikat, maka perusahaan akan menjalankan peraturan sendiri. Sedangkan peraturan perusahaan tersebut sudah pasti akan menekan dan merugikan buruh, misalnya dalam pemberian THR. Buruh lepas hanya mendapat THR sebesar Rp. 150.000,00 dan itu dalam bentuk pinjaman. Sehingga pinjaman ini dibayarkan kembali oleh buruh. Padahal seharusnya THR diberikan penuh kepada buruh.

Serikat buruh menjadi suatu wadah untuk perlawanan kolektif secara terbuka. Demonstrasi merupakan aksi para buruh untuk menyampaikan aspirasi mereka tentang ketidakseimbangan distribusi produksi yang mereka terima. Namun perjuangan buruh berhenti karena masih banyak tantangan dan masalah yang kompleks. Sehingga mereka masih belum menikmati hak-haknya sebagai



buruh. Oleh karena itu para buruh masih memerlukan perlindungan dari berbagai pihak.

#### **4.3 Life History Buruh Lepas Perkebunan di PDP Sumber Wadung**

Informan merupakan faktor penting dalam sebuah penelitian. Melalui wawancara mendalam dengan informan, akan diperoleh data primer yang diperlukan peneliti. Selain mendapatkan data primer, juga penting untuk mengetahui karakteristik setiap informan. Karakteristik informan memiliki peran untuk mengetahui kondisi dan latar belakang informan. Hal ini menjadi penting sebagai data tambahan dalam menganalisis data primer yang didapat dari wawancara mendalam tersebut.

Dalam penelitian ini pembahasan lebih difokuskan pada bentuk-bentuk eksploitasi khususnya yang dialami oleh buruh lepas di sektor perkebunan. Oleh karena itu, informan pokok dalam penelitian ini adalah buruh lepas yang bekerja di perkebunan. Wawancara mendalam dengan informan bertujuan untuk memperkuat fakta-fakta di lapangan yang akan dianalisis menggunakan teori. Selain itu, sebagai tambahan informasi, diperlukan adanya data sekunder dari lembaga setempat. Mengingat dalam penelitian ini menggunakan teknik *snow ball* dalam menentukan sampel penelitian, maka tidak dibatasi banyaknya informan untuk memperkaya data yang dianalisis. Dari hasil wawancara dengan informan, diperoleh sepuluh informan. Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Ibu Yanti

Ibu Isaniati atau yang akrab dipanggil Ibu Yanti (37 tahun) adalah salah satu buruh perempuan yang tidak diupah. Ia bekerja di kebun hanya untuk membantu suaminya, Bapak Sugeng sebagai buruh sadap karet. Setiap harinya ia ikut suaminya untuk menyadap karet dari pukul 02.00 dini hari sampai dengan pukul 09.30 pagi. Selama kurang lebih 20 tahun pekerjaan ini dijalani oleh Ibu Yanti. Baik Ibu Yanti maupun suaminya tidak mempunyai keinginan untuk meminta status pekerjaan untuk Ibu Yanti. Kurangnya lowongan kerja menjadi salah satu alasan mengapa mereka tidak meminta pekerjaan secara resmi ke perusahaan. Ibu Yanti hanya membantu suaminya agar pekerjaan di kebun menjadi lebih ringan



dan cepat selesai. Ibu Yanti memiliki tugas untuk membantu mengumpulkan getah dan mencuci mangkok tempat getah. Mengenyam pendidikan yang hanya tamatan SMP membuat Ibu Yanti tidak mempunyai ketrampilan lain. Selain itu, kondisi lapangan pekerjaan di tempat tinggalnya yang seadanya juga membuat Ibu Yanti tidak bisa berbuat banyak.

b. Ibu Wartini

Sama halnya dengan Ibu Yanti, Ibu Wartini (40 tahun) juga salah satu buruh yang tidak mendapatkan upah. Ia tidak memiliki nama atau absensi tetap dalam daftar tenaga kerja, suaminya lah yang memiliki absensi tersebut. Pekerjaan yang dikerjakan Ibu Winarti kurang lebih juga sama seperti yang dikerjakan Ibu Yanti. Namun tidak setiap hari ia membantu suaminya, kadang hanya dalam dua hari sekali. Kadang hanya berkunjung ke kebun tempat suaminya bekerja. Minimnya lowongan pekerjaan di kebun juga menjadi alasan mengapa Ibu Wartini tidak meminta absensi di kebun. Meskipun hanya membantu suaminya, baik Ibu Yanti dan Ibu Wartini merasakan beban berat saat bekerja. Kondisi cuaca di lapangan dan belum lagi ada binatang buas seperti macan dan ular besar. Selain itu mayoritas buruh tidak mendapatkan perhatian dari pihak perusahaan. Perusahaan hanya mementingkan hasil kerja para buruh. Sebagai seorang tamatan Sekolah Dasar (SD), tidak mempunyai banyak ketrampilan. Kegiatan Ibu Winarti masih banyak disibukkan dengan urusan domestik. Sebagai tenaga kerja tanpa upah, keluarga Ibu Wartini hanya mengandalkan pendapatan suaminya. Pendapatan suaminya itupun belum mampu mencukupi kebutuhan keluarga, apalagi Ibu Wartini masih mempunyai anak yang bersekolah ditingkat Sekolah Dasar.

c. Ibu Inul

Ibu Inul (40 tahun) merupakan buruh lepas di sadapan karet yang sudah bekerja hampir 20 tahun. Beliau merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah karena suaminya tidak mampu lagi bekerja. Hal itu disebabkan karena suaminya menderita penyakit stroke selama 5 tahun terakhir. Awalnya suami Ibu Inul bekerja sebagai keamanan di kantor. Namun karena sakit, akhirnya suaminya keluar dari bekerja di perusahaan. Saat ini untuk mencukupi kebutuhan

keluarga, Ibu Inul harus bekerja menyadap karet dan menggarap sawah yang merupakan lahan sewaan. Rendahnya pendidikan yang ditempuh menyebabkan Ibu Inul bekerja kasar dengan pendapatan yang tidak menentu. Ibu Inul tidak pernah menyentuh pendidikan formal. Beliau hanya masuk di pondok yang ada di dusun Karang tengah selama satu tahun. Ilmu yang didapat hanya sebatas ilmu agama saja. Bahkan Ibu Inul tidak bisa membaca dan menulis. Pendidikan rendah tersebut menyebabkan Ibu Inul dapat dengan mudah dipermainkan oleh perkebunan. Ibu Inul mengaku pernah disuruh tanda tangan oleh pihak kebun tanpa tahu apa isi surat tersebut. Ibu Inul hanya berniat bekerja dan mendapatkan upah agar kebutuhan keluarganya tercukupi. Beliau tidak memiliki kesadaran mengenai hak-haknya sebagai buruh. Selain itu, Ibu Inul juga tidak berani menuntut hak-haknya yang terabaikan. Hal inilah yang semakin membuat kehidupan buruh semakin miskin. Aktifitas Ibu Inul dimulai dari pukul dua dini hari untuk berangkat ke kebun. Ibu Inul bekerja sendiri tanpa ada anggota keluarga lain yang membantu. Dengan berjalan kaki dengan membawa peralatan sendiri, Ibu Inul mencari pendapatan untuk keluarganya. Biasanya Ibu Inul akan membawa bekal makanan sendiri dari rumah. Tempat para buruh termasuk Ibu Inul adalah di sekitar pohon karet tanpa ada tempat berlindung.

d. Bapak Sugeng

Bapak Sugeng (38 tahun) atau biasa dipanggil Pak Yanti merupakan salah satu buruh sadap yang berstatus sebagai buruh *skill*. Buruh *skill* sendiri merupakan status buruh yang hampir menjadi buruh tetap. Selama kurang lebih 21 tahun, Bapak Sugeng telah mengabdikan diri bekerja di PDP Sumber Wadung. Pada awalnya beliau bekerja selama 10 tahun sebagai buruh lepas di pabrik. Kemudian atas instruksi pihak perusahaan, Bapak Sugeng dipindahkan ke lapangan dengan menjadi buruh sadap. Hal ini menyebabkan kesempatan menjadi buruh tetap semakin jauh. Pekerjaan di lapangan sebagai buruh sadap sudah ia jalani selama 11 tahun, dan belum juga ada kenaikan status menjadi buruh tetap. Padahal menurut peraturan perundang-undangan, pengangkatan karyawan adalah selama tiga bulan masa kerja. Namun pada kenyataannya selama lebih dari 20 tahun banyak buruh yang belum diangkat. Bapak Sugeng sering ikut dalam menuntut

hak-hak buruh kepada perusahaan. Tuntutan yang sering dilakukan adalah mengenai pemenuhan hak-hak normatif buruh seperti upah yang layak, THR, serta pengangkatan menjadi buruh tetap. Bapak Sugeng mengaku perusahaan sering melakukan penyelewengan terhadap hak-hak buruh, apalagi terhadap buruh lepas. Perusahaan juga tidak memperhatikan pelaksanaan K3 kepada pekerja. Bapak Sugeng dan juga buruh yang lain membeli sendiri peralatan kerja seperti sepatu dan pisau sadap. Perusahaan hanya menyediakan mangkok dan ember untuk tempat menampung getah. Selain itu ketika peralatan rusak, buruh sendiri yang memperbaiki atau mengganti. Biaya untuk mengganti pisau misalnya, Bapak Sugeng menghabiskan Rp. 15.000,00. Pendidikan terakhir Bapak Sugeng adalah tamatan SMP. Sama seperti tenaga kerja lainnya, ia hanya dapat bekerja dengan pekerjaan yang tidak membutuhkan ketrampilan khusus. Bapak Sugeng dan Ibu Yanti tinggal di sebuah rumah yang berdiri diatas tanah milik perusahaan perkebunan. Perusahaan meminjamkan tanah kepada Bapak Sugeng dan keluarganya. Mengingat tanah tersebut hanya pinjaman, maka sewaktu-waktu tanah tersebut dapat diambil alih oleh perusahaan. Sementara keluarga Bapak Sugeng tidak memiliki rumah yang tetap.

e. Bapak Anto

Bapak Anto (60 tahun) dulunya bekerja sebagai buruh lepas di perkebunan. Bahkan sampai pensiun Bapak Anto masih menjadi buruh lepas. Bapak Anto merupakan salah satu orang yang terus memperjuangkan hak-hak kaum buruh. Meskipun sering mendapat tekanan dan intimidasi dari beberapa pihak, beliau tidak menyerah. Beliau sendiri bukan penduduk asli desa Harjomulyo, melainkan pendatang dari Sulawesi. Saat ini, istri Bapak Anto lah yang bekerja di sadapan karet dan masih berstatus sebagai buruh lepas. Bapak Anto juga menyatakan bahwa kondisi buruh di PDP Sumber wadung sangat memprihatinkan. Mereka membutuhkan perlindungan secara hukum agar dapat hidup dengan layak.

f. Mas Wahyu

Mas Wahyu (38 tahun) merupakan keponakan dari Bapak Anto. Beliau juga sebagai buruh lepas yang bekerja di pabrik dengan pendidikan terakhir SMA.

Selain itu beliau juga ikut bergerak dalam memperjuangkan hak-hak buruh. Mas Wahyu merupakan wakil ketua organisasi buruh FKPAK di Sumber wadung. Dengan berbekal keberanian, Mas Wahyu dan buruh lainnya menuntut segala hal yang berkaitan dengan penyelewengan perusahaan perkebunan. Mas Wahyu juga sering menjadi koordinator untuk melakukan aksi demo di kantor direksi. Selain masalah tidak terpenuhinya hak-hak normatif buruh, aksi demo juga dilakukan apabila perusahaan melakukan penyelewengan dan kebocoran produksi dan keuangan.

g. Bapak Saha

Bapak Saha (45 tahun) tinggal di dusun Jalinan desa Harjomulyo, merupakan karyawan lepas di sadapan yang telah bekerja selama 22 tahun. Beliau merupakan tulang punggung keluarga yang mencari pendapatan untuk menafkahi keluarganya. Pendidikan terakhir Bapak Saha adalah Sekolah Dasar dan tidak dapat membaca dan menulis, dimana tentu saja tidak banyak keahlian yang dimiliki. Pendapatan yang diperoleh dari menyadap di kebun dirasa masih sangat sedikit, untuk itu Bapak Saha mencari usaha sampingan dengan menjual beberapa hasil bumi seperti petai, alpukat dan lainnya. Bapak Saha juga menuturkan bahwa saat ini, perusahaan perkebunan sudah sangat menyalahi aturan. Perusahaan tidak lagi memperhatikan nasib buruh, terutama buruh lepas. Sama seperti buruh lepas lainnya, Bapak Saha juga mengeluhkan masalah upah yang jauh dari layak dan sulitnya pengangkatan menjadi buruh tetap. Selain itu Bapak Saha juga menerima ketidakadilan dalam pemenuhan hak-hak normatifnya.

h. Bapak Mulyono

Bapak Edy Mulyono atau lebih akrab dipanggil Bapak Mulyono (40 tahun) merupakan buruh *skill* di pabrik pengolahan karet yang tinggal di dusun Jalinan desa Karangharjo. Beliau mulai bekerja di pabrik pengolahan karet PDP Sumber wadung pada tahun 2006, sampai sekarang. Bapak Mulyono bekerja dibagian proses pencampuran bahan asam semut dan penggilingan getah karet. Sebelumnya beliau pernah menjadi buruh sadapan di lapangan. Beliau merupakan ketua organisasi buruh FKPAK di Sumber Wadung. Bapak Mulyono ikut berjuang untuk memperbaiki nasib buruh perkebunan. Dengan bekal pendidikan terakhir



SMA, beliau hanya ingin hak-hak normatif buruh di PDP Sumber wadung terpenuhi. Banyak pengalaman yang kurang enak dialami Bapak Mulyono selama menjadi buruh di PDP. Seperti ketidakadilan, manipulasi dalam pemberian upah. Sebagai ketua organisasi buruh setempat, Bapak Mulyono akan tetap memperjuangkan nasib teman-temannya.

i. Bapak Jauhari

Bapak Jauhari (40 tahun) merupakan teman kerja Bapak Mulyono di pabrik pengolahan karet yang masih berstatus sebagai buruh lepas. Bapak Jauhari hanya sempat menyelesaikan pendidikan sampai SLTP. Beliau juga menjadi anggota organisasi buruh FKPAK. Bapak Jauhari bekerja di pabrik pengolahan getah karet di bagian pengeringan karet. Jadi tempat bekerja beliau adalah tahap terakhir dalam proses pengolahan getah karet. Dari pos terakhir inilah karet siap dijual di pasaran. Sebagai buruh lepas Bapak Jauhari tentu saja memiliki masalah yang sama dengan buruh lepas yang lain. Buruh yang ada di pengolahan karet pun juga tidak terlepas dari masalah pemenuhan hak-hak normatif.

j. Bapak Sutipyo

Bapak Sutipyo atau lebih akrab dipanggil Pak Ucik (45 tahun) merupakan buruh lepas di sadapan. Selama 25 tahun Pak Ucik sudah bekerja menjadi buruh lepas di perkebunan. Sampai saat ini belum juga ada pengangkatan menjadi buruh tetap. Pak Ucik hanya sempat mengenyam pendidikan sampai jenjang SMP. Dulu, pihak Adm perkebunan yang menawarkan Pak Ucik untuk melamar pekerjaan di perkebunan. namun sampai sekarang tidak banyak perubahan terjadi, justru dengan pergantian pegawai kantor, nasib buruh semakin tertindas. Pak Ucik juga ikut menjadi anggota Serikat FKPAK karena merasa seperjuangan dengan buruh lain yang tertindas.



## 4.4 Eksploitasi Terhadap Buruh

### 4.4.1 Kondisi Buruh Lepas Sebagai Ukuran Eksploitasi

Indikasi adanya eksploitasi pada individu ataupun kelompok dapat dilihat melalui ukuran-ukuran. Ukuran-ukuran tersebut tidak hanya berdasarkan material saja, namun lebih kepada prinsip moral. Sistem yang menipu dan memaksa pekerja merupakan basis dari prinsip moral tersebut. Tingkat eksploitasi itu sendiri kemudian dikaitkan dengan suatu tata hubungan yang adil antara kaum elit dengan kaum lemah. Sehingga diperlukan ukuran seperti taraf hidup, alternatif terbaik berikutnya dan resiprositas atau pertukaran yang sepadan. Ketiga ukuran inilah yang dapat kita lihat untuk menentukan seberapa tinggi tingkat eksploitasi yang dialami oleh buruh lepas di perkebunan.

Salah satu aspek yang menjadi ukuran kesejahteraan buruh adalah upah. Sampai saat ini kondisi buruh lepas memang masih jauh dari layak. Pendapatan dari bekerja di perkebunan masih belum mencukupi kebutuhan sehari-hari dimana harga kebutuhan semakin naik. Sementara pendapatan mereka semakin rendah. Upah merupakan hal yang paling mendasar yang dibutuhkan buruh. Namun banyak penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kepada buruh, seperti upah yang rendah dan pemotongan upah yang masuk ke kantong mandor. Perusahaan perkebunan hanya memberikan janji kepada buruh ketika mereka menuntut hak. Namun pada akhirnya perusahaan tidak menepati janji tersebut. Buruh hanya dibohongi oleh perusahaan demi kepentingan keuntungan perusahaan.

Perusahaan cenderung tidak memperhatikan kepentingan buruh. Meskipun terdapat ketentuan yang mengatur antara buruh dan perusahaan, tetap saja merugikan buruh. Dulu buruh sempat tidak menikmati UMK karena perusahaan tidak mematuhi peraturan yang ada. Seperti dalam kutipan wawancara dengan Bapak Anto, anggota serikat buruh berikut:

“Jadi selama ini PDP ndak pernah mengacu pada undang-undang nomor 13 tahun 2003, ndak pernah dipatuhi jadi seenaknya. Dulu disini nggak pernah menikmati UMK Mbak, direksi itu membayar seenaknya kepada karyawan. Ada PKB nya, tapi itu mencekik karyawan.” (wawancara tanggal 14 Juni 2014 pukul 12.30 WIB).

Upah yang diberikan perusahaan kepada buruh masih jauh dari layak. Pemberian upah yang rendah cenderung kepada buruh lepas, terutama buruh sadapan. Misalnya saja upah untuk buruh sadapan, masih sangat minim untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat. Buruh di sadapan menjadi kurang beruntung karena upah yang diterima berdasarkan sistem borongan. Dimana upah yang diterima ditentukan oleh banyaknya getah karet yang diperoleh. Buruh yang mendapatkan getah yang banyak tentu akan mendapatkan upah yang banyak, begitu juga sebaliknya. Pernyataan ini sesuai yang diungkapkan oleh Mas Wahyu berikut ini”

“kalo seperti Bu Yanti itu kan suaminya tenaga sadap disana dia itu kan borongan, jadi dalam satu hari, dia itu nderes getah itu dapatnya berapa ya itu nanti yang diperoleh. Jadi nanti ada pembagian tugas sendiri, suaminya itu nanti nderes, trus nanti mungkin Bu Yanti yang nyuci mangkoknya atau seperti apalah secara teknisnya begitu. Yang jelas kalo borongan berapapun orangnya, upahnya tetap. Tergantung dari hasil kerja. Kalo hasilnya sedikit ya upahnya sedikit, meskipun yang kerja 10 orang kalo hasilnya sedikit ya upahnya sedikit.” (wawancara tanggal 21 Juni pukul 12.30 WIB).

Bapak Saha juga menyatakan hal yang sama mengenai upah buruh sadapan. Sistem upah borongan menyebabkan pendapatan buruh sadapan menjadi tidak menentu. Terlebih sekarang ini getah yang didapat sangat sedikit. Rata-rata pendapatan Bapak Saha hanya Rp. 50.000,00 per hari. Banyaknya getah karet ditentukan oleh produktifitas tanaman dan musim. Seperti dalam kutipan wawancara berikut:

“iya soalnya itu kan sistim borong ya, tergantung lateknya, dapat berapa itu ya tergantung lateknya kalo dapat 30 paling tidak kilo keringnya paling ndak 15 kilo itu ya. Keringnya, kilo keringnya, kalo dapat 30, 35 itu keringnya 15. Kalo harga lima ribu, lima ribu kali 15 itu, kan ndak sama ya Dek ya, karetanya itu nggak sama harganya, umpama A sama B itu kan ndak sama ya, blok mana. kalo disini katanya, harganya 6 ribu, kalo pake karet yang sudah tua itu 6 ribu, kalo punya saya kan masih remaja, itu 5 ribu, tapi kadang kalo bayaran ndak sampai 5 ribu, 5 ribu kali 10 kan, berapa 50 ya, ya itu kadang. Kalo sekarang masih belum hujan ya, paling banyak kalo sekarang 25 mentahnya. kalo 25 anggap saja 10 kilo kering, 10 itu berarti kan 50, kadang ndak nyampe, dulu yang nyampe itu kalo Minggu, kan dulu ada Minggu, kalo sekarang dihapus, kalo Minggu itu kadang saya punya 25 liter itu ya bisa lebih dari 50, bisa 60 kalo Minggu”. (wawancara tanggal 16 September 2014 pukul 11.30 WIB).

Bapak Saha menambahkan, setiap buruh sadapan memiliki hasil getah yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan tergantung dari produktifitas tanaman dan keahlian buruh itu sendiri. Pada umumnya pohon karet yang masih remaja dapat menghasilkan getah yang lebih banyak dibandingkan pohon karet yang sudah tua. Kemudian keahlian buruh sadapan juga menjadi faktor penting dalam hasil getah. Buruh yang sudah ahli dalam menyadap getah karet akan menghasilkan getah yang lebih banyak daripada buruh yang tidak berpengalaman. Seperti pernyataan Bapak Saha dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Nyadapnya itu terlalu dalam, juga bisa mati, itu kan kulitnya thok ya Dik, kalo yang ndak tahu penting kena kulit selesai, akhirnya mati. tergantung orangnya Dek. Makanya saya kan cerita, kalo orangnya ndak karuan kerjanya penting selesai, ndak tau rusak apa tidak, kadang itu yang diangkat akhirnya mati. Karyawan yang rawat sendiri. Saya memang orang loss Dek, tapi saya berani. Satu pohon punya saya itu ndak ada yang kena kayu, kalo yang tetap itu ndak ada sudah tinggal kayunya tok. Kan nanti getahnya berkurang, umpamanya dapat 5 liter paling tinggal 2 liter. Kan latek dari kulit, bukan dari kayu. Kalo saya hati-hati biar banyak dapat lateknya“.(wawancara tanggal 16 September 2014 pukul 11.30 WIB).

Meskipun banyak buruh lepas yang terampil, namun upah mereka tetap lebih sedikit dibandingkan dengan buruh tetap. Hal ini dirasa tidak adil oleh buruh lepas seperti Bapak Saha karena seharusnya karyawan yang terampil mendapatkan upah yang lebih banyak. Buruh lepas di sadapan memang mengalami diskriminasi upah karena pemberian upah kepada mereka menggunakan sistem borongan, bukan berdasarkan UMK. Sehingga menyebabkan pendapatan mereka tidak menentu. Seperti pernyataan Bapak Sutyto berikut ini:

“katanya UMK nya itu 1.270.00 tapi belum nyampek ke karyawan itu. Ndak terpenuhi, paling besar itu 300. setengah bulan, 15 hari. Kalo satu bulan kan jadi 500, 600, kan ndak nyampek separuhnya UMK kan. Kan sudah salah kan itu kan”. (wawancara tanggal 22 November 2014 pukul 10.00 WIB).

Pemberian upah tersebut memang sudah ketentuan dari perusahaan. Padahal kemauan dari buruh sadapan pemberian upah harus sesuai dengan UMK. Ketidakadilan pemberian upah tersebut dirasakan buruh sadapan dimana kerja keras mereka tidak sebanding dengan upah yang diterima. Padahal buruh sadapan

karet merupakan pekerja utama dalam produksi karet dan penyumbang terbesar produktifitas perusahaan perkebunan.

Bagi buruh lepas terutama di sadapan, upah yang diterima juga dirasa masih belum dapat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tuntutan biaya hidup yang semakin tinggi, mendesak para buruh sadapan untuk bekerja lebih keras. Seperti pernyataan Bapak Sugeng berikut:

“ya dibilang cukup ya cukup, dibilang nggak cukup ya nggak cukup. (tertawa).” (wawancara tanggal 14 September pukul 10.00 WIB).

Menurunnya kesejahteraan hidup buruh dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan hidup mereka. seperti kutipan wawancara dengan Bapak Mulyono berikut ini:

“orang semuanya sekarang ini mahal semua. Apalagi punya anak sekolah. Kayak ini tiga-tiganya, ya ndak cukup Dik.” (wawancara tanggal: 21 September 2014).

Sebagai sesama buruh sadapan, Bapak Saha juga mengeluhkan upah yang diterima masih jauh dari yang diharapkan. Untuk mencukupi kebutuhan dasar saja, Bapak Saha harus mencari tambahan penghasilan agar kebutuhan keluarganya tercukupi. Seperti pernyataan dalam kutipan wawancara berikut:

“Kalo sudah dari kebun cari buah itu sampingan saya. Ya kalo ndak punya sampingan, tidur Dik. Sekarang punya anak sekolah, ndak nuntut Dik, coba hitung dalam setengah bulan dapat 300, biaya anak berapa, untuk makan berapa, kan ndak cukup. Pengeluaran yang lain-lain kan banyak, itu ndak cukup Dik. iya pokoknya sering ngeluh sekarang ini Dik. Sama teman-teman itu kumpul-kumpul di kebun, itu kan ada yang ndak pulang ya, itu cerita. Ini cuma berangkat malam gajinya kecil, gitu ceritanya Dik.” (wawancara tanggal 16 September 2014 pukul 11.30 WIB).

Upah yang sedikit juga dirasakan oleh Ibu inul. Sebagai tulang punggung keluarga, karena suaminya sakit dan tidak mampu bekerja, upah yang diterima belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ibu Inul sendiri mencari tambahan penghasilan dengan memelihara sapi milik orang lain dan mengolah sawah dari sewa. Seperti dalam wawancara berikut ini:

“tadi cuma sedikit Dik. Kalo sekarang karetnya itu ndak anu apa ya, nyemi. Ngopos lagi itu. 22 liter. sedikit Dik. Kalo setengah bulan itu saya dapat 300. Terkadang ndak dapat 300. ya kalo sekarang nggak Dik, kan getahnya itu ndak kayak dulu.” (wawancara tanggal 5 Juli 2014 pukul 10.00 WIB).



Selain upah yang rendah, buruh perkebunan juga sering mengalami pemotongan hasil produksi tanpa sepengetahuan buruh itu sendiri. Upah yang seharusnya mereka terima justru masuk ke dalam kantong mandor. Hasil produksi buruh dengan mudah dimanipulasi oleh atasan mereka. Para mandor sering melakukan pemotongan tersebut agar mereka mendapatkan keuntungan. setiap mandor juga memiliki target yang ingin mereka capai. Karena secara pribadi, apabila hasil produksi buruh melebihi target maka mandor akan mendapatkan bonus. Sementara buruh tidak mendapatkan bonus dari kelebihan target tersebut. Seperti kutipan wawancara dengan Bapak Sugeng berikut ini:

“iya, kan yang ngumpulin mandor, misalnya saya dapat 25 liter, dikasih tau dapat 20 kan ndak tau saya. Yang 5 liter diambil mandor, kalo tiap hari dapat berapa. Tiap hari nambah 5 liter, 5 liter kan banyak. (buruh) ndak tau, Cuma mau ngomong itu ndak berani. (wawancara tanggal 14 September 2014 pukul 10.00 WIB).

Pemotongan upah tanpa sepengetahuan buruh juga dialami oleh Bapak Mulyono. Sebelumnya Bapak Mulyono tidak pernah menghitung sendiri upah yang akan diterima. Merasa perusahaan melakukan penyelewengan pemberian upah, Bapak Mulyono menghitung sendiri upah yang akan diterima. Seperti kutipan wawancara berikut ini:

“kalo di pabrik itu dihitung jam kan, jadi misalnya saya ini, ini kan 51 jam dikali 7341, 300 berapa itu, ditambah UMK itu, kan ndak kerja hari Minggu itu. Jadi 550. Dapatnya ini sudah 928, kan dikalikan satuan kalo ini. Dengan lemburnya ini sudah. Lemburnya saya lebih 300. Saya yang ngitung. Kalo kemaren saya ndak ikut, kecil terus, 500, 600 setengah bulan. Saya langsung tanya itu rumusnya apa saya mau tanya. Ndak tahu. Langsung saya bel teman cara ngitungnya rumusnya apa, o gini, langung saya duduk diatas, sama Adm langsung. Dibohongi kalo dulu” (wawancara tanggal 21 September 2014 pukul 10.15 WIB).

Eksplotasi dalam pemberian upah tersebut tidak hanya merugikan buruh secara materi, namun juga secara moral. Karena perusahaan sudah menipu dan merampas hak buruh. Penipuan tersebut seperti pemberian upah yang tidak sesuai standar dan pemotongan upah tanpa sepengetahuan buruh.

Upah rendah dan sebagian upah yang masuk ke kantong sinder maupun mandor sering terjadi. Tidak ada kontrol dari perusahaan yang dapat mengawasi



segala aktivitas produksi dan keuangan perusahaan. Para pegawai perusahaan tidak pernah mengetahui secara langsung bagaimana kondisi di lapangan. Sehingga aktivitas produksi dan keuangan perusahaan cenderung dilaksanakan oleh sinder dan mandor sendiri. Pada akhirnya buruh yang menjadi korban, terutama buruh lepas sadapan. Seperti pernyataan Bapak Anto berikut ini:

“Kemaren saya juga sempet ngurusin itu jadi tentang kan bab direksi berbicara prestasi Mbak, siapa petugas yang ditugasi untuk mengontrol prestasi karyawan, sedangkan ADM nya, sinder nya ndak pernah turun ke lapangan. Kalo berbicara prestasi karyawan sadapan. Disini pekerja sadapan terus terang seakan-akan pekerja liar Mbak. Saya ke direksi kemaren bilang itu, lho kok bisa gitu bilang kalo pekerja liar. Iya pada tahun 70an pekerja itu dikomando satu komando, jam tiga berangkat, jam sepuluh *ngolot*. Kalo sekarang, jam 3 sore jam 4 sore udah berangkat ndak usah disuruh. Tapi kalo nggak melakukan seperti itu ndak makan karyawan sini Mbak. Upahnya kayak gitu e”. (wawancara tanggal 14 Juni 2014 pukul 12.30 WIB).

Menurut pernyataan Bapak Sugeng, para pegawai perusahaan memang tidak pernah melakukan kontrol secara langsung ke lapangan. Sehingga tidak mengetahui bagaimana produksi berlangsung dan mudahnya terjadi praktik-praktik ilegal dari pegawai pelaksana. Seperti dalam kutipan wawancara dengan Bapak Sutipyo berikut ini:

“Adm nya saja ndak pernah ke kebun. Itu kan biasanya keliling kebun ndak tiap hari lah, satu bulan sekali gitu, ndak ada. Ndak pernah turun ke lapangan. Kotor ndak nya itu Adm ndak tau. Sebenarnya Adm nya itu tegas, seperti ini bayaran. Ini nanti bayaran, ini awasin. Kan gitu biasanya kayak dulu. Orang kantor yang ngawasin. Uang itu kan turunnya dari direksi”. (Wawancara tanggal 22 November 2014 pukul 10.00 WIB).

Tugas untuk mengawasi kinerja di perkebunan berada dibawah tanggung jawab SPI. Seharusnya seluruh aktivitas perusahaan diawasi oleh SPI mulai dari pekerjaan sampai keuangan. Namun SPI tersebut justru memihak perusahaan karena orang-orang didalamnya merupakan orang-orang perusahaan sendiri. Seperti pernyataan Bapak Sugeng dan Bapak Sutipyo berikut ini:

“Itu SPI, kalo SPI dateng. Dari Jember, sering itu kalo SPI. tapi sekarang SPI nya orang-orang dalam sendiri. Dikasih uang sudah beres. Cuma datang kesini, habis makan pulang. Iya ngecek. Orang berapa yang kerja, pengeluaran sekian, kotor apa ndak bersih aatu ndak, kan gitu. Biasanya kan cek ke lapangan, ndak, duduk-duduk di kantor, jam 12 pulang sudah.

sebenarnya kalau kebun itu SPI nya dari luar. Kalau ini SPI nya orang dalam. Mantan Adm gitu. disini kalo nggak ada organisasi diinjak-injak". (Wawancara tanggal 22 November 2014 pukul 10.00 WIB).

Perusahaan seharusnya juga memberikan kontrol terhadap pekerja. Masalah ijin sakit misalnya, buruh tetap sering melakukan kecurangan dalam absensi. Mereka ijin sakit, padahal sebenarnya tidak. Hal ini karena meskipun mereka tidak bekerja, tetap mendapatkan upah. Perusahaan seharusnya mengecek secara langsung apakah buruh tersebut benar-benar sakit atau tidak. Sekarang perusahaan enggan untuk menjenguk secara langsung buruh yang ijin sakit. Seperti pernyataan Bapak Sutipyo berikut ini:

"kalo dulu orang sakit itu ditengok, apa betul-betul sakit apa ndak itu. Kalo betul-betul sakit langsung dibawa ke rumah sakit. Kadang-kadang kan orang tetap punya alasan, ndak sakit dibilang sakit. Orang kerja pulang pergi nyabit. Kan banyak yang gitu. Nggak ada pengawasan, seharusnya ada. Kalo sakit saja mandorya nggak nengok. Banyak yang tetap itu yang bohong" (Wawancara tanggal 22 November 2014 pukul 10.00 WIB).

Upah yang rendah tersebut menyebabkan buruh kesulitan dalam mencukupi kebutuhan. Tingkat upah semakin rendah, sementara harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Selain itu, para buruh masih harus membayar biaya sekolah anak-anaknya yang tidak murah. Mereka mencukupi kebutuhan pokok seperti makanan dengan cara yang sangat sederhana, yaitu dengan memanfaatkan tanaman di sekitar rumah seperti daun katu, pakis, lamtoro, dan lain sebagainya. Tidak ada makanan "mewah", bagi mereka dapat mencukupi kebutuhan makan dalam sehari untuk keluarga sudah cukup. Hal ini membuktikan kesejahteraan para buruh masih rendah.

Penyelewengan pemberian upah yang dialami buruh menjadi ukuran secara materi untuk menentukan tarah hidup dan kesejahteraan mereka. Scott, (1976: 244-245) menyatakan ukuran taraf hidup seorang klien dilihat dari apakah ia masih dapat mencukupi kebutuhan dasar keluarganya atau tidak. Mereka menjalankan suatu sistem yang dibuat oleh kaum elit atau tuan tanah. Sehingga sistem yang dijalankan tuan tanah yang memungkinkan klien hidup relatif berkecukupan pada umumnya dianggap baik, sedangkan sistem yang hampir tidak dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan minimalnya akan dianggap eksploitatif.

Jika melihat gambaran kondisi buruh lepas tersebut, maka hubungan eksploitatif antara perusahaan dengan buruh dapat dianggap menurunkan taraf hidup buruh lepas. dalam pemenuhan kebutuhan dasar saja, buruh lepas masih kesulitan.

Upah yang tidak menentu dan tidak banyak pilihan lapangan pekerjaan mendorong para buruh untuk tetap bekerja di perkebunan. Meskipun mereka sering mengalami eksploitasi, namun tidak ada pilihan lain selain tetap bertahan menjadi buruh perkebunan. Apabila mereka tidak bekerja di perkebunan, maka tidak ada pendapatan yang diterima. Seperti Bapak Saha, meskipun memiliki pekerjaan sampingan, namun pendapatan yang diterima juga tidak menentu. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Saha:

“ya takutnya anu Dik kerjaan saya diluar itu ndak ada musim, daripada nganggur harus ke kebun. Kalo sama-sama tiap hari ada Dik ya mahal di luar Dik daripada di perkebunan. Kalo diluar kan ndak menentu juga cuma musiman kan Dik. Kalo sekarang musim pete, musim duren itu mesti banyak. Kalo ndak ada musim kan pengangguran.” (wawancara tanggal 16 September 2014 pukul 11.30 WIB).

Pekerjaan sebagai pengepul buah sudah dilakukan Bapak Saha sejak lama. Meskipun memiliki pekerjaan sampingan, pendapatan Bapak Saha tetap tidak menentu. Karena Bapak Saha tetap menunggu musim panen untuk tanaman pete dan durian. Pendapatan sebagai pengepul buah akan tinggi ketika banyaknya hasil panen buah.

Mayoritas para buruh perkebunan tidak memiliki pekerjaan lain selain bekerja di perusahaan perkebunan. Tidak banyak alternatif pekerjaan lain yang dapat mereka kerjakan. Selain karena pendidikan, tidak banyak ketrampilan yang mereka miliki. Mereka juga telah terbiasa dengan pekerjaan di perkebunan. sehingga mereka tetap bertahan bekerja sebagai buruh di perkebunan meskipun dengan kondisi tereksplorasi.

Pada aspek alternatif terbaik berikutnya yang dimaksud disini adalah apakah si klien akan mengalami kerugian yang lebih buruk apabila ia sudah tidak memiliki ikatan dengan tuan tanah. Jika kondisinya lebih buruk saat ia menjadi penyewa, maka ia akan tetap memilih menjadi penyewa daripada menjadi buruh. Penyewa merupakan seorang yang realistis. Ia membandingkan keuntungan-

keuntungan dari keadaannya sebagai penyewa dengan keuntungan-keuntungan apabila ia menjadi buruh tani. Ia akan menyadari bahwa ia relatif menyukai perannya sekarang daripada alternatif berikutnya. Mereka memiliki hubungan ketergantungan dengan tuan tanah yang setidaknya dapat menjamin kelangsungan hidupnya (Scott, 1976: 246). Begitu pula dengan para buruh, mereka memilih untuk tetap bekerja di perkebunan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Mereka memiliki pilihan realistis dimana mereka akan memiliki kemungkinan lebih buruk apabila tidak bekerja sebagai buruh di perkebunan.

Mengenai aspek ketiga yaitu pertukaran yang sepadan antara jasa yang diberikan buruh kepada perusahaan dengan apa yang didapatkan oleh buruh. Hal ini dapat dilihat dari nilai tenaga mereka dengan upah yang buruh terima. Buruh lepas perkebunan telah melakukan pekerjaan berat dengan upah yang rendah. Ketidaksiuaian upah dengan nilai tenaga mereka ditunjukkan dengan banyak tenaga kerja tanpa upah dan waktu kerja lembur yang lebih.

Pemberian upah buruh yang tidak sesuai standar, memang menjadi masalah utama. Namun terdapat bentuk eksploitasi lainnya yaitu banyaknya tenaga kerja tanpa upah khususnya perempuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan istri buruh perkebunan, banyak sekali perempuan yang bekerja hanya untuk membantu suaminya. Hal ini disebabkan perusahaan beralasan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak mencukupi, sementara masih banyak tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan. Mayoritas mereka adalah istri buruh sadapan yang tidak memiliki pekerjaan. Pada umumnya mereka ikut membantu suaminya bekerja karena daripada menganggur di rumah. Seperti pernyataan Ibu Yanti berikut ini:

“Saya sama suami saya kerja bareng, kalo saya cuma bantuin masnya di kebun. Kalo saya ndak punya buku, suami saya yang punya buku. di kantor, yang punya nama itu suami saya. Kalo saya ndak, Cuma bantuin masnya biar cepat pulang. Saya, ndak cuma bantuin cuma, bantuin masnya biar cepat pulang. Lepas, saya ndak punya pekerjaan. Dari dulu saya cuma bantuin masnya, ndak dapat gaji. bukannya ndak mau, tapi banyak yang mau kerja, lokasinya itu agak yak apa ya terlalu banyak karyawan banyak yang lembur, kan usianya agak tua belum jadi karyawan tetap.” (wawancara tanggal 14 Juni 2014 pukul 10.42 WIB).



Selain Ibu Yanti, masih banyak tenaga kerja perempuan yang tidak dibayar, seperti Ibu Wartini. Beliau juga tenaga kerja yang tidak dibayar karena tidak memiliki nama dalam absensi buruh. Ibu Wartini mengaku hanya membantu suaminya agar lebih ringan dan cepat selesai. Banyaknya perempuan atau istri penyadap karet yang tidak dibayar dikarenakan antara jumlah angkatan kerja dengan pekerjaan yang tidak sebanding. Penerimaan tenaga kerja atau buruh disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan perkebunan. Di PDP Sumber Wadung sendiri, banyak sekali yang ingin bekerja di perusahaan. Namun pihak perusahaan mempunyai alasan tidak ada lowongan pekerjaan. Akibatnya banyak tenaga kerja yang tidak dibayar. Seperti pernyataan Ibu Wartini berikut ini:

“ndak ada. Cuma anu bantuin Bapaknya. Tapi ndak ada lowongan kalo buat saya. cuacanya itu panas mulai pagi. Kadang-kadang satu hari kerja dua hari ndak kerja.” (wawancara tanggal 14 Juni pukul 12.00 WIB).

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Sugeng yang merupakan suami dari Ibu Yanti, seperti dalam kutipan wawancara berikut ini:

“iya kalo itu ndak dibayar. Banyak (perempuan yang tidak dibayar). Karena ndak status pekerja itu, kan ndak punya apa itu, nomer tetap di kantor. Kalo yang lain nggak minta juga. Anu ndak, lahan apa namanya lahannya kurang, jadi lowongan pekerjaannya sedikit, terlalu banyak yang bekerja.” (wawancara tanggal 21 Juni pukul 10.00 WIB).

Selain itu, informan lain yaitu Mas Wahyu juga membenarkan kondisi buruh perempuan yang bekerja tanpa mendapatkan upah, seperti penuturannya berikut ini:

“Saya yang merasa kasihan itu ya seperti Bu Yanti itu sudah, itu dua orang kerja membantu suaminya, secara teknis memang pekerjaan suaminya itu ringan, cuman upahnya ya hasil kerja satu orang, minim sekali. Dan itu wah banyak sekali, mayoritas. Tenaga sadap disini itu mayoritas, pekerja paling dominan, tulang punggung perusahaan ya itu sudah. Tenaga sadap itu kan produksi permanen, produksi rutin yang tiap hari berproduksi tapi kalo seperti kopi itu kan tahunan.” (wawancara tanggal 21 Juni 2014 pukul 10.30 WIB).

Tenaga kerja tanpa upah tidak hanya terjadi pada Ibu Yanti dan Ibu Wartini, namun mayoritas dari istri buruh sadapan. Sebenarnya masih banyak pekerjaan yang dapat dikerjakan di kebun. Namun perusahaan tetap membatasi rekrutmen pekerja.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, buruh lepas perkebunan khususnya di sadapan telah mengalami bentuk eksploitasi terhadap tenaga mereka. Upah yang diterima dari perusahaan perkebunan belum dapat mencukupi seluruh kebutuhan hidup dari buruh seperti tempat tinggal, pakaian, dan makanan. Tenaga yang telah diberikan pekerja kepada perusahaan perkebunan hanya dihargai sangat sedikit dan bahkan tidak mampu mengembalikan tenaga mereka. Apa yang dialami oleh buruh lepas sadapan tersebut adalah upah yang diberikan perusahaan tidak mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Padahal mereka dituntut untuk bekerja terus untuk memproduksi, sementara upah untuk mengganti tenaga mereka masih belum cukup. Bahkan banyak tenaga kerja khususnya perempuan yang tidak dibayar.

Selain pekerja tidak diupah, tidak adanya resiprositas lain ditunjukkan dengan kerja lembur yang melebihi batas normal. Mayoritas buruh di pabrik mengalami kerja lembur setiap harinya. Waktu lembur dimulai pada pukul 14.00 sampai dengan 18.00. Namun para buruh sering bekerja lembur melebihi batas waktu tersebut karena banyaknya getah karet yang harus diolah. Perusahaan memberikan peraturan bahwa getah karet harus selesai diolah pada hari itu juga, apabila tidak, maka dapat mengganggu kelancaran produksi. Di pabrik memang sering ada kerja lembur. Apalagi ketika banyak getah karet yang masuk ke pabrik. Bapak Mulyono sering pulang sore bahkan malam hari karena pengolahan getah karet harus selesai pada hari itu juga. Seperti pernyataan Bapak Mulyono berikut:

“itu kalo menurut dapatnya latek, itu kalo dapat 15 bak atau 16 bak itu minimal jam 15.30. jadi dihitungnya itu dari jam setengah dua, nanti dari setengah dua sampai setengah empat, dihitung beda. Per jam nya itu 7341 di kali berapa nanti. Itu orang tetap, lepas sama”. (wawancara tanggal 21 September 2014 pukul 10.00 WIB).

Buruh pabrik sering pulang hingga larut malam untuk menyelesaikan pengolahan getah karet. Perusahaan mewajibkan buruh untuk menyelesaikan proses pengolahan meskipun melebihi waktu lembur. Meskipun telah melebihi waktu lembur, para buruh tidak diberikan tambahan upah. Padahal mereka telah bekerja melebihi jam kerja lembur. Maksimal waktu lembur di pabrik adalah pukul 17.30 malam, namun buruh pabrik sering pulang sampai pukul 21.00 malam. Hal inilah

yang menjadi ukuran tidak sepadan antara tenaga mereka dengan upah yang diterima.

Dalam aspek ini, ide moral yang ada didalamnya bahwa harus ada suatu “balasan” antara tuan tanah dengan klien. Apabila pertukaran antara tuan tanah dengan klien dianggap tidak seimbang, maka menimbulkan kemarahan moral dan ketidakadilan (Scott, 1976: 247). Tenaga kerja tanpa upah dan kerja lembur merupakan eksploitasi dalam nilai tenaga buruh. Akibat dari ketidakseimbangan antara tenaga yang diberikan dengan upah yang diterima inilah yang dianggap sebagai pertukaran yang tidak sepadan. Seperti yang dialami oleh buruh di PDPSumber Wadung, masih banyak tenaga kerja tanpa upah dan buruh yang bekerja melebihi batas lembur.

Masalah yang dihadapi oleh buruh lepas sangat kompleks. Mulai dari hak-hak normatif yang belum terpenuhi sampai penindasan akibat sistem perusahaan yang korup. Tidak ada perlindungan secara tegas kepada buruh lepas. Perjuangan mereka terhalang oleh praktik-praktik illegal oknum pegawai pelaksana. Hal ini semakin membuat mereka termarginalisasi dengan kondisi ekonomi yang sangat lemah. Posisi tawar buruh menjadi rendah dan hubungan antara buruh dengan perusahaan perkebunan merupakan pertukaran yang tidak adil dan eksploitatif.

#### 4.4.2 Hak-Hak Normatif Buruh Lepas Tidak Terpenuhi

Secara umum, buruh di perkebunan dibagi menjadi dua yaitu buruh tetap dan buruh harian lepas. Buruh tetap, merupakan buruh yang memiliki jaminan kerja dari perkebunan seperti upah, tunjangan kesehatan, keselamatan kerja, dan juga THR. Sedangkan buruh harian lepas tidak memiliki kepastian untuk jaminan kerja. Perbedaan antara buruh tetap dengan buruh harian lepas sangat terlihat jelas. Hal itu ditunjukkan dengan hak-hak normatif buruh lepas yang belum terpenuhi. Hak-hak tersebut antara lain upah layak, tunjangan kesehatan, fasilitas keselamatan kerja, THR, dan pengangkatan menjadi buruh tetap. Buruh lepas yang bekerja di PDP Sumber wadung mayoritas masih hidup dalam kekurangan. Hal tersebut disebabkan hak-hak mereka yang masih terabaikan. Perbedaan yang

sangat terlihat adalah masalah upah. Seperti wawancara dengan Ibu Yanti berikut ini:

“Maksudnya saya itu, kalo libur ndak dibayar. Kalo orang tetap itu ya meskipun sakit walaupun tidak kerja itu tetap dibayar. Kalo kayak saya meskipun sakit ndak dapat. Cuma ada uang pengganti obat cuma. kalo karyawan tetap itu ya bedanya Minggu dibayar, hari libur ya seperti tanggal merah ya itu dobel bayarannya. Kerja di bayar, ndak kerja dibayar. Apalagi kerja bayarannya dobel.” (wawancara tanggal 14 Juni 2014 pukul 10.42 WIB).

Buruh tetap dan buruh lepas memiliki kecenderungan perbedaan upah yang sangat jauh. Buruh tetap memiliki hak untuk mendapatkan upah lebih banyak daripada buruh lepas. Dimana ketika hari libur buruh tetap mendapatkan upah seperti biasa, sementara buruh lepas tidak. Selain itu ketika buruh tetap bekerja pada hari libur tersebut, maka mereka mendapatkan upah ganda. Sehingga pendapatan buruh tetap lebih banyak dibandingkan dengan buruh lepas.

Kemudian hak lain yang belum terpenuhi adalah tunjangan kesehatan. Setiap buruh seharusnya mendapatkan tunjangan kesehatan yang memadai karena pada dasarnya sudah ditetapkan dalam peraturan. Tidak ada perbedaan antara buruh tetap maupun buruh lepas. Namun pada kenyataannya masih banyak buruh lepas yang belum mendapatkan tunjangan kesehatan. Ketika seorang buruh tetap sakit ataupun menginap di rumah sakit, maka semua biaya perawatan ditanggung oleh perusahaan sampai ia sembuh. Sementara, buruh lepas hanya mendapatkan ganti obat tanpa tambahan lain. Seperti penuturan Ibu Yanti berikut ini:

“misalnya habis 20 juta ya dikasih 20 juta. Pokoknya sesuai kuitansi itu. Nanti disodorkan ke kantor. Kalo orang lepas, cuma berobat itu dikasih, ganti obatnya 30 ribu ya 30 ribu. Kalo yang tetap juga tetap dapat bayaran meskipun sakit selamanya, 3 bulan ya dibayar 3 bulan itu.” (wawancara tanggal 14 Juni 2014).

Bahkan, Bapak Saha pernah tidak mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan. Bapak Saha hanya mendapat uang ganti berobat yang sedikit dan tidak sesuai dengan ketentuan, selebihnya beliau harus menanggung biaya kesehatan sendiri. Kekesalan juga ditunjukkan oleh Bapak Saha karena hak-haknya diabaikan oleh perusahaan. Seperti kutipan wawancara berikut ini:



“.....masalah kesehatan itu orang lepas cuma dapat uang ganti berobat. Katanya kalo minta kuitansi nanti ngasih ke kantor, dari kantor nanti dapat uang ganti. Saya dulu pernah minta itu ke kantor tapi Cuma dapat 150 ribu, padahal saya habis 4,5 juta waktu sakit itu. Katanya kabagnya itu kalo opname baru dapat uang ganti. Apa mau nunggu orang itu meninggal baru dapat.” (wawancara tanggal 3 September 2014 pukul 10.30 WIB).

Seharusnya semua buruh didaftarkan di BPJS kesehatan, namun perusahaan belum melaksanakan hal tersebut. Dalam hal ini perusahaan tidak ingin memiliki tanggungan administrasi jika seluruh pekerja didaftarkan di BPJS kesehatan. Seperti kutipan wawancara dengan Mas Wahyu berikut ini:

“istilahnya bukan dirugikan Mbak, tapi ada beban administrasi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Karna untuk pembayaran premi itu hanya berapa persen saja yang harus ditanggung oleh pekerja. (wawancara tanggal 21 Juni 2014 pukul 10.30 WIB).

Buruh yang ingin mendapatkan fasilitas asuransi kesehatan harus mendaftarkan keluarganya ke BPJS kesehatan. Apabila ia hanya mendaftar ke BPJS Mandiri, maka anggota keluarganya tidak mendapatkan tanggungan jaminan kesehatan. Biaya untuk menanggung jaminan keehatan buruh sangat besar. Sehingga perusahaan menekan pengeluaran untuk BPJS buruh dengan tidak melaksanakan jaminan kesehatan.

Hak buruh lepas yang belum terpenuhi yang ketiga adalah fasilitas perlindungan kerja. Sebenarnya buruh di perkebunan juga memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas keselamatan kerja. Fasilitas tersebut antara lain sarung tangan, masker, dan sepatu yang berguna untuk meminimalisir kecelakaan diwaktu kerja dan melindungi buruh. Selain itu, buruh di kebun rawan terhadap serangan binatang buas dan gangguan lainnya. Namun mayoritas dari buruh tidak menerima fasilitas tersebut dan harus membeli sendiri. Seperti wawancara dengan Bapak Saha berikut ini:

“o kalo sepatu itu ya pake, tapi ndak dapat dari kebun. Saya beli sendiri itu semuanya. Kalo ndak pake sepatu kalo ada ular kan ndak tau. Pernah saya dulu mangkok itu hilang diambil orang semuanya saya yang ganti.” (wawancara tanggal 3 September 2014 pukul 10.30 WIB).

Para buruh juga tidak mendapatkan jaminan dalam perlindungan kerja. Para pekerja hanya terdaftar di PT Jamsostek saja, namun pelaksanaan K3 tidak pernah direalisasikan kepada buruh. Seperti pernyataan Mas Wahyu berikut ini:

“perlindungan kerja itu tidak ada, K3 itu nggak pernah dilaksanakan oleh perusahaan, cuman bagi mereka yang diikutkan Jamsostek itu sudah tercover oleh PT Jamsostek. Itu nanti pengajuannya dari kebun masuk ke direksi itu nanti direksi mengajukan ke PT Jamsostek, BPJS ketenagakerjaan. Sekarang kan gitu, itu pun semaksimal mungkin oleh perusahaan tidak akan dilaksanakan, nah disitu, kita berjuang untuk itu Mbak”. (Wawancara tanggal 21 Juni 2014 pukul 10.30 WIB).

Kemudian masalah lain yang menyangkut hak-hak normatif buruh lepas adalah masalah pemberian THR (Tunjangan Hari Raya). THR yang diterima buruh lepas memiliki perbedaan dengan buruh tetap. Pada umumnya, buruh lepas hanya menerima satu kali gaji dalam satu tahun. Sementara buruh tetap dapat menerima tunjangan ini sampai tiga bulan gaji dalam satu tahun. Seperti yang diungkapkan Ibu Yanti berikut ini:

“Kalo THR itu beda sama orang yang lepas. Kalo orang lepas sama yang tetap satu bulan kalo orang lepas, satu bulan gaji. Dalam bentuk uang. Satu tahun sekali dikeluarkan. Kalo orang tetap itu tiga bulan gaji. 1.700.000 berapa gitu kalo sekarang kali 3 kalo orang tetap. Kalo orang lepas 1.280.000.”

Perbedaan dalam jumlah nominal THR tersebut memang sering menimbulkan perdebatan dari buruh lepas. Mereka menilai perusahaan tidak memperhatikan tunjangan untuk buruh lepas. Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Saha:

“kalo THR itu setahun sekali dapatnya, tapi antara yang lepas sama tetap itu beda jauh, kalo sekarang dapat 2,3 juta yang tetap, kalo yang lepas cuma separohnya. Padahal kan sama-sama kerja tapi bedanya jauh. Apalagi kalo karyawan di sadapan itu kan tiap hari kerjanya.” (wawancara tanggal 3 September 2014 pukul 10.30 WIB)

Masalah yang dihadapi buruh lepas yang terakhir adalah perubahan status menjadi buruh tetap. Masalah ini juga sering menjadi tuntutan buruh lepas kepada perusahaan. Perusahaan sangat membatasi adanya pengangkatan buruh dengan alasan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan. Padahal dalam pengangkatan buruh sudah tercantum dalam peraturan. Selain itu, tindakan

korupsi, kolusi dan nepotisme juga mewarnai proses pengangkatan menjadi buruh tetap. Hal ini semakin mempersulit buruh yang tidak memiliki akses. Seperti wawancara dengan informan berikut ini:

“Kalo sesuatunya memberhentikan karyawan, mengangkat karyawan itu apa katanya direksi, sesuai kebutuhan dan sesuai kemampuan.”  
(wawancara dengan Bapak Anto, tanggal 14 Juni 2014, pukul 12.30).

Dalam hal ini, Ibu Yanti juga mengungkapkan selain sulit untuk menjadi karyawan tetap, terdapat praktik-praktik ilegal agar cepat diangkat menjadi karyawan. Banyak oknum-oknum dari pegawai perusahaan perkebunan yang melakukan praktik tersebut, berikut kutipan wawancara dengan Ibu Yanti:

“(jadi karyawan) mengabdikan berapa tahun. Minimal 25 tahun. Tapi kalo sekarang ndak, maen gini sekarang (memakai uang). Kalo uang masuk, diangkat sekarang walaupun kerjanya cuma 5 tahun 10 tahun. banyak, sembunyi-sembunyi. Dulu suami saya dimintai 3 juta, tapi ndak mau. Suami saya ingat yang disuap sama yang nyuap itu sama. Langsung bayar 2 juta, tapi kan eman-eman kalo 2 juta, mending kalo saya makan sekeluarga enak. Yang penting kerja yang baik, yang tekun pokoknya”  
(wawancara dengan Ibu Yanti, tanggal 14 Juni 2014 pukul 10.42 WIB).

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Wartini, seperti kutipan wawancara berikut ini:

“dari dulu ya sulit. Dulunya itu kebanyakan bayar gitu.” (wawancara tanggal 14 Juni pukul 12.00 WIB).

Masalah pengangkatan karyawan sudah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan, dimana karyawan perusahaan wajib diangkat setelah tiga bulan bekerja berturut-turut. Namun mayoritas buruh di PDP Sumber wadung belum diangkat menjadi buruh tetap, bahkan ada yang sampai pensiun. Menurut pernyataan Bapak Anto, mayoritas para buruh bekerja sampai puluhan tahun dan hampir mendekati masa pensiun. Oleh karena itu, tidak jarang ada buruh yang melakukan pendekatan dengan atasan seperti mandor. Seperti dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Pokoknya suruh mengacu pada undang-undang pasal 60 ayat 1 sama pasal 30 itu aja. Kan setiap 3 bulan itu seharusnya diangkat jadi karyawan tetap. Tapi disini puluhan tahun, 20 tahun, 25 tahun. Kalo kita mengacu pada undang-undang nomor 13 pasal 63 wajib bagi perusahaan, dan di pasal 60 perusahaan harus mengadakan masa percobaan kalo disini nggak

ada. Jadi kadang-kadang ikut tes. Pengangkatan itu kan dari kebutuhan kebun. Disini mbak yang kerja seumpama sampe 25 tahun, umurnya sudah 50 tahun diangkat jadi karyawan tetap, kan tinggal 5 tahun pensiun, itu tidak menghitung dari masa kerja pesangonnya, dihitung semenjak dia menjadi karyawan tetap. Padahal di undang-undang nggak bicara begitu. Jadi selama dia bekerja bertahun-tahun itu dianggap kerja bakti oleh perusahaan, kasihan kan”. (wawancara tanggal 14 Juni 2014 pukul 12.30 WIB).

Sebagai buruh lepas, tanggapan yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Sugeng, bahwa keputusan perusahaan dalam mengangkat buruh menjadi buruh tetap tidak sesuai dengan peraturan. Perusahaan cenderung mengabaikan masalah pengangkatan pekerja, seperti kutipan wawancara berikut ini:

“Kalo pengangkatan itu tiga bulan 26 hari kerja ndak putus berturut-turut itu menurut undang-undangnya, bukan 25 tahun.sampai sekarang ndak ada, itu kan kelirunya perusahaan itu.o ya tau kalo perusahaan, kan sering didatangi ke DPR saya, ke disnaker sering didatangi. Tapi kan, apa ya perusahaan tu melanggar terus ya didemo sama sini. Menurut undang-undangnya kan tiga bulan kerja atau 26 hari, karyawan tetap sudah. Kalo disini sampai berapa tahunan, puluhan disini.belum memenuhi peraturan PDP ini. Kalo memenuhi peraturan tetap semua disini ini. Ada yang berapa, ada yang 30 tahun disini, ndak tetap. Saya 10 tahun, 11 tahun disadapan. Dulu di pabrik saya di pengolahan.” (wawancara tanggal 14 Juni 2014).

Mas Wahyu juga menambahkan bagaimana kesulitan buruh dalam pengangkatan sebagai buruh tetap. Banyak pelanggaran dan ketidakadilan yang dilakukan perusahaan terhadap buruh, seperti kutipan wawancara berikut ini:

“untuk saat ini kita (buruh) memang perlu ikut campur. Karna sudah tidak sesuai. Jadi intinya bagi mereka-mereka yang diangkat itu kadang-kadang orang-orang yang dekat dengan pimpinan seperti itu Mbak. Jadi tidak sesuai dengan kriteria dan tidak sesuai dengan aturan. Jadi selama ini pengangkatan sering terjadi konflik internal sampai konflik di PDP. selektif Mbak, ndak mesti. (wawancara tanggal 21 Juni pukul 10.30 WIB).

Dalam satu tahun pengangkatan buruh dilakukan hanya satu kali. Seharusnya minimal dua kali. Pada tahun sekarang ini hanya satu kali dalam lingkup kebun Sumber Wadung ada 9 orang yang diangkat menjadi buruh tetap. Seharusnya ada *season* berikutnya namun terjadi beberapa kesalahan teknis, akhirnya mundur sampai saat ini tidak ada lagi pengangkatan.

Sebagai buruh di pabrik, Bapak Mulyono dan Bapak Jauhari juga mengeluhkan sulitnya untuk menjadi buruh tetap. Perusahaan tidak memenuhi



peraturan yang ada dan justru mengabaikan tuntutan buruh. Perusahaan juga hanya memberikan janji kepada buruh, namun pada kenyataannya mereka belum juga diangkat menjadi buruh tetap. Seperti kutipan wawancara dengan Bapak Mulyono berikut ini:

“di peraturan kan kalo statusnya sama cepet diangkat. Pokoknya kalo tiga bulan berturut-turut dia ndak berhenti, bekerja terus menerus, maka dia wajib menerima SK. Kenapa sampai tahunan. Katanya ya, kan saya tanya, apa lama kerja apa lama produksi, atau prestasi, katanya prestasi, sudah saya kerja yang benar sudah, setelah itu nggak katanya, lama kerja”. (wawancara tanggal 21 September 2014 pukul 10.00 WIB).

Bapak Jauhari juga memiliki pernyataan dan mengungkapkan kekecewaannya terhadap perusahaan karena nasib mereka tidak diperhatikan. Bapak Jauhari memiliki pendapat yang sama dengan Bapak Mulyono:

“kalo peraturan di perusahaan, apa di PDP, PTP, kalo mengikuti undang-undang, per tiga bulan berturut-turut bekerja ndak ada libur, dia harus menerima haknya. Dijadikan karyawan tetap. Tapi sekarang ada yang tahunan, sepuluh tahun. Makanya kan disini sering ada aksi demo. kalo katanya perusahaan itu ya itu, dialihkan ke yang lain-lain pas. Jadi menghilangkan permintaan karyawan. Saya beri contoh haknya, minta sudah bertahun-tahun gini belum dapat SK, masalah produksi, keuangan menipis, tinggal sekian alasannya banyak pokok.sering dibohongi”. (wawancara tanggal 21 September 2014 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa buruh lepas di PDP Sumber wadung masih belum mendapatkan jaminan kerja yang layak. Masih banyak hak-hak normatif buruh lepas yang belum terpenuhi. Perusahaan benar-benar telah menghisap tenaga dan menindas para buruh lepas. Scott, (1976: 239-241) menyatakan bahwa eksploitasi memiliki makna terdapat individu, kelompok, maupun kelas yang mengambil keuntungan dari kerja secara tidak adil atas orang lain. Dari makna tersebut terdapat dua ciri yang melekat dalam eksploitasi yaitu, pertama eksploitasi dilihat sebagai suatu tata hubungan diantara perorangan, kelompok, maupun lembaga yang dieksploitasi mengimplikasikan adanya pihak yang mengeksploitasi. Kedua, eksploitasi merupakan distribusi yang tidak wajar dari usaha dan hasilnya. Pernnyataan Scott tersebut sesuai dengan kondidi buruh lepas di PDP Sumber Wadung. Hubungan antara perusahaan dengan buruh terjadi

ketidakseimbangan dan ketidakadilan. Imbalan yang diperoleh buruh tidak sepadan dengan tenaga dan jasa yang mereka berikan.

#### **4.5 Perlawanan Simbolik Buruh Lepas: *Hidden Transcript***

Sistem yang menyeleweng ataupun praktik eksploitasi seperti tidak terpenuhinya hak-hak normatif buruh, korupsi pegawai, dan tekanan telah, menimbulkan pertentangan diantara kelompok kelas atas dengan buruh. Pertentangan ini juga menimbulkan dampak sosial dimana para buruh menjadi tidak patuh dan hormat serta melakukan pemberontakan buruh terhadap penguasa. Namun perlawanan mereka dilakukan secara simbolik dan tanpa sepengetahuan pegawai perusahaan. Perlawanan simbolik tersebut antara lain mencampur getah karet dengan air, mengulur waktu kerja, mengabaikan perintah mandor dan tidak hormat kepada atasan, serta menurunnya semangat kerja.

Buruh lepas di perkebunan Sumber Wadung sudah sering mengalami eksploitasi dan tekanan. Hak-hak normatif tidak terpenuhi dan eksploitasi tenaga menjadi masalah utama yang mereka hadapi. Pada dasarnya mereka memiliki kesadaran untuk memperjuangkan hak-haknya, namun upaya tersebut masih belum memperbaiki nasib mereka. Tuntutan seperti melakukan demonstrasi misalnya, tidak jarang dilakukan para buruh. Namun tetap saja belum menunjukkan perbaikan secara penuh hak mereka.

Kegagalan upaya perlawanan secara terbuka membuat para buruh tersebut tidak berhenti melakukan perlawanan. Mereka justru melakukan perlawanan di belakang. Perlawanan simbolik mereka seperti mencampur getah karet dengan air, mengulur waktu kerja, memudarnya rasa patuh dan hormat kepada atasan, serta menurunnya semangat kerja. Tindakan belatar belakang motif ekonomi tersebut dilakukan sebagai bentuk “balas dendam” mereka kepada perusahaan. Hal inilah yang menjadi suatu bentuk perlawanan sehari-hari para buruh lepas di perkebunan Sumber Wadung.

Buruh sadapan termasuk buruh yang paling memiliki upah yang kecil. Karena sistem upah mereka adalah borongan. Hal ini menyebabkan penghasilan mereka tidak menentu setiap bulannya. Selain itu mereka masih mengalami

pemotongan upah tanpa sepengetahuan mereka oleh mandor. Mereka mulai menyadari bahwa mandor telah melakukan penyelewengan terhadap upah para buruh. Pada akhirnya buruh merasa kesal dan melakukan pemberontakan kecil seperti mencampur getah karet dengan air. Tindakan ini dilakukan setiap hari oleh buruh sadapan agar takaran getah menjadi banyak. Karena desakan upah yang rendah.

Tindakan atas dasar motif ekonomi tersebut dilakukan oleh sebagian besar buruh sadapan. Seperti kutipan wawancara dengan Bapak Saha berikut ini:

“ya yang lain itu latexnya ada yang dicampur dengan air, biar tambah banyak. Jadi nanti pas dihitung kelihatan banyak.” (wawancara tanggal 3 September 2014 pukul 10.30 WIB).

Bapak Mulyono juga menyatakan bahwa mayoritas buruh sadapan mencampur getah dengan air agar takarannya menjadi banyak. Namun sebenarnya hal ini tidak menjadikan getah karet semakin banyak, karena upah tetap dihitung berdasarkan karet per kilo kering. Seperti kutipan wawancara berikut ini:

“kalo dihitung ya Dik antara yang 10 sama 20, ya hasilnya banyakan yang 20, tapi karyawan kan banyak yang ceroboh, biar banyak dapatnya dicampurin getahnya. Masuk ke pabrik, kan diambil contohnya itu, ketemu nanti. Jadi getah yang campuran dengan yang asli, ya besaran yang asli itu sudah. Meskipun sedikit tapi asli, itu besar. Kadang literanya yang banyak, tapi campur air. Kalo yang asli 23 liter bisa berapa kilo itu. Itu kan pemikiran tiap-tiap pribadi. Kalo ndak dicampur ya ndak dapat banyak. Padahal masuk ke pabrik masih diambil seperti apa, apa masih bagus getahnya apa ndak, kan gitu.”

Setelah mengumpulkan getah dari kebun, para buruh sadap membawa mangkuk-mangkuk tempat getah untuk dicuci di sungai. Pada saat inilah air sisa mencuci mangkuk tersebut dicampur dengan getah karet asli. Hal ini bertujuan agar takaran getah menjadi lebih banyak dan berharap upah mereka akan lebih banyak. Namun sebenarnya mencampur getah dengan air tersebut tidak mempengaruhi besarnya upah mereka. Besarnya upah ditentukan oleh karet dalam kilo kering. Tindakan ini dilakukan tanpa ada koordinasi dari para buruh. Kebiasaan ini berkembang diantara para buruh sebagai suatu bentuk “penyelamatan diri” dengan motif ekonomi.

Pada saat ini, buruh lepas sering mengulur waktu kerja. Mereka berangkat ke kebun lebih siang dari waktu yang ditentukan perusahaan. Para buruh harus menyetor hasil sadapan ke pabrik pada pukul 08.00 pagi. Namun mereka mengulur waktu setor sampai pukul 09.00 pagi. Saat mereka bekerja mengambil getah juga memperlambat ritme bekerja secara sengaja. Para buruh lebih senang mengobrol dengan sesama buruh di kebun. Seperti kutipan wawancara dengan Bapak Saha berikut ini:

“kalo sekarang kan tergantung yang kerja berangkat jam berapa, kalo berangkat jam 12 kan lateks itu sudah ndak ngalir lagi kan. Kan sudah berhenti. Dibawa ke pabrik kan pagi, Cuma nakernya kan jam 8.” (wawancara tanggal 16 September 2014 Pukul 11.30 WIB).

Bapak Sugeng juga memberikan pernyataan yang sama mengenai waktu kerja buruh sadapan, seperti kutipan wawancara berikut ini:

“kalo dulu kan harus berangkat jam setengah enam baru diambil, kalo sekarang terserah, mau diambil pagi-pagi ndak masalah. Yang penting setor. Iya kalo dulu, kalo sekarang setengah lima baru berangkat. Subuh itu berangkat. Ya males sudah” (wawancara tanggal: 14 September 2014 pukul 10.00 WIB).

Mengulur waktu kerja tersebut menandakan bahwa para buruh mulai malas dan mengalami penurunan semangat kerja. Mereka mulai enggan rajin bekerja karena tenaga yang mereka berikan tidak sebanding dengan nilai yang mereka terima. Mayoritas buruh bekerja dengan kemauan sendiri, bahkan sebenarnya ada beberapa buruh yang ingin berhenti. Seperti kutipan wawancara dengan informan berikut ini:

“Tapi sekarang upahnya lemah Dik. Makanya kurang giat semua karyawan itu. Saya ya Dik kalo normal, buah-buahan itu bisa kirim itu terus terang saya ndak kerja lagi di perkebunan.” (wawancara tanggal 16 September 2014 pukul 11.30 WIB).

Bapak Sugeng juga menyatakan hal yang sama mengenai semangat kerja di kebun seperti dalam kutipan wawancara berikut:

“ya usaha masih. Kalo bisa nanti saya berhenti nyadap. Bosan saya di sadapan itu. Tapi tunggu pesangon, kalo berhenti sendiri ndak dapat pesangon. Milih yang lain kalo anu, ya karena upahnya itu.” (wawancara tanggal 14 September 2014 pukul 10.00 WIB).



Tindakan seperti mencampur getah dengan air, mengulur waktu kerja, dan menurunnya semangat kerja buruh dapat berpengaruh terhadap kelancaran proses produksi perusahaan. Meskipun proses produksi mengalami hambatan, tidak akan berpengaruh terhadap keberadaan buruh. Setidaknya hal ini dapat mengurangi tekanan yang dialami oleh buruh. Durasi waktu kerja yang lama dengan kondisi penuh tekanan memberikan konsekuensi penurunan semangat kerja para buruh. Para buruh merasa bekerja dengan maupun tidak adalah sama saja, tidak ada perbaikan dalam kesejahteraan mereka. Pada akhirnya mereka memilih untuk mengulur ritme waktu kerja dan tidak giat dalam bekerja.

Perlawanan simbolik tidak hanya dilakukan pada pekerjaan di kebun, para buruh juga melawan secara sembunyi-sembunyi terhadap pegawai perusahaan. Para buruh sudah mengabaikan perintah mandor dan tidak hormat kepada atasan. Mereka bahkan membenci pegawai seperti mandor dan sinder yang menjadi oknum dalam penyelewengan upah. Para buruh memiliki peran sendiri dibelakang pegawai perusahaan. Meskipun ketika mereka bertemu nampak terlihat patuh dan hormat, namun sebenarnya mereka sering menggunjing dan berbicara dibelakang. Seperti pernyataan Bapak Sugeng berikut:

“iya. Sama dengan sindernya sini. Tapi kalo mandor sama anak buahnya pura-pura baik. Kalo ketemu itu biasa, padahal itu ambil (tertawa).”  
(wawancara dengan Bapak Sugeng tanggal 22 November 2014 pukul 10.00 WIB).

Para buruh berpura-pura patuh dan menghormati atasan mereka saat bekerja maupun saat bertemu. Namun sebenarnya tidak ada rasa patuh dan hormat sama sekali. Dibelakang, mereka lebih sering menjelek-jelekkkan dan menggunjing. Misalnya terhadap mandor, para buruh mengetahui bahwa mandor mereka telah mengambil sebagian dari hak buruh seperti upah. Namun para buruh tidak secara terang-terangan menunjukkannya kepada mandor. Mereka lebih senang bermain dibelakang daripada berterus terang kepada mandor. Contoh lain misalnya saat bekerja, ketika di kebun ada mandor yang mengawasi mereka berpura-pura bekerja dengan giat. Namun setelah mandor pergi, mereka bekerja dengan seenaknya. Tindakan buruh tersebut dilator belakangi oleh kebencian kepada mandor yang telah menipu dan membohongi mereka soal upah. Karena tidak

banyak yang dapat dilakukan oleh buruh, akhirnya mereka memasang “topeng” sendiri sebagai bentuk perlawanan dan pembelaan diri mereka.

Buruh perkebunan memiliki “senjata sendiri” dalam melakukan perlawanan, yaitu dengan perlawanan sehari-hari. Perlawanan sehari-hari menjadi pilihan ketika perlawanan secara langsung dan terbuka dianggap tidak memungkinkan dan membuahkan hasil. Hal ini mirip dengan apa yang digambarkan oleh James. C. Scott tentang para kaum tani yang melawan dengan gaya Brechtian seperti menghambat, berpura-pura, mencopet, memfitnah, pembakaran, sabotase dan sebagainya (Scott, 1993: 270-271). Kaum buruh yang tertindas memiliki bentuk perlawanan sehari-hari sendiri seperti mencampur getah karet dengan air, mengulur waktu kerja, memudarnya rasa patuh dan hormat kepada atasan, serta menurunnya semangat kerja. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan, rasa tidak senang, dan kebencian terhadap pegawai perusahaan.

Scott, (1993: 305) menyatakan perlawanan secara simbolik dilakukan secara tidak terorganisasi, tidak sistematis dan individual, bersifat untung-untungan dan berpamrih, serta tidak berdampak revolusioner. Demikian pula perlawanan simbolik buruh lepas perkebunan tampaknya juga menggambarkan perlawanan yang tidak terorganisasi dan sistematis seperti perlawanan terbuka. Jika perlawanan secara terbuka dilakukan melalui serikat buruh dan melalui suatu prosedur. Sementara perlawanan simbolik dilakukan secara individual. Hal seperti inilah yang terjadi di PDP Sumber Wadung Kabupaten Jember.

## Bagan 2. Hasil Penelitian

Eksploitasi Terhadap Buruh Lepas: Hak-  
Hak Normatif Tidak Terpenuhi

### Perlawanan Simbolik Buruh

1. Mencampur getah karet dengan air
2. Mengulur waktu kerja
3. Menurunnya semangat kerja
4. Mengabaikan perintah mandor dan tidak hormat kepada atasan

## BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

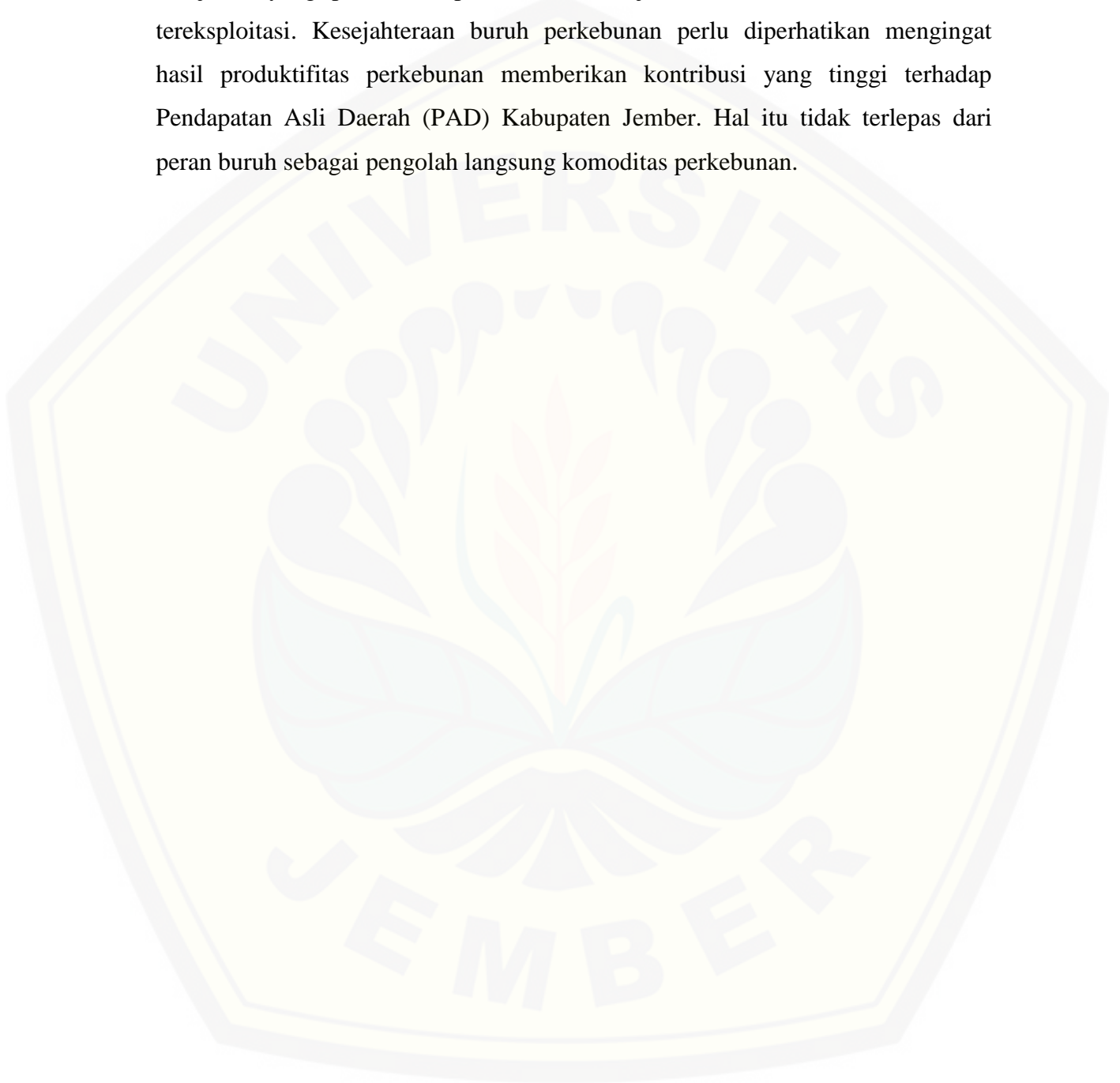
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh temuan data yang menggambarkan bahwa buruh lepas di PDP Sumber wadung telah mengalami eksploitasi oleh perusahaan perkebunan. Hal ini tercermin dari perlakuan pihak perkebunan terhadap para buruh yang cenderung mengabaikan hak-hak normatif yang seharusnya mereka terima. Dalam praktiknya perusahaan sering melakukan penyimpangan prosedur kerja, terutama pada buruh lepas, tidak diberikannya upah sesuai standar, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, dan hak-hak buruh, lainnya. Pada praktiknya oknum-oknum perusahaan perkebunan yang mengurangi standar pengupahan, mengeksploitasi tenaga mereka, serta melakukan manipulasi. Tindakan eksploitasi semacam ini menyebabkan rendahnya kesejahteraan buruh lepas. Hal ini bisa dilacak dari kondisi ekonomi mereka yang masih jauh dari kehidupan layak, sementara harga kebutuhan sehari-hari semakin meningkat.

Eksploitasi tersebut menyebabkan perlawanan dari buruh kepada perusahaan perkebunan. Namun demikian, perlawanan mereka tidak dilakukan secara terbuka, melainkan secara simbolik, sembunyi-sembunyi, dan tertutup. Bentuk perlawanan simbolik mereka antara lain mencampur getah karet dengan air, mengulur waktu kerja, mengabaikan perintah mandor dan tidak hormat kepada atasan, serta menurunnya semangat kerja. Tindakan-tindakan tersebut merupakan perwujudan dari rasa balas dendam akibat eksploitasi yang mereka alami. Tindakan melawan tersebut sudah terbiasa dilakukan sehari-hari oleh buruh lepas. Perlawanan tersembunyi seperti ini dapat menjadi alat politik tersendiri bagi buruh lepas. Hal ini memiliki kesamaan dengan hasil James. C. Scott (1976) mengenai perlawanan petani di pedesaan yang tertindas akibat tekanan dari kebijakan pemerintah.



## 5.2 Saran

Pemerintah daerah selaku pemilik badan usaha seharusnya melaksanakan kebijakan yang pro terhadap buruh, bukan justru membuat mereka semakin tereksplorasi. Kesejahteraan buruh perkebunan perlu diperhatikan mengingat hasil produktifitas perkebunan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. Hal itu tidak terlepas dari peran buruh sebagai pengolah langsung komoditas perkebunan.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2013. *Luas Areal Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Provinsi, Maret 2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke 8. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1971. *Al Qu'ran dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al Qur'an.
- Ghony, M. djunaidi dan Almanshur, Fauzan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Cetakan I. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1989. Jakarta: Balai Pustaka
- Moleong, J lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisirevisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. 2010. *Metodologi penelitian*. Cetakan XI. Jakarta: PT BumiAksara.
- Sanderson, K. Stephen. *Makro Sosiologi Sebuah Pendekatan Terhadap realitas sosial*. Edisi kedua. Cetakan keempat. Terjemahan oleh Farid Wajidi, S. Menno. 2003. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sandjaja, B dan Heriyanto, Albertus. 2006. *Panduan Penelitian*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Scott, James. C. 1976. *Moral Ekonomi Petani Pergolakan Dan Subsistensi Di Asia Tenggara*. Terjemahan oleh Hasan Basari. Jakarta: LP3ES
- \_\_\_\_\_. 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Cetakan I. Terjemahan Oleh Budi Kusworo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah Bentuk-Bentuk Perlawanan Sehari-Hari Kaum Tani*. Edisi Pertama. Terjemahan oleh A. rahman Zainuddin, Sayogya, Ibu Mien Joebhaar. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sihite, Romany. 2007. *Perempuan, Kesetaraan, Keadilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru Ketiga. Jakarta: CV Rajawali.

Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.

Wiradi, Gunawan. 2001. *Prinsip-Prinsip Reforma Agraria-Jalan Penghidupandan Kemakmuran Rakyat*. Cetakan I. Yogyakarta: Laperapustaka Utama.

Yuswadi, Hary. 2005. *Melawan Demi Kesejahteraan (Perlawanan Petani Jeruk Terhadap Kebijakan Pembangunan Pertanian)*. Cetakan I. Jember: KOMPYAWISDA JATIM).

## Jurnal Online

Putro, Dwi. 2010. *Keadilan Bagi Buruh Perkebunan: Membangun Kesadaran dan Memperjuangkan Penegakan Hukum yang Adil*. Artikel diterbitkan. <http://media.leidenuniv.nl/legacy/widodo-dwi-putro---final---19-june-2010---final-version.pdf> [5 Juni 2014].

## Artikel Online

Anonim. 2012. *Teori Dasar Sosiologi*. <http://bayusembilan.blog.fisip.uns.ac.id/2012/06/30/strategi-pengembangan-pengusaha-kecil-dan-menengah-di-indonesia-dalam-menciptakan-struktur-ekonomi-yang-seimbang/>. [18 Maret 2014]

[id.Wikipedia.org/wiki/perkebunan](http://id.Wikipedia.org/wiki/perkebunan). [17 Desember 2013]

Djunaidy, Mahbub. 2013. <http://www.tempo.co/read/news/2013/04/17/058473961/Buruh-Perkebunan-Jember-Tolak-Kehadiran-Investor>. [20 Desember 2013]

Kusmandani, Syaiful. 2014. *Ratusan Buruh Perkebunan Di Jember Tuntut Kesejahteraan*. <http://detik.com/news/read/2014/08/06/104110/2654437/475/ratusan-buruh-perkebunan-di-jember-tuntut-kesejahteraan>. [5 November 2014]

Nainggolan, Benhidris. 2012. Buruh Kontrak di Perkebunan .[www.majalahsedare.net/2012/09/buruh-kontrak-di-perkebunan.html](http://www.majalahsedare.net/2012/09/buruh-kontrak-di-perkebunan.html) [20 Desember 2013]

Purba, Arif. 2013. *Tidak Semua Buruh Perkebunan Di Jember Bakal Nikmati UMK Baru.* <http://touch.jaringnews.com/index.php/politik-peristiwaumum32274/tidak-semua-buruh-perkebunan-di-jember-bakal-nikmati-umk-baru>. [5 November 2014]

[pdpjember.blogspot.com/p/pengumuman.html?m=1](http://pdpjember.blogspot.com/p/pengumuman.html?m=1) [8 September 2014]

Septian, Feri. 2013. *Nasib Kelam Buruh Islam di bidang Pertanian dan Perkebunan.*<http://feriseptian.blogspot.com/2013/05/nasib-kelam-buruh-islam-di-bidang.html>. [17 Maret 2014].

[www.bpkp.go.id/uu/.../2/39/224.bpkp](http://www.bpkp.go.id/uu/.../2/39/224.bpkp). [14 November 2014]

